



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH  
KOMISI III DPR RI RAPAT KERJA DENGAN  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke- : -  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Dengan : Komisi Pemberantasan Korupsi RI  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Kamis, 9 Februari 2023  
Pukul : 10.00 s.d. 15.45 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II DPR, Lantai 3.  
Ketua Rapat : Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. (F-PDIP/Ketua Komisi III DPR RI)  
Acara : 1. Evaluasi Kinerja dan capaian KPK Tahun 2022;  
2. Rencana Kerja di Tahun 2023, program prioritas dan strategi dalam pencapaiannya beserta DIPA Tahun 2023.  
Sekretaris Rapat : Novianti, S.E./Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI  
Hadir : **A. Anggota** Komisi III:  
Hadir 38 dari 53 orang Anggota dengan rincian:

**Pimpinan:**

Hadir 3 dari 5 orang Pimpinan

1. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. (Ketua/F-PDIP);
2. H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (Wakil Ketua/F-Gerindra);
3. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. (Wakil Ketua/F-PAN)

**Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:**

Hadir 10 dari 11 orang anggota Komisi III:

1. Ichsan Soelistio
2. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.

3. Drs. M. Nurdin, M.M.
4. Gilang Dhiela Fararez, S.H., L.L.M.
5. H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
6. Johan Budi Sapto Pribowo
7. I Wayan Sudirta, S.H.
8. H. Agustiar Sabran, S. Kom. (Virtual)
9. Novri Ompusunggu, S.H., M.H. (Virtual)
10. Irjen Pol (Purn) Drs. H. Safaruddin

**Fraksi Partai Golongsn Karya:**

Hadir 6 dari 7 orang Anggota Komisi III:

1. Supriansa, S.H., M.H.
2. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S. Sos., M.Si.
3. Ir. Hj. Sari Yuliaty, M.T. (Virtual)
4. Drs. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H.
5. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
6. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.

**Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:**

Hadir 4 dari 7 orang Anggota Komisi III:

1. Muhammad Rahul
2. Siti Nurizka Puteri Jaya, S.H., M.H.
3. Bimantoro Wiyono, S.H.
4. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H.

**Fraksi Partai Nasional Demokrat:**

Hadir 4 dari 5 orang Anggota Komisi III:

1. Eva Yuliana, M.Si. (Virtual)
2. Taufik Basari, S.H., M. Hum., L.L.M.
3. Y. Jacky Uli
4. Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H. (Virtual)

**Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:**

Hadir 3 dari 5 orang Anggota Komisi III:

1. Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P.
2. N.M. Dipo Nusantara Pija Upa, S.H., M.Kn.
3. Heru Widodo, S. Psi.

**Fraksi Partai Demokrat**

Hadir 3 dari 5 orang Anggota Komisi III:

1. Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS.
2. H. Santoso, S.H., M.H.
3. Dr. Benny Kabur Herman, S.H.

**Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:**

Hadir 2 dari 4 orang Anggota Komisi III:

1. H. M. Nasir Djamil, M.Si.
2. Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.

**Fraksi Partai Amanat Nasional:**

Hadir 2 dari 3 orang Anggota Komisi III:

1. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
2. Mulfachri Harahap, S.H., M.H. (Virtual)

**Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:**

Hadir 1 dari 1 orang Anggota Komisi III:

H. Arsul Sani, S.H., M.Si.

**B. Undangan:**

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI beserta jajaran:

1. Firli Bahuri (Ketua KPK)
2. Nawawi Pomolango (Wakil Ketua KPK)
3. Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK)
4. Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK)
5. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK)

**KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):**

Pak Sekjen PPP jangan pura-pura *enggak* dengar Sekjen yang tadi.

Sudah bisa kita mulai?

Pak Hinca, hadir?

Senior Sudding ya, kita mulai.

Pak Jacki, , kita mulai ya.

Izin, Pak Ketua, kita mulai.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan ditemani dengan Mas Pangeran dan Anggota Komisi III DPR RI,**

**Yang terhormat Saudara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi beserta seluruh jajarannya serta hadirin yang kami muliakan,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur ke hadirat-Nya karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat melaksanakan acara dan menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat kerja telah dihadiri secara fisik dan virtual sebanyak 23 dari 53 Anggota Komisi III DPR RI dari 8 fraksi.

Oleh karena itu, kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tatibmaka perkenankan kami membuka rapat kerja hari ini dan rapat kita nyatakan terbuka.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.05 WIB)  
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Kami menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada Saudara Ketua KPK beserta seluruh jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat kerja hari ini.

Sesuai dengan agenda yang kami mintakan kepada KPK maka acara agenda rapat hari ini yang pertama, evaluasi kinerja dan capaian KPK tahun 2022; dua, rencana kerja di tahun 2023; program prioritas dan strategi dalam pencapaiannya beserta DIPA Tahun 2023. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan kawan-kawan kalau ada menanyakan isu-isu yang sedang *highlight* hari ini, kira-kira begitu.

Kami ingin mendapatkan persetujuan, apakah rapat kita hari ini bisa akhiri pada pukul berapa? 12.30 WIB.

Kita ikuti senior Sudding 12.30. Kalau kurang, ya, nanti kita tambah. Kita setuju dulu ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

Pada kesempatan yang baik ini Komisi III ingin mengetahui capaian target kinerja KPK di tahun 2022 dan kendala yang dihadapi. Apakah kendala tersebut sudah dapat diatasi atau hingga saat ini masih dalam penanganan? Komisi III juga ingin mengetahui rencana KPK di tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp1.276.710.410.000.

Ini mungkin sebelum kena *automatic adjustment* karena *automatic adjustment* yang 7% ini sudah ditetapkan melalui undang-undang yang baru saja disahkan. Namun demikian, untuk *adjustment*-nya nanti *monggo* Pimpinan KPK, dalam hal ini Ketua KPK untuk memberikan penjelasan.

Untuk itu, kami persilakan dengan hormat kepada Saudara Ketua KPK untuk menyampaikan penjelasannya.

Kami persilakan, Pak Ketua.

**KETUA KPK RI (FIRLI BAHURI):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat pagi,  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
*Shalom,*  
*Om swastiastu,*

*Namo buddhaya,*  
Salam kebajikan,

**Yang saya hormati Ketua Komisi III DPR RI beserta Wakil Ketua,  
Yang saya hormati segenap Anggota Komisi III DPR RI, baik yang hadir  
fisik maupun yang hadir secara virtual,  
Rekan-rekan Pimpinan KPK, pejabat struktural KPK yang saya hormati,**

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanallah Wata Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dipertemukan dalam suasana dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan sehingga kita mampu melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita kepada bangsa dan negara.

Perasaan dan ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan oleh segenap insan KPK kepada segenap anak bangsa di mana pun berada, kepada anggota legislatif, yudikatif, dan eksekutif, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang selalu saja kebersamaian KPK sejak berdiri sampai dengan hari ini.

Pada kesempatan ini pun izinkan kami menyampaikan ucapan selamat atas hari Pers Nasional yang hari ini kita peringati pada tanggal 9 Februari 2023, yang perayaannya dilaksanakan di Medan. Tentu ucapan hari Pers Nasional ini mengandung makna. Kami sungguh menyadari bahwa tugas-tugas KPK juga didukung oleh rekan-rekan pers, jurnalis, maupun wartawan karena sesungguhnya mereka jugalah yang memberikan sumbangsih kepada bangsa negara, khususnya mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada kesempatan ini pun kami ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun satu abad Nahdlatul Ulama yang kemarin dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia di Sidoarjo dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami, kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada partai politik yang saya mengikuti terus-terus, Masih ada saja tiap tahun melaksanakan ulang tahun partai politik dan itu adalah salah satu wujud kecintaan kita bangsa dan negara.

Semangat salam kebangsaan kami sampaikan pada segenap kita semua di sini karena sesungguhnya kita hadir karena semangat lagu "Indonesia Raya", *bangunlah jiwanya bangunlah badannya*, dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya di alinea keempat.

KPK bekerja berdasarkan tujuan negara karena sesungguhnya keberadaan KPK diniatkan untuk mewujudkan tujuan negara dengan cara upaya-upaya kerja nyata melakukan pemberantasan tindak korupsi, karena sesungguhnya sulit rasanya mewujudkan tujuan negara tersebut apabila korupsi masih ada di negeri ini. KPK juga bekerja berdasarkan program rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Sebagaimana dimaksudkan, kita tahu bahwa ada tujuh program prioritas nasional di antaranya adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan kualitas berkeadilan. Ini menjadi fokus KPK. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Yang ketiga adalah melakukan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; dan yang keempat, yaitu prioritas nasional; ketujuh, memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan, keamanan, serta transformasi pelayanan publik.

Program prioritas nasional tersebut tentulah KPK jabarkan dan kita membuat suatu konsep yang kita kenal dengan *roadmap* pemberantasan tindak pidana korupsi. *Roadmap* ini sudah pernah kami sampaikan kepada Komisi III. Inilah salah satu cara pijakan kita dalam upaya pemberantasan korupsi.

Angka 2045 menjadi penting karena seratus tahun Indonesia merdeka, di situlah Indonesia harus bersih dari korupsi. Indonesia akan memasuki abad baru, peradaban baru, yaitu peradaban Indonesia dan dia bebas dari korupsi. Karena sesungguhnya Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar lima dunia. salah satu syaratnya adalah tanpa korupsi. Sehingga kami sepakat, seluruh insan KPK meyakini bahwa seluruh rakyat Indonesia juga memiliki keyakinan suatu saat Indonesia akan bebas dari korupsi dan peradaban adalah peradaban antikorupsi.

#### **Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati,**

Berdasarkan Undang-Undang 19/2019, ada enam tugas pokok KPK dan enam tugas pokok tersebut dijabarkan di dalam rencana strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Kami sampaikan dan ingin kami sampaikan ulang lagi, yaitu visi, bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Visi bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia baru, memiliki tujuan ada tiga.

Yang pertama adalah meningkatnya integritas penyelenggaraan negara dan peran serta masyarakat yang antikorupsi. Yang kedua adalah meningkatnya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan pengelolaan keuangan negara yang anti. Yang ketiga adalah meningkatnya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Tiga tujuan tersebut dilakukan secara simultan, berkesinambungan, dan terus-menerus melalui program-program yang digagas oleh KPK.

#### **Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati,**

Sebagaimana yang pernah kami sampaikan di awal tahun, ulangi, bulan Oktober 2022 yang lalu, saat kita membahas rancangan anggaran, khususnya RKP KPK tahun 2023, kami pernah menyampaikan bahwa program prioritas nasional yang diembankan kepada KPK ada empat.

Yang pertama adalah KPK diberi mandat untuk melakukan survei penilaian integritas, yaitu indeks integritas nasional. Ini adalah *national*

*integrity*. Yang kedua adalah KPK dimandatkan untuk melakukan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebesar-besarnya atau aset *recovery* yang maksimal. Yang ketiga adalah KPK sebagaimana Perpres Nomor 54 Tahun 2018 dimandatkan dan diberikan amanah sebagai sekretaris nasional pencegahan korupsi.

Untuk itu, ada tiga fokus stranas PK, dijabarkan dalam dua belas kegiatan dan itu dilaksanakan oleh KPK. Selanjutnya, nanti akan kami jelaskan lebih lanjut.

Yang keempat adalah KPK juga dimandatkan untuk menyusun sistem penanganan perkara integrasi. Sistem penanganan perkara integrasi ini menjadi penting karena akan memudahkan setiap penanganan perkara, khususnya tindak korupsi, baik oleh para penegak hukum, KPK, Polri, Kejaksaan, maupun badan peradilan.

Sementara, di samping program prioritas tadi, KPK pun melaksanakan program-program terobosan atau program unggulan, di antaranya adalah paku integritas. Pendidikan penanaman nilai-nilai integritas terhadap penyelenggaraan negara ini menjadi penting dan ini sudah kita laksanakan, setidaknya 17 kementerian/lembaga, dilaksanakan pada tahun 2020 yang lalu dan diikuti target kita adalah seluruh kementerian/lembaga dan seluruh Eselon I beserta pasangannya.

Yang berikutnya adalah dalam rangka mewujudkan politik yang berintegritas, KPK mengedepankan program, yaitu politik cerdas berintegritas. Kegiatan politik integritas tersebut telah dilaksanakan terhadap dua puluh partai politik sebagai peserta pemilu 2019 dan tahun ini akan kami laksanakan terhadap partai politik sebagai peserta pemilu 2024 yang akan datang. Di samping itu, ada kegiatan lain, yaitu Desa Anti Korupsi dan juga Jelajah Negeri Bangun AntiKorupsi.

### **Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati,**

Dari berbagai program tadi, baik program prioritas maupun program unggulan, KPK ingin menyampaikan capaiannya sebagai berikut. Pertama, kita ingin sebagaimana tadi disampaikan, ingin mengukur sejauh mana masyarakat tidak ingin melakukan korupsi maka kita lakukan survei bersama dengan BPS yang kita kenal dengan indeks perilaku antikorupsi.

Angka indeks perilaku antikorupsi tahun 2022 meningkat 3,93 dari tahun 2021, 3,88, dan angka ini terus meningkat sejak tahun 2019 di mana kalau kita lihat grafik, 2019: 3,70; 2023: 0,84; 2021: 3,88; dan 2022 yang lalu 3,93 dengan skala 0 sampai dengan 5. Semakin mendekati 5 maka kita semakin antikorupsi. Semakin mendekati 0 maka kita permisif terhadap korupsi. Inilah hasil yang dilakukan oleh KPK terkait dengan program-program unggulan yang dilaksanakan oleh KPK.

Selanjutnya, sebagaimana amanat rencana pembangunan jangka menengah nasional, KPK pun diberikan mandat untuk melaksanakan *national*

*integrity* atau Indonesian National Integrity (SPI) Survei Penilaian Integritas. Survei ini dilaksanakan sudah berjalan dua tahun 2021 dan 2022.

Khusus tahun 2022 ini, angka capaian SPI kita di angka 71,9 atau secara ringkas kami ingin sampaikan, angka indeks integritas per kementerian/lembaga pemerintah dan daerah: lembaga pemerintahan nonkementerian 79,5; kementerian 77,8; pemerintah kota 72,2; pemerintah kabupaten 70,6; pemerintah provinsi adalah 69,2.

Kami ingin sampaikan, angka SPI tertinggi berselaras dengan MCP (*Monitoring Center for Prevention*), di antaranya tingkat provinsi tertinggi SPI adalah Provinsi Bali. Tertinggi MCP adalah Provinsi Bali, artinya dengan dua ukuran *Monitoring Center for Prevention* dan survei penilaian integritas ini cukup valid kita percaya.

**Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati,**

Selanjutnya, tentu menjadi PR kita bersama, kalau kita lihat tadi angka SPI, dari angka skala 0 sampai dengan 100, kita masih sampai sekarang 71,9. Ini mengandung makna, tidak hanya dilihat dari angka-angka tersebut, tetapi saya minta kepada kementerian/lembaga dan seluruh pemerintah daerah agar melihat hasil survei penilaian integritas. Karena di situlah kita akan kelihatan bagaimana tata kelola negara kita, bagaimana, apakah ada terjadi suap dan gratifikasi terkait dengan perdagangan pengaruh.

Apakah juga masih terjadi penyalahgunaan pengelolaan barang dan jasa atau juga masih terjadi penyalahgunaan fasilitas kantor atau mungkin juga terjadi benturan kepentingan, termasuk juga pemberian uang, fasilitas, barang dalam promosi jabatan. Selanjutnya, juga tentulah kita ingin menjadikan hasil survei ini sebagai pembelajaran kita semua dalam rangka tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan.

**Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati,**

Sebagaimana tadi kami sampaikan amanat daripada undang-undang KPK melaksanakan upaya pengembalian aset *recovery* sebanyak-banyaknya. Kami laporkan kepada Komisi III DPR yang kami hormati, tahun 2022 KPK berhasil mengembalikan aset kerugian negara sebesar 575,74 miliar dan angka ini lebih besar daripada tahun lalu, tahun 2021, di mana tahun 2001, 416 miliar dan angka ini lebih besar berkali lipat dari target yang dicanangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, yaitu 141,7%, ulangi, 141,7 miliar atau capaiannya mencapai 294, 25%.

**Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati,**

Sebagaimana amanat Perpres 2000 Perpres 54 Tahun 2018, KPK menjalankan amanat tentang strategi nasional pencegahan korupsi. KPK tidak bekerja sendiri, tapi KPK bekerja dengan setidaknya ada kementerian, lima kementerian/lembaga dalam rangka mengelola strategi nasional pencegahan korupsi.



Kami laporkan pada kesempatan ini, ada beberapa fokus area: 1. tata kelola keuangan; 2. terkait dengan penegakan hukum dan pelayanan publik. Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh stranas PK, kami mengambil contoh adalah penertiban pelabuhan, setidaknya ada 14 pelabuhan yang sudah kita lakukan penertiban dalam rangka memberikan pelayanan publik, baik terhadap pengguna pelabuhan maupun kepada para pihak untuk menjamin lancarnya distribusi logistik maupun orang.

**Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati,**

Terakhir, kami ingin sampaikan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, amanat undang-undang bahwa KPK dimandatkan untuk mengelola sistem penanganan perkara terintegrasi berdasarkan teknologi informasi. Kami sampaikan bahwa sampai hari ini hal tersebut sudah dijalankan dan sudah diikuti setidaknya 212 satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan telah melibatkan 329 satuan kerja di lingkungan Polri. Kita ingin memastikan bahwa terjadi *sharing information* dan sekaligus juga membantu rekan-rekan aparat negara hukum dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Terakhir, kami sampaikan terkait anggaran.

**Ketua Komisi III DPR RI dan segenap Anggota yang kami hormati,**

Kami segenap insan KPK menyampaikan ucapan terima kasih. Berdasarkan data tahun 2005 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan anggaran KPK mengalami peningkatan, setidaknya lima tahun terakhir terus meningkat. Bahkan, dua tahun terakhir mencapai angka di atas 1.000 miliar.

Tahun 2020 yang lalu KPK diberikan anggaran, baik belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal sebesar Rp1.303.673.972.000. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp1.268.278.492.207 atau capaian 97,3%. Capaian ini adalah capaian tertinggi selama KPK berdiri.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian,

Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih, tahun 2023 KPK menerima anggaran sebesar Rp1.276.710.410.000 dengan distribusi belanja pegawai Rp661.645.755.000, belanja barang Rp440.420.439.000, belanja modal Rp174.644.216. Angka ini bisa terwujud dan bisa terealisasi atas dukungan dari Komisi III DPR RI Republik Indonesia. Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya.

Kami tetap mengharapkan dukungan semua pihak rakyat Indonesia supaya Indonesia, supaya KPK berantas korupsi tidak pernah berhenti, sebagaimana *tagline* ulang tahun KPK yang lalu, "Mengabdikan tak henti untuk Negeri. Bersatu Berantas Korupsi".

Sekian, terima kasih kami ingin sampaikan.

Selanjutnya, mohon izin pada, Ketua Komisi III, nanti per bidang akan disampaikan, mulai dari sekretariat jenderal, Deputy Penindakan, Pencegahan, Informasi dan Data, Koordinasi dan Supervisi karena ini 5 tugas, 4 tugas pokok nanti akan disampaikan oleh masing-masing wakil ketua dan sekretariat jenderal.

**KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):**

Dipersilakan.

**KETUA KPK RI**

Baik, selanjutnya dipersilakan Pak Sekjen.  
Ya, silakan.

**SEKJEN KPK RI (CAHYA H. HAREPA):**

Terima kasih ,Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan DPR, Pimpinan KPK, khususnya Pimpinan DPR Komisi III,

Selamat pagi,

Izinkan saya menyampaikan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua kiranya kita semua bersama keluarga dalam keadaan sehat yang sedang sakit bisa segera sembuh kembali.

Bapak-Ibu sekalian,

Untuk sekretariat jenderal yang telah dilakukan pada tahun 2022, terdiri dari program yang terkait dengan bidang hukum adalah penguatan peraturan dalam pemberantasan korupsi. Ada penyelesaian peraturan perundang-undangan pasca berlakunya Undang-Undang 19 Tahun 2019, KPK telah menyelesaikan 25 peraturan internal dan eksternal.

Peraturan yang belum selesai di antaranya adalah peraturan tentang tunjangan khusus. Sedangkan terkait litigasi, dari 43 perkara yang dihadapi KPK di tahun 2022, 32 perkara sudah selesai sudah diputus, kemudian 10 perkara masih belum selesai.

Terkait sumber daya manusia, per 31 Desember tahun 2022 jumlah total pegawai KPK adalah sebesar 1.632 pegawai, yang terdiri dari dewan pengawas 5 orang, Pimpinan KPK 5 orang, PNS KPK 1.333 orang, dan pegawai negeri yang ditugaskan adalah sebesar 289.

Dari sisi keuangan, realisasi belanja KPK Tahun Anggaran 2022 per akhir Desember 2022, realisasi yang kami bisa capai adalah sebesar 97% secara total dari pagu sekitar 1,3 triliun. Kita mencapai realisasi sebesar 1,26 triliun, di mana itu terdiri dari belanja pegawai mencapai 99%, belanja barang 92%, dan belanja modal 98%.

Kalau dilihat dari realisasi per , dukungan manajemen adalah 99%, program pencegahan dan penindakan perkara korupsi adalah 93%.

Bapak-Ibu sekalian,

Dapat kami laporkan bahwa di era kepemimpinan yang saat ini bisa mencapai realisasi yang tertinggi sejak KPK berdiri, yaitu 97%. Kemudian, terkait dengan penerimaan negara bukan pajak pada tahun 2022 adalah sebesar 439,7 miliar dari target 141,7 miliar dan ini adalah PNBPN tertinggi diterima dari penanganan TPK sebesar 417,4 miliar. Selebihnya berasal dari PNBPN umum, yaitu 19 miliar dan 3,3 miliar dari gratifikasi.

Bapak-Ibu sekalian,

Adapun pada tahun 2022 ini terdapat peningkatan nilai PNBPN sebesar 193,4 miliar dibandingkan dengan PNBPN tahun sebelumnya, yaitu 2021.

Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian,

Terkait dengan pengawasan internal KPK telah dilaksanakan dalam rangka memenuhi asas akuntabilitas sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kemudian juga pengawasan internal dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan ini juga telah dilaksanakan oleh jajaran Inspektorat yang bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan KPK.

Di sini kita bisa melihat kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektur KPK dalam pengawasan internal KPK tahun 2021 dan 2022 terhadap dukungan manajemen adalah sebanyak 21, kemudian pendampingan unit kerja kegiatannya adalah 8 dibanding tahun sebelumnya 4, kemudian ada koordinasi, konsultasi, pemeriksaan catatan disiplin, pemantauan, eksaminasi putusan perkara, pemeriksaan terkait BMN, pemeriksaan menelaah, serta juga audit atau *review* atau evaluasi.

Selanjutnya untuk tahun 2023, rencana kerja di bidang kesetjanaan ada beberapa program prioritas, yaitu yang pertama adalah pelaksanaan dukungan manajemen KPK, kemudian peningkatan tata kelola kelembagaan, kemudian peningkatan kapabilitas organisasi yang terdiri dari SDM, regulasi, teknologi dan informasi.

Bapak-Ibu sekalian,

Direncanakan pada tahun 2023 jumlah kekuatan pegawai KPK sebanyak 454 orang dengan jumlah anggaran 807,9 miliar. Kemudian,

strategi dalam melaksanakan programnya sekretaris jenderal akan senantiasa berkolaborasi dengan mitra internal dan eksternal KPK, yaitu kementerian/lembaga yang terkait, diantaranya BPK, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenpan RB, Polri, Kejaksaan RI, BPKP, BKN, LAN, dan lain-lain yang terutama juga dengan DPR.

Demikian, Bapak-Ibu sekalian, yang terkait dengan sekretariat jenderal. Izin, Pimpinan, kami kembalikan kepada Pimpinan.

Terima kasih Bapak-Ibu Pimpinan Anggota DPR dan Pimpinan KPK.

**KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):**

Nah, Pak, sebentar, Pak. Saya *break* dulu. Ini memang saya dapat, kami dapat aspirasi dari rakyat langsung, itu *squad* KPK ini yang belum kenal, kecuali Pak Firli. Jadi, mohon izin, Pak Firli perkenalkan satu-satu karena ini *live streaming*, rakyat supaya paham.

Oh, ini yang namanya Pak Wawan, yang kata Pak Ketua kalau ketemu tenang, tapi kalau ketemu dengan Pak, siapa lagi, Pak? Semua langsung bunyi. Kalau ketemu Pak Karyoto *ngeri* karena bagian dari penindakan eksekusi.

*Nah*, ini mohon diperkenalkan, Pak. Mohon sekalian, Pak Pimpinan, tadi Pak Sekjen, Pak Cahya, juga belum dikenalkan, Pak ... (suara tidak jelas) namanya. Jadi, biar publik tahu karena ini rapat terbuka, Pak, dan *live*, Pak, ya.

*Monggo*, Pak, Pak Ketua.

**DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT KPK RI (WAWAN WARDANA):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang saya hormati Pimpinan Komisi III DPR RI beserta Anggota, Pimpinan KPK, serta teman-teman dari KPK,

Perkenalkan saya Wawan Wardiana, Pak, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Dengan Pak Bambang beberapa kali sudah ketemu juga di lapangan, begitu.

Ya siap.

Izinkan kami untuk menjelaskan beberapa hal terkait beberapa program yang sudah dilaksanakan di tahun 2022 ini dan di rencana kerja di tahun 2023. Yang pertama, di bidang pendidikan ini ada yang namanya sosialisasi dan kampanye. Tahun 2022 ditargetkan 20 juta orang itu teredukasi antikorupsi dengan menggunakan berbagai cara, media, dan *event*,

ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, baik itu menggunakan sarana digital atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain lewat media. Kemudian juga ada webinar, kemudian *roadshow* bus KPK, dan lain-lain. Capaian kami kemarin dihitung ada 31,98 juta masyarakat Indonesia yang sudah teredukasi.

Kemudian, di tahun 2022 juga kami sudah melaksanakan kegiatan pakta integritas penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas di mana para pesertanya adalah menteri, wakil menteri, dan seluruh jajaran Eselon 1 di kementerian beserta pasangannya. Dan tahun yang lalu, 2022 ini kami mengundang juga sembilan PJ Gubernur di tahun 2022 yang lalu, kemudian Anggota DPRD-nya, kemudian sekedanya dan wakil gubernurnya. Ada 96 yang sudah mengikuti.

Kemudian, di tahun 2022 juga kami sudah bermitra karena KPK juga tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan sosialisasi dan kampanye ini. Kami sudah bermitra dengan 93 institusi, baik itu di kementerian/lembaga maupun pihak-pihak lainnya. Sosialisasi dan kampanye antikorupsi ini dilakukan dalam rangka membangun kesadaran sekaligus memberikan pengetahuan dasar tentang korupsi dan antikorupsi tentunya. Dilakukan dengan berbagai media, saluran, maupun secara daring maupun secara luring.

Kemudian, ada juga yang kami lakukan untuk jejaring pendidikan. Yang pertama adalah bahwa di tahun 2022, kami sudah meningkatkan kapasitas dari para pendidik, baik itu guru, kepala sekolah, para pengawas itu mulai dari PAUD, pendidikan dasar, menengah, termasuk dosen dan pimpinan perguruan tinggi sebanyak 6.246 orang. Kemudian, sampai akhir 2022 yang lalu karena untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di pendidikan dasar dan menengah itu harus ada keputusan atau surat yang dikeluarkan oleh kepala daerah terkait dengan implementasinya.

Sampai akhir 2022 yang lalu itu sudah 398 pemerintah daerah yang sudah melaksanakan pendidikan antikorupsi di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian, sampai 2022 yang lalu dari 40.000 sekolah itu sudah 22.860 sekolah pada jenjang dikdasmen yang sudah melaksanakan pendidikan antikorupsi. Untuk pendidikan tinggi sendiri sampai akhir 2022 itu ada 18.738 program studi yang sudah melaksanakan pendidikan anti korupsi.

Sedangkan untuk para penyelenggara negara di perguruan tinggi, dalam hal ini adalah rektor, baik itu di PTN maupun di PTKIN, kami sudah bekerja sama juga dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam membangun ekosistem pendidikan. Jadi, tidak saja di anak didiknya yang diberikan pendidikan anti korupsi, tetapi bagaimana ekosistem yang ada di pendidikan tersebut, apakah itu guru, kepala sekolah, dosen, dekan, termasuk juga Pimpinan perguruan tingginya.

Dan, di akhir tahun yang lalu, ada kurang lebih 85 PTN dan PTKIN serta 109 tinggi negeri sudah membuat komitmen bersama untuk membuat integritas ekosistem di perguruan tinggi melalui 12 area perbaikan, dari mulai pemilihan pimpinan dan pejabat perguruan tinggi; penerimaan mahasiswa

baru; pembelajaran; kemudian penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat; publikasi; pengelolaan SDM; pengelolaan keuangan, administrasi kependidikan; akreditasi dan perizinan; pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, termasuk pengelolaan kerjasama dengan pihak yang lain.

Kemudian, di sektor atau di bidang pendidikan dan pelatihan, selama 2022 yang lalu kami sudah melaksanakan 278 kegiatan pendidikan antikorupsi, baik itu dilaksanakan untuk internal KPK maupun untuk eksternal KPK. Kemudian, peserta pendidikan anti korupsi yang sudah mengikuti di tahun yang lalu itu sebanyak 10.348 peserta. Pada tahun 2022 yang lalu KPK juga menyelenggarakan pelatihan daring antikorupsi yang sudah diikuti sebanyak 105.646 peserta, hingga tahun 2022 yang lalu pelatihan anti korupsi ini diikuti sebanyak 323.073 peserta.

Untuk sertifikasi penyuluh antikorupsi maupun ahli pembangun integritas karena KPK juga memiliki lembaga sertifikasi profesi untuk penyuluhan antikorupsi dan ahli pembangun integritas, di tahun 2022 yang lalu KPK melalui lembaga sertifikasi profesi KPK (LSPKPK) telah menerbitkan 330 sertifikat profesi untuk ahli pembangun integritas dan 2.665 sertifikat untuk profesi PAKSI atau penyuluh antikorupsi.

Dan yang terakhir, untuk bidang peran serta masyarakat, dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi seluruh elemen masyarakat di dalam pemberantasan korupsi, karena KPK juga menyadari dengan jumlah SDM yang terbatas, tidak mungkin tanpa peran serta masyarakat.

Oleh sebab itu, kami mendorong masyarakat berkontribusi secara langsung di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui beberapa kegiatan-kegiatan, di antaranya adalah tahun 2022 yang lalu kita mendorong masyarakat di pedesaan untuk sama-sama mewujudkan sebuah desa yang antikorupsi. Tentunya adalah semua peran serta masyarakat yang ada di sana berkontribusi dan ikut serta dalam mewujudkannya.

Kegiatan percontohan desa antikorupsi di tahun 2022 yang lalu tentunya tetap bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan PDTT, kemudian Kementerian Dalam Negeri, termasuk pemerintah daerahnya dan dilaksanakan di 10 desa pada 10 provinsi sehingga sampai 2022 ini sudah ada 11 provinsi yang memiliki percontohan desa antikorupsi.

Kemudian, untuk bagaimana mendorong masyarakat berpartisipasi di dalam pemberantasan korupsi, termasuk di bidang pendidikan, pencegahan, maupun di bidang penindakan sudah ada 24.090 peserta yang sudah dibina oleh KPK. Dalam hal ini adalah melibatkan masyarakat untuk melakukan pembinaan tokoh masyarakat, LSM, tokoh agama, komunitas, maupun tokoh-tokoh yang lain, maupun masyarakat lainnya di dalam hal berkontribusi di dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Untuk 2023, rencana program prioritas di bidang pendidikan dan peran serta masyarakat. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan substansi

dan instrumen pendidikan antikorupsi serta pembangunan integritas pada ekosistem pendidikan. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap antikorupsi dan strategi pemberantasan korupsi melalui sosialisasi dan kampanye antikorupsi.

Yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi melalui pendidikan, pencegahan, maupun penindakan. Dan, yang keempat adalah bagaimana meningkatkan profesionalisme lembaga diklat yang dimiliki oleh KPK kompetensinya, termasuk juga sertifikasi antikorupsi serta meningkatkan kompetensi pegawai dalam mendukung kinerja pegawai KPK melalui penerapan *corporate university*.

Tahun 2023 jumlah pegawai yang akan... yang ada di pendidikan dan peran serta masyarakat adalah sebanyak 89 pegawai dengan jumlah anggaran yang diberikan adalah Rp63.022.000.000,-.

Demikian, Pimpinan, yang bisa kami sampaikan, waktu kami kembalikan pada... (**rekaman tidak jelas 00:46:31**)

#### **KETUA KPK RI:**

Ya, terima kasih Pak Deputi Pendidikan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat.

Mohon izin, Pak Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi, dan Anggota Komisi III DPR RI apa tadi yang disampaikan oleh Deputi Pendidikan Masyarakat itu adalah program-program yang dikerjakan dalam rangka mewujudkan tujuan. Tujuan pertama, yaitu meningkatkan integritas penyelenggaraan negara dan peran serta masyarakat yang antikorupsi. Ada alat ukurnya.

Alat ukurnya antara lain, satu, sistem integritas partai politik; yang kedua, indeks perilaku antikorupsi; yang ketiga adalah sistem integritas pendidikan. Itu alat ukur dan nilainya sudah ada semua, Pak. Jadi, apa yang kita programkan, apa kegiatannya, apa capaiannya, indikator capaiannya, termasuk pengukuran indikator capaian.

Selanjutnya, penyampaian kinerja 2022 dan program 2023 dari Bidang Pencegahan dan Monitoring. Ini yang mana Pasal 6 huruf c dan huruf b.

Ya silakan, Pak Gufon.

#### **DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN MONITORING KPK RI (NURUL GUFON):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Juga sekaligus memperkenalkan, Pak Ketua maupun Pak Wakil Ketua bersama juga segenap Anggota Komisi III

**KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):**

Juga publik ini, Pak, juga rakyat langsung.

**DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN MONITORING KPK RI (NURUL GUFRON):**

Oh siap, bapak.

Dan juga kepada segenap rakyat Indonesia maupun teman-teman media yang meliput acara ini. Saya Nurul Gufron. Jadi, kami berlima ini membidangi beberapa bidang, Pak Ketua, karena sekaligus juga membidangi Bidang Dikmas maka tadi dilimpahkan laporan Dikmas-nya kepada Deputi.

Saya Nurul Gufron, Pak.

**KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):**

Pak Gufron.

**PESERTA RAPAT:**

Yang mengajukan *judicial review* itu.

**DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN MONITORING KPK RI:**

Iya, Pak. Supaya lebih cukup umur, Pak.

Saya lanjutkan, Pak. Jadi, Bidang Pencegahan dan Monitoring sebagaimana diamanatkan di undang-undang, kami adalah yang mengampu Pasal 6 huruf a pencegahan dan huruf c, yaitu monitoring.

Pencegahan, orientasinya kalau Dikmas tadi meningkatkan integritas, kami meningkatkan agar sistem tata kelola pemerintahan dan layanan publik itu tidak lagi ataupun setidaknya terbatas untuk dilakukan korupsi, Pak. Di dalamnya kami memiliki empat Direktorat Monitoring, yaitu melakukan kajian-kajian yang orientasinya adalah bagaimana meningkatkan efektivitas program-program pemerintah dan kalaupun kemudian sudah efektif, kami juga meningkatkan efisiensi. Sehingga, kerja-kerja monitoring melalui proses dari inputnya, dari rekam jejak dari penindakan kasus-kasus maupun laporan-laporan dari masyarakat itu kemudian kami tentukan fokus-fokus area mana yang akan kami kaji di tahun-tahun berjalan.

Jadi, kami pada saat... pada tahun 2022 ini menetapkan 27 kajian yang kemudian prosesnya setelah kami kaji, kami bersama dengan kementerian terkait, kemudian setelah di... di... dibahas baru kemudian kita sepakati apa-apa yang akan kita tindaklanjuti. Kemudian, hasil kesepakatan



tindak lanjut tersebut akan kami monitor pada pelaksanaannya di tahun berikutnya.

Salah satu contoh yang... apa... kami lakukan di tahun kemarin, salah satunya misalnya di ATR BPN. Bagaimana proses sertifikasi, baik hak milik, HGU maupun HGB yang selama ini bukan hanya tidak efektif dan tidak efisien, bahkan kemudian masalah-masalah konflik sosial berawal dari ketidakpastian tersebut. Maka kami telah melakukan beberapa... apa... rekomendasi dan dikomitmen oleh Kementerian ATR BPN untuk ditindaklanjuti.

Dari 27 kajian tersebut yang telah kami lakukan, yaitu mulai dari kesepakatan rencana aksi ada 79,59%. Lantas, kemudian, hasil SPI pelaksanaan survei penilaian integritas yang melibatkan 631 KLPD seluruh Indonesia dengan jumlah responden 392.758 responden.

Jadi, kami setelah melakukan kajian, hasilnya, dampaknya layanan publiknya yang terasa di masyarakat kami kemudian juga potret menggunakan SPI, sebagaimana disampaikan Pak Ketua tadi. Kalau untuk mengukur indeks integritas itu dengan... dengan IPAK, Pak, Indeks Perilaku Anti Korupsi untuk integritas, untuk mengukur integritas personal.

Kalau ini untuk mengukur sejauh mana pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan sudah berkepastian, kemudian transparan, dan juga partisipatif. Itu dari bidang monitoring. Lebih lanjut nanti Pak Pahala akan membantu kami detail-detail dari kajian apa saja yang telah kami lakukan di tahun 2022.

Setelah monitoring, Pak, kami memiliki juga Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik. Direktorat ini, ini merekam gratifikasi di kementerian/lembaga yang kemudian dilaporkan ke KPK dan oleh KPK kemudian ditentukan apakah merupakan hak penerimanya atautkah dirampas kepada negara, jika itu dilakukan atau diterima berkaitan dengan jabatannya.

Di tahun 2022 ini yang dilaporkan sebanyak 3.903, naik dari tahun 2021, yaitu sebanyak 2.127. Sementara pada tahun sebelumnya juga, 2020, 1.639 pelapor. Jadi, tingkat... kalau dilihat tingkat kepatuhannya ini sudah mencapai 66,93% dalam perspektif institusional, Pak. Tidak... tidak perspektif personal.

Jadi, dari sebanyak 774 kementerian/lembaga ini, yang sudah masuk, artinya sudah mendaftarkan gratifikasinya 518 institusi. Artinya, dalam perspektif institusional itu sudah 66,93%. Targetnya 70, masih... masih belum tercapai, Pak,. Jadi, kami masih perlu mensosialisasikan kepada kelembagaan yang ada. Itu gratifikasi dan layanan publik.

Selanjutnya, pelaporan LHKPN. Sekali lagi, ini juga memotret bagaimana lalu lintas harta kekayaan penyelenggaraan negara agar kemudian terpantau potensi korupsinya atau tidak. Data di tahun 2020 sampai 2022 ini menunjukkan bahwa dari tahun 2021, yaitu sebanyak 3.777.184 yang melaporkan harta kekayaannya. Saat ini sudah naik menjadi 3.000 dari wajib

lapornya 3.800.220. Itu wajib lapornya. Sementara yang telah melakukan pelaporan ada sebanyak 3.705.760.

Ini yang kami potret adalah yang patuh secara lengkap, Pak. Ada banyak yang melaporkannya kemudian tidak memberi kuasa kepada KPK untuk memeriksanya untuk kemudian mengkrosceknya. Untuk yang begitu belum kami potret. Kami... kami yang potret adalah yang yang sudah sempurna melaporkan dan memberi kuasa kepada KPK untuk memeriksanya. Itu dari pelaporan dan pemeriksaan LHKPN.

Selanjutnya dari Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha. Jadi, kami saat ini dengan struktur yang ada tidak hanya kemudian meng-*insert*-i ataupun kemudian aksi kepada penyelenggaraan negara ataupun sektor publik, tapi kami juga sudah masuk kepada sektor privat, yaitu dunia usaha. Karena asumsinya korupsi terjadi bukan hanya dari penyelenggaraan negara, tapi juga ada ada kesepakatan ada atau ada kongkalikong dengan pihak dunia usaha.

Oleh karena itu, dari sektor dunia usaha karena ini adalah struktur baru, baru sekitar dua tahun ini maka kami baru melakukan beberapa hal yang masih memulainya. Tetapi, kami menggunakan standar yang sangat terukur yaitu menggunakan SMAP, yaitu Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Kalau sektor yang bersifat umum, publik, biasanya menggunakan ISO 37001, tetapi KPK juga kemudian memberikan panduan yang bersifat gratis, Pak, yaitu menggunakan PANCEK (Panduan Cegah AntiKorupsi). Ini yang gratis yang dari... dari KPK.

Itu harapannya tata kelola bukan hanya dari penyelenggara bersifat publik yang antikorupsi, tapi juga tata kelola badan usaha, utamanya yang akan mengakses kepada... apa... rekanan-rekanan ataupun penyediaan terhadap badan dan jasa di pemerintah. Harapannya juga sudah dipersyaratkan menggunakan sistem manajemen antipenyuapan ini, Pak. Ini yang kami lakukan.

Saat ini kami menggerakkan, memotivasi setiap daerah adanya KAD, yaitu Komisi Anti Korupsi di daerah-daerah. Di setiap daerah ada asosiasi-asosiasinya yang kemudian untuk menilai dan juga berdiskusi dengan kami mana-mana yang kemudian masih agak... agak *jungut*, masih banyak penuh butuh... butuh koneksi atau lain-lain pada sektor usahanya.

Itu berdiskusi dengan kami untuk kami kemudian lakukan pembenahan supaya sektor usaha ini lebih *fair*, lebih berkeadilan dan antikorupsi. Dari yang ada komite advokasi daerah saat ini yang sudah terbentuk berdasarkan sektornya, kalau daerah sudah banyak yang berdasarkan sektor, ada enam sektor. Harapannya di tahun 2023 ini nanti akan kami tingkatkan.

Lebih lanjut pada Stranas, Pak, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi. KPK juga menjadi sekretariat koordinasi koordinator strategi pencegahan nasional antikorupsi yang membawahi ataupun berkolaborasi

dengan lima kementerian dan lembaga, yaitu dengan Kemenpan RB berkaitan dengan pengelolaan SDM reformasi birokrasi, dengan Bappenas dengan perencanaan, dengan Kemendagri karena berkaitan dengan daerah, dan dengan KSP karena berkaitan koordinasi di tingkat pusat. Areanya, yaitu 3 area dan 12 rencana aksi, mulai dari perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan yang ketiga, pada area fokus hukum dan birokrasi reformasi.

Salah satunya yang dapat kami laporkan sebagai capaian-capaian rencana aksi di tahun 2022, kami telah melakukan pembenahan di pelabuhan, Pak. Yang semula tingkat layanan di pelabuhan paling cepat tiga hari atau 72 jam. Saat ini di pelabuhan kami sudah bisa tingkatkan kecepatannya menjadi 23 jam. Ini adalah kecepatan 20 besar di dunia, Pak. Kami, pelabuhan Indonesia di 14 pelabuhan sudah bisa mencapai masuk tercepat di 20 besar dunia.

Ini salah satunya dengan cara mengintegrasikan beberapa K/L yang ada di pemangku kepentingan *stakeholder* di pelabuhan, yang semula ada 16 kementerian/lembaga, kami kemudian integrasikan, misalnya karantina. Karantina ada dari Kesehatan, ada dari KLHK, ada Kementerian KKP, ada Pertanian. Itu semua sekali karantina langsung empat karantina tersebut bisa dilakukan sehingga lebih mempercepat.

Yang kedua, misalnya juga pe... penggunaan neraca komoditas ekspor impor, Pak. Sehingga, antara kebutuhan dan kemudian kebutuhan dalam negeri tentang barang dan jasa, tentang barang, utamanya komoditas-komoditas sembilan bahan pokok, tetapi yang terealisasi pada tahun 2022 ini baru lima.

Itu kita sudah memiliki sistem yang memadukan, yang semula misalnya Kementerian Pertanian dengan Perdagangan selalu memiliki perspektif yang berbeda. Kementerian Pertanian selalu mengatakan cukup, tapi sektor di perspektif perdagangan melihat di pasar faktanya kurang. Biasanya kemudian menimbulkan *gap-gap*. Saat ini dipadukan dalam sebuah... apa... aplikasi neraca perdagangan sehingga semuanya bisa dipadukan, Pak. Itu dua hal yang salah satunya telah terealisasi pada 2022 ini.

Selanjutnya, untuk rencana Stranas PK maupun... apa... pelaksanaan di 2023, harapannya langsung ke... ke rencana kerja saja. Lanjut, lanjut.

Jadi, program prioritas kinerja kami di 2023, khususnya di bidang pencegahan, yaitu kami akan meningkatkan kepatuhan LHKPN dan gratifikasi dengan mempercepat menggunakan teknologi informasi, Pak. Kedua, pencegahan korupsi pada sektor fokus area akan kami tingkatkan, yaitu pada tiga hal, mulai dari energi pangan, keuangan negara, dan hukum dan birokrasi.

Ketiga, kolaborasi pelaksanaan Rencana Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi kepada kementerian/lembaga akan kami tingkatkan. Keempat, membangun sistem pencegahan korupsi pada dunia usaha. Jadi, kami nanti akan kami lanjutkan karena selama ini dunia usaha masih memiliki *barrier-barrier*, baik di tingkat nasional maupun di daerah-daerah. Yang kelima,

yaitu kami akan melakukan revisi peraturan KPK tentang pelaporan gratifikasi supaya lebih memungkinkan untuk dikoneksikan dengan lembaga-lembaga yang memungkinkan kami bisa memotret lalu lintas keuangan, yaitu misalnya ke pihak perbankan, ke asuransi, ke BPN, maupun ke pajak Pak.

Yang kelima, integrasi data LHKPN dengan data pada instansi lain. Ini konkretnya tadi berkaitan dengan... apa... kebutuhan regulasinya. Yang terakhir, pengembangan modul *Corruption Risk Assessment*, yaitu CRA ini adalah perspektif untuk mengukur kebijakan, baik bersifat *beleid* maupun *regeling*, pengaturan.

Yang bisa kemudian diukur apakah *beleid* tindakan pemerintah ataupun peraturan perundang-undangan itu sudah cukup antikorupsi atau tidak. *Scheme* ini kami harapkan juga bisa menjadi... apa... kaca mata ataupun perspektif, baik *regeling* di tingkat undang-undang maupun sampai ke bawah, Pak.

Terima kasih. Yang dapat kami sampaikan begitu. Kami kembalikan kepada Pak Ketua.

#### **KETUA KPK RI:**

Terima kasih, Pak Gufron.

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati,

Sebelum Pak Deputi... ulangi, Bidang Penindakan, nanti akan disampaikan Bapak Johannes Tanak. Saya hanya memberi catatan singkat kenapa monitor itu menjadi penting.

Sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 19 2019 di pasal huruf c, Pasal 6 huruf c, disebutkan adalah KPK melakukan monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi, kita bukan *cawe-cawe* sebenarnya, Pak, tapi undang-undang ya. Terpaksa kita datang ke kementerian, kita lihat apakah peraturan kementerian sudah betul-betul memastikan bahwa tidak akan terjadi korupsi, tidak ada celah korupsi. Itu kita pastikan. Dan ini dilakukan, kita telaah, kaji, dan teliti. Hasilnya diberikan rekomendasi.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 19, setahun berikutnya kita monitor, Pak. Kalau *enggak* dilaksanakan maka KPK akan mengirim surat kepada Presiden bahwa ada kementerian/lembaga yang tidak menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati. Ini yang... yang ingin kami inginkan sampaikan lagi kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian.

Selanjutnya, tadi ada Pak Gufron menyampaikan tentang sistem nasional neraca komoditas. Ini penting, Pak. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa *supply* dan *demand* itu terpenuhi. Butuh gula 25.000. Produk stok dalam negeri hasilnya 10.000. Berarti harus impor 15.000. Itu *real*. Begitu juga

dengan produk-produk lain. Termasuk juga dengan kita bantu juga membangun sistem informasi mineral dan batubara.

Jadi, KPK itu banyak juga yang dikerjakan, tidak hanya sekedar menangkap orang. Ini harus dipahami juga. Apa yang dilakukan supaya betul-betul tadi, tujuan kita, nomor 2, meningkatnya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan pengelolaan keuangan negara yang antikorupsi.

*Nah*, itu dikerjakan Pak Gufron tadi, Pak. Jadi, ada tujuannya, ada yang dikerjakan ada alat ukurnya.

Selanjutnya, silakan Pak Johannes Tanak untuk Bidang Penindakan.

#### **DEPUTI BIDANG PENINDAKAN KPK RI (JOHANIS TANAK):**

Baik, Pak Ketua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat pagi,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
*Om swastiastu,*  
*Namo buddhaya,*  
Salam kebajikan,

Perkenalkan, saya Johannes Tanak, yang baru beberapa bulan lalu mengikuti *fit and proper test* yang dipimpin langsung oleh Pak Ketua dan Wakil Ketua, serta Anggota Komisi III DPR RI.

Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI,  
Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Anggota Komisi III DPR RI,  
Yang saya hormati juga Pimpinan pemerintahan dan lembaga yang mengikuti kegiatan RDP di Komisi III DPR RI,  
Masyarakat seluruh Indonesia serta awak media yang mengikuti RDP ini yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan,

Di Bidang Penindakan dan Eksekusi ini, saya atas kesepakatan bersama lima pimpinan diperintahkan untuk mengawaki Bidang Penindakan dan Eksekusi. Bidang Penindakan dan Eksekusi ini dipimpin langsung oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi, yang dalam hal ini Pak Karyoto.

Pak Karyoto, mohon.

Kemudian, di bawah penindakan ini dan eksekusi ada Direktorat Penyelidikan, ada Direktorat Penyidikan, ada Direktorat Penuntutan, dan ada Direktorat Eksekusi. Direktur Penyidikannya kebetulan berada di luar kota, Pak, ya. Gemikian juga Penyelidikan dan Penuntutan untuk sementara ini masih kosong karena dikembalikan, kembali bertugas lagi di Kejaksaan. Sedangkan Direktur Eksekusi masih tetap terisi.

Dari target yang penanganan perkara tindak pidana korupsi daripada tahun 2022 ini ditargetkan ada 120 perkara. Jumlah perkara tersebut sebagian besar adalah penyuapan dan gratifikasi. Itu ada 100 perkara. Kemudian, dari jumlah tersebut 47 itu dilakukan... pada umumnya dilakukan pada para Eselon 1 sampai dengan Eselon 4. Selain itu, tentunya melibatkan pihak-pihak ketiga selaku penyuaap.

Dalam tahap penyelidikan, ada 113 perkara. Seratus tiga belas perkara ini juga adalah *carry over* dari tahun-tahun sebelumnya, yang saat ini sedang... yang pada tahun 2022 ini yang lalu ditangani. Demikian juga pada tahun 2022 ada 120 perkara penyidikan. Kemudian, penuntutan ada 133. Dari 133 penuntutan, yang sudah dilakukan perkara yang inkrah itu ada 134 dan sudah dieksekusi 101 dari jumlah tersangka empat... 149 orang.

Pengembalian aset pada tahun 2022 nilai total adalah 575,74 miliar. Ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua. Nilai meningkat, nilainya meningkat 158,8 miliar jika dibandingkan tahun 2021, yang hanya berjumlah 416,94 miliar.

Pengembalian aset ini berasal dari tiga sumber, yaitu denda, uang pengganti, dan uang rampasan. Pada periode tahun 2022, eh, 2020 ulangi, 2020, denda itu berjumlah 41,10 miliar Rupiah. Kemudian pada untuk tahun 2021 berjumlah 22,11 miliar dan untuk tahun 2021, denda... ulangi, 2020 denda itu 400... ulangi 46,17 miliar.

Sedangkan uang pengganti untuk tahun 2021 ada peningkatan, menjadi 23,59 miliar dan pada tahun 2021 uang pengganti berjumlah 90,25 miliar, dan pada *ta...* uang pengganti untuk tahun 2021 berjumlah 195,74 miliar, dan uang rampasan pada tahun 2021 berjumlah 257,08 miliar. Sedangkan tahun 2021 berjumlah 304,58 miliar, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 333,8 miliar.

Pengembalian aset, penetapan status penggunaan, dan hibah dari total aset hasil tindak pidana korupsi 575,75 miliar tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi telah diserahkan kepada kementerian dan lembaga yang masing-masing Kementerian ATR/BPN, Kemenkumham, Kemenhan, KKP, dan Kemenag, serta KY (Komisi Yudisial), yang totalnya berjumlah 92,4 miliar. PSP keempat kabupaten berjumlah 26,19 miliar. Itu kepada Kabupaten Kebumen, Tapanuli Utara, Bangkalan, dan Kota Singkawang.

Adapun rencana kinerja tahun 2023 menjadi program prioritas KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pertama, pemulihan keuangan negara; kedua, penanganan perkara tindak pidana korupsi melalui TPPU dan tindak pidana korupsi, serta peningkatan kolaborasi... ulangi, peningkatan kapabilitas internal organisasi melalui transformasi digital.

Adapun informasi mengenai SDM dan anggaran jumlah pegawai adalah 282 pegawai. Ini terdiri dari penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, serta eksekusi dengan jumlah anggaran 192,6 miliar. Dan, kemudian strategi dalam penanganan yang akan dilakukan adalah dalam melaksanakan program Deputi Bidang Informasi dan Kolaborasi dengan mitra internal dan eksternal, yaitu kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan masyarakat.

Demikian, yang dapat kami sampaikan terkait dengan masalah penindakan dan eksekusi. *Sorry*, tadi data dan informasi tidak... saya ralat, data dan informasi nanti disampaikan oleh pihak yang memangku masalah INDA.

Terima kasih. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih dan saya serahkan kembali kepada Pak Ketua.

**WAKIL KETUA KPK RI (ALEXANDER MARWATA):**

Terima kasih, Pak Ketua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi III serta Bapak-Ibu Anggota Komisi III,

Izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan kinerja Kedeputian Bidang Informasi dan Data. Kedeputian Informasi dan Data ini dimaksudkan dan ditunjukkan sebagai pusat data, Pak. Jadi, memang secara tupoksi, itu mendukung upaya-upaya, baik pencegahan, pendidikan, maupun pemberantasan korupsi.

Di bawah Kedeputian INDA ini ada Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, kemudian Direktorat Manajemen Informasi, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Instansi dan Komisi, serta Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi.

Bapak-Ibu sekalian,

Sepanjang tahun 2022, KPK menerima 4.851 laporan atau aduan dari masyarakat. Dari sejumlah tersebut memang tidak banyak, Bapak-Ibu sekalian, yang terkait dengan korupsi. Lebih banyak terkait dengan kelemahan sistem atau kesalahan administrasi, sehingga laporan masyarakat tersebut yang ditindaklanjuti di Kedeputian Penindakan itu juga tidak begitu banyak. Lebih banyak kita teruskan ke instansi-instansi di mana laporan masyarakat tersebut disampaikan.

Dari laporan masyarakat tersebut, Bapak-Ibu sekalian, di Kedeputian INDA itu laporan diperkaya dengan berbagai informasi yang berasal dari internal KPK. Misalnya, kalau menyangkut penyelenggara negara ya, tentu akan kami *crosscheck* dengan laporan LHKPN misalnya, kan begitu. Karena kami memiliki surat kuasa dari para penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaan tersebut untuk mengecek harta kekayaan yang bersangkutan.

Setelah informasi dari masyarakat diperkaya dengan berbagai informasi yang diperoleh dan kalau ada indikasi cukup bukti maka informasi tersebut akan kami teruskan ke Deputi Penindakan untuk dilakukan proses penyelidikan, Bapak-Ibu sekalian.

Tentu juga laporan-laporan yang kami tindaklanjuti atau kami teruskan ke Deputi Penindakan itu juga dibatasi kewenangan KPK di Pasal 11. Kalau misalnya kerugian negaranya di atas 1 miliar atau menyangkut aparat penegak hukum atau penyelenggara negara itu yang kami teruskan. Tapi, kalau tidak memenuhi kriteria tersebut dan ada indikasi korupsi yang cukup kuat, kami teruskan ke aparat penegak hukum setempat, kalau laporan itu berasal dari daerah atau kepolisian atau ke kejaksaan.

*Nah*, itu tindak lanjut di kepolisian atau kejaksaan itu kami monitoring, kami supervisi tindak lanjutnya lewat Kedeputusan Korsup. Begitu mekanisme kami, Bapak-Ibu sekalian, dalam menyikapi laporan atau pengaduan masyarakat.

Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, KPK juga bekerja sama membangun *whistle blower system*. Jadi, sampai dengan tahun 2022 itu ada 53 *whistle blower system* yang kami bangun bersama kementerian/lembaga, Pemda, maupun BUMN. Kementerian/lembaga itu ada 21, pemerintah daerah provinsi ini ada 9, BUMN ada 21, dan BUMD-nya ada 2 yang membangun *whistle blower system* dengan KPK.

Harapannya, Bapak-Ibu sekalian, masyarakat yang ingin melaporkan terjadinya kecurangan atau apapun tidak harus ke KPK, tetapi bisa juga lewat *whistle blower* yang dibangun di setiap lembaga atau BUMN tersebut. Dan, informasi itu bisa kami dapatkan karena sudah apa terintegrasi dengan kami di KPK.

Terkait kerjasama internasional tahun 2022, di mana Indonesia waktu itu menjadi Presidential G20 ya, KPK juga terlibat aktif dalam menyelenggarakan anticorruption working group G20 yang menghasilkan beberapa rekomendasi bersama bagi negara G20, yaitu penguatan audit dalam pemberantasan korupsi, kemudian partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi, kerangka pengaturan dan pengawasan bagi profesi di bidang hukum, dan pemberantasan korupsi di sektor energi terbarukan. Ini beberapa konsensus yang berhasil disepakati dalam kegiatan anticorruption working group untuk G20 tahun 2022.

Selain itu juga, lewat Direktorat PJKG, KPK juga bekerja sama dengan lembaga sejenis di beberapa negara, termasuk di dalamnya menyangkut penanganan perkara korupsi. Seperti ada permintaan dari otoritas di Kanada atau Inggris untuk mengusut suap yang dilakukan salah satu perusahaan pembuat pesawat baru, Bapak-Ibu sekalian, yang salah satunya ya melibatkan Garuda Indonesia ya.

Jadi, mereka meminta dokumen-dokumen, data-data apa yang sudah dimiliki KPK untuk mendukung investigasi yang dilakukan oleh lembaga di



negara pembuat pesawat tersebut. Itu kami *sharing* informasi dan juga termasuk pencarian orang-orang yang selama ini... apa... kami duga berada di luar negeri. Pak. ya. Sudah kita tetapkan tersangka, tetapi orang tersebut keberadaannya kami duga di luar negeri dan kami itu lakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga sejenis di negara di mana kami duga orang itu saat ini menetap.

*Nah*, KPK juga menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan konferensi ya di tingkat internasional dalam rangka kerjasama APEC misalnya atau Indo-Pacific. *Nah*, itu kita juga mengirimkan delegasi. Tentu saja masih ada kaitannya dengan kegiatan pemberantasan korupsi.

Terkait dengan kinerja di Kedeputan INDA, ini, ada ukuran kinerjanya, yaitu menyangkut penguatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Sebagaimana Bapak-Ibu ketahui bahwa Presiden sudah merencanakan untuk mempercepat penerapan SPBE tersebut. Dan, berdasarkan penilaian dari Menpan RB, SPBE KPK itu dinilai 3,81 dari skala 1 sampai 5 atau dengan predikat sangat baik. Ini di atas rata-rata nasional yang hanya 2,31 dan capaian Kedeputan INDA tahun 2022 ini juga melampaui target yang ditetapkan, yaitu 3,7.

### **Bapak-Ibu sekalian,**

Adapun untuk tahun 2023 ini Kedeputan INDA mendapatkan alokasi anggaran sebesar 192,6 miliar dari jumlah pegawai 282. Kelihatannya sangat besar, Bapak-Ibu sekalian, tapi sebagian besar dari anggaran ini digunakan untuk penguatan sistem informasi ya. Jadi, belanja alat-alat teknologi informasi yang harganya memang sangat-sangat mahal. Ini tujuannya, Bapak-Ibu sekalian, supaya ke depan, harapan kami itu, investigasi itu bisa dilakukan di belakang meja.

Kalau seluruh data itu sudah terintegrasi, itu... investigasi itu bisa kami lakukan atau informasi-informasi terkait kecurangan dan lain sebagainya itu bisa kami telaah lewat sistem. Itu harapan kami, Bapak-Ibu sekalian.

Oleh karena itu, kami terus mengembangkan untuk meningkatkan kapasitas teknologi informasi di KPK. *Nah*, indikator kinerjanya masih terkait dengan maturitas SPIP ini, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan juga peningkatan indeks SPBE.

Demikian saya kira, Bapak-Ibu sekalian, yang bisa saya sampaikan terkait dengan capaian kinerja di Kedeputan Informasi dan Data. Terima kasih.

### **KETUA KPK RI:**

Terima kasih kepada Pak Wakil Ketua, Pak Alexander Marwata.

Sekadar informasi tambahan, Pak Ketua Komisi III dan Wakil Ketua, dan segenap Anggota Komisi III, serta rakyat Indonesia di manapun berada,

KPK saat ini memiliki laboratorium barang bukti elektronik yang sudah mendapatkan sertifikasi ISO 27025 tahun 2022 dan saya kira ini laboratorium barang bukti elektronik ini bisa dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum, baik peradilan, kejaksaan maupun polri. Jadi, apabila membutuhkan terkait dengan pengelolaan barang bukti elektronik, KPK menyiapkan diri.

Saya kira itu dari Kedeputian INDA.

Selanjutnya, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi yang dibidangi oleh Pak Nawu Pomolango.

Dipersilakan, Pak.

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI DAN SUPERVISI KPK RI (NAMAWI POMOLANGO):**

Terima kasih.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi III dan seluruh Anggota ya,**

Kami membidangi Kedeputian Koordinasi dan Supervisi. Nama kami Namawi Pomolango. Mohon maaf, Pak Ketua, kadang-kadang saya agak sedih, sulit juga menyebut nama saya ini. Jadi, kalau keliru-keliru sedikit *enggak* apa-apalah disebut Pak. Nawawi Pomolango, begitu.

Kedeputian Koordinasi dan Supervisi ini merupakan kedeputian baru sebenarnya, lahir dari Perkum 7/2020. Ini membawahi tugas tersebut dalam Pasal 6 huruf b dan huruf d, yaitu koordinasi dengan instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi dan koordinasi dengan instansi yang melaksanakan pelayanan publik, serta tugas pada Pasal 6 huruf d, yaitu supervisi terhadap instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi.

Kedeputian koordinasi dan supervisi ini membawahi lima direktorat wilayah, Pak, di seluruh Indonesia, ada lima direktorat wilayah. Fokus kerja kita ada di daerah. Untuk itu, pada tahun kemarin adalah soal peningkatan tata kelola pemerintah daerah, kemudian ada peningkatan efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi, dan optimalisasi pengelolaan keuangan negara. Untuk lebih detailnya barangkali, Pak Ketua, mohon diizinkan kami untuk menyerahkan kepada Deputi Koordinasi Supervisi sekaligus memberi kesempatan pada Pak Deputi Koordinasi untuk memperkenalkan diri dalam forum ini.

Terima kasih.

Silakan, Pak Irjenpol Didi Agung Wijanarko.

**KETUA KPK RI:**

Silakan, Pak Deputi Korsum.

## **DEPUTI KOORDINASI DAN SUPERVISI KPK RI:**

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang kami hormati Pimpinan serta Anggota Komisi III DPRD, eh, DPR RI, Bapak-Ibu sekalian,**

Kami mohon izin. Saya Didi Agung Wijanarko, Deputi Koordinasi dan Supervisi.

Tadi seperti yang disampaikan Bapak Pomolango, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi sebetulnya relatif masih baru, Bapak, baru beroperasi sejak 3 Januari 2021. Tugas kami, sama seperti yang disampaikan Bapak Pomolango adalah koordinasi dan supervisi, seperti nama Kedeputian kami.

Koordinasi sendiri seperti diatur di dalam Pasal 6 huruf , yaitu untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Jadi, untuk pemberantasan, yaitu dengan kejaksaan dan kepolisian, dengan mulai dari Kejaksaan Agung sampai kepada kejaksaan negeri dengan jumlah sekitar 500... 496, kemudian jajaran kepolisian, yaitu mulai dari Mabes sampai kepada ke tingkat Polres sejumlah 500... 498 kesatuan. Itu *stakeholder* kami. Kemudian, dengan pemerintah daerah sejumlah 542, mulai dari provinsi, kabupaten dan kota itu *stakeholder* kami.

Di dalam pelaksanaan koordinasi, kami lebih rinci diatur di dalam Pasal 8, yaitu pertama untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, kemudian membuat sistem. Kami saat ini punya dua sistem yang terkait dengan aparat penegak hukum, yaitu e-SPDB dan dengan instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu dengan MCP.

Kemudian, yang ketiga, tugas yang ketiga, yaitu meminta informasi terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu meminta kepada kejaksaan maupun kepolisian. Yang keempat, melaksanakan rapat dengar pendapat dan yang kelima, meminta laporan. Jadi, kami meminta laporan kepada instansi yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan publik untuk melaporkan langkah-langkah pencegahan mereka. Jadi, dari yang kami sampaikan, kami membuat sistem yang namanya MCP (Monitoring Center Corrupt Prevention). Di situ kami meminta seluruh pemerintah daerah melaporkan langkah-langkah yang sudah dilakukan terkait dengan pencegahan.

*Nah*, yang dilaporkan itu adalah kami me... me... menyebutnya dengan delapan area intervensi, yaitu delapan titik-titik yang merupakan titik rawan terjadinya korupsi. Di delapan area ini, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, kemudian pengadaan barang dan jasa, pelayanan... pelayanan, kemudian peningkatan kapabilitas APIP, manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset.

Dari delapan area ini, seluruh pemerintah daerah melaporkan langkah-langkahnya. Di dalam MCP ada delapan area, kemudian 28 indikator, dan 88 subindikator. Itulah yang harus dilaporkan oleh pemerintah daerah.

Melaporkannya dengan meng-*upload* administratif yang terkait dengan 88 subindikator ke dalam sistem kami. *Nah*, dari sistem itulah nantinya kami bisa melihat apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah dalam rangka pencegahan tersebut.

*Nah*, hal itu sebetulnya dalam rangka untuk peningkatan tata kelola pemerintahan daerah. Di dalam MCP sendiri, kami setiap tahun meningkatkan target, target capaian. Untuk tahun 2022 ini target capaian kami 72%. Namun, untuk saat ini sudah mencapai 76% untuk tahun 2022, 2023 kami rencanakan 76% untuk capaian MCP.

Kemudian, dari pelaksanaan ini, kemudian lanjut kepada... terkait dengan supervisi. Jadi, supervisi ini adalah kewenangan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan supervisi terhadap perkara-perkara yang ditangani oleh APH. Jadi, perkara-perkara tersebut, apabila menurut penilaian atau kriteria kami perkara tersebut tidak berjalan dengan optimal maka kami akan mengajukan kepada Pimpinan untuk ditetapkan sebagai perkara yang disupervisi.

Untuk tahapannya diatur di dalam Perpres 102. Ini adalah pelaksanaan dari perintah Undang-Undang 19 Tahun 2019. Jadi, tahapan-tahapan itu tetap kami ikuti dan untuk saat ini, di tahun 2022 ini, sejumlah 88 perkara yang kami lakukan supervisi, dengan capaian sebanyak 39 perkara yang sudah selesai dan 49 perkara yang masih dalam proses.

Empat puluh sembilan ini masih juga ada empat perkara yang dalam proses, ini sebagian karena untuk penghitungan, ini adalah perhitungan perkara. Sementara, di dalam perkara itu ada berkas-berkas. Jadi, seperti 49 ini ada empat... empat perkara yang sebetulnya sebagian sudah selesai, sebagian masih dalam proses sehingga kami masih hitung dalam hitungan perkara yang masih dalam proses.

Kemudian, seperti yang kami sampaikan, terkait dengan MCP itu adalah kami juga lakukan monitoring ke wilayah. Kami sampaikan, Bapak, seperti yang disampaikan Bapak Pomolango, Indonesia kami bagi menjadi lima wilayah direktorat. Masing-masing direk... wilayah direktorat dipimpin oleh seorang direktur dan mempunyai 4 sampai 5 Satgas, 2 Satgas Pencegahan dan 2 Satgas Penindakan.

Satgas Pencegahan lebih kepada tata kelola pemerintahan, Satgas Penindakan lebih kepada bagaimana berkoordinasi dengan APH maupun supervisi terhadap perkara yang ditangani oleh APH. Jadi, itu yang kami lakukan di lapangan.

Kemudian, khusus untuk Satgas Pencegahan, kami sudah... tadi kami sampaikan untuk dalam tata kelola pemerintahan itu. Untuk tahun ini KPK telah berkontribusi dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara melalui penyelamatan dan penertiban aset pemerintah daerah. Untuk tahun 2022 kami telah bersama-sama dengan pemerintah daerah menyelamatkan dan menertibkan aset senilai 76,06 triliun, dengan rinciannya, piutang pajak tertagih sejumlah 7,89 triliun dan penyelamatan aset daerah yang berpotensi dikuasai oleh selain pemerintah sebanyak 68,17 triliun.

Kami laporkan, untuk piutang ini, di akhir tahun kami meminta seluruh pemerintah daerah, target piutang yang kemungkinan tidak tertagih. Jadi, di akhir tahun kami membuat hitungan seluruh Indonesia. Kemudian dari itu akan kita coba targetkan di tahun 2023, nantinya.

Berapa yang kita akan selamatkan, termasuk aset-aset, baik itu berkaitan dengan legalisasi aset, penertiban aset, dan penyerahan sarana umum, baik fasos maupun fasum yang biasanya di pengembang itu masih belum diserahkan kepada pemerintah daerah, yang sebenarnya itu adalah aset pemerintah daerah. Karena kalau dibiarkan terus akan hilang oleh pengembang, akan diubah menjadi pemukiman.

Padahal, yang itu sebetulnya itu merupakan aset daerah. Jadi, kami dalam melaksanakan kegiatan ini lebih kepada bagaimana mengkoordinasikan, men-*trigger* untuk mereka mencapai target-target yang sudah ditentukan di akhir tahun untuk nanti di tahun 2023 ini kita akan laksanakan bersama-sama.

Kemudian, rencana kinerja di tahun 2023 untuk program prioritas kami, yang pertama, sama, yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan daerah. Kemudian, peningkatan tata kelola sektor tematik. Jadi, dari masing-masing direktur, direktorat itu yang mereka lebih memahami di sektor mana yang perlu kami untuk lebih *trigger*-kan.

Jadi, masing-masing daerah, masing-masing direktorat mempunyai program tematik yang berbeda-beda. Misalnya, di daerah Indonesia Timur, banyak ingin meningkatkan pendapatan dari MBLB. Jadi, itu kami dari Satgas-Satgas akan men-*trigger* untuk memberikan pemasukan kepada pemerintah daerah melalui program terkait tematik, yaitu MBLB tersebut. Jadi, masing-masing daerah, masing-masing direktorat mempunyai tematik yang berbeda-beda.

Kemudian, peningkatan efektivitas supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi. Kami terus ber... berbenah untuk perbaikan bagaimana kami melakukan tahapan-tahapan langkah. Ini masih terus kami berbenah. Seperti kami sampaikan, kami adalah Kedeputusan yang baru, yang masih berusaha untuk lebih sempurna.

Kemudian, indikator kinerja, yaitu skor penilaian integritas pemerintah daerah dan efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh APH, Dan, kami sampaikan, untuk sumber daya personil kami saat ini 108 pegawai.

Yang ini harus melingkupi seluruh wilayah Indonesia yang terbagi menjadi lima direktorat. Kemudian, jumlah anggaran sejumlah 28,5 miliar.

Kemudian, strategi kami dalam melaksanakan program Deputi Kedeputusan Koordinasi dan Supervisi berkolaborasi dengan mitra-mitra kami, baik internal maupun eksternal, seperti kami sampaikan, APH, yaitu dengan kejaksaan dan kepolisian, kemudian BPKP, BPK, BPN, LKPP.

Kemudian, kami laporkan juga untuk tahun 2021 kami memulai untuk pengelolaan MCP, tidak hanya oleh direktorat Kedeputusan Koordinasi dan Supervisi, kami sudah merintis untuk bersama-sama mengelola MCP dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP. Kami terus berbenah.

Di tahun 2023 ini sudah kami juga lakukan evaluasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk indikator yang tadi kami sampaikan 8 areal, 30... eh. 28 indikator, dan 88 subindikator. ini kami lakukan perubahan terkait dengan hasil evaluasi menjadi delapan area. Kemudian, 20... 30 indikator dan 67 subindikator. Ini kami sesuaikan dengan perkembangan dari hasil evaluasi tersebut.

Demikian kami laporkan dari Kedeputusan Koordinasi dan Supervisi. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

#### **KETUA KPK RI:**

Terima kasih kepada Deputi Koordinasi dan Supervisi. Selanjutnya, kami sudah menyampaikan kinerja tahun 2022 KPK, termasuk juga Rencana Program Kerja KPK Tahun 2023. Selanjutnya, kami meminta masukan, sekaligus juga dalam rangka perbaikan KPK ke depan. Untuk itu, kami serahkan kepada Bapak Ketua Komisi III DPR RI beserta Wakil dan segenap Anggota. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):**

Terima kasih pada Pak Ketua KPK beserta seluruh jajaran. 1:40:50

#### **Rekan-rekan sekalian,**

Kita telah mendengarkan secara berurutan dari mulai Ketua KPK, dilanjutkan dengan kesekretariatan Pak Cahya Harera, kemudian kita dengarkan pendidikan dari Deputi Pendidikan, dari Mas Wawan Wardiana, berikutnya kita juga dengarkan dari Pak Gufron Nawawi, *nggeh*, mohon maaf.

Mohon maaf, copot dulu.

Pak Nurul Gufron yang berbicara tentang Kedeputusan Informasi dan Data. Berikutnya kita juga telah dengarkan dari Pak Johannes Tanak untuk Penindakan dan Eksekusi. Ini yang paling menakutkan, Pak, takut banget ini.

Kemudian, berikutnya, kita dengarkan dari Pak Alex Marwata juga sudah kita dengarkan tentang Pencegahan dan Monitoring dan yang ketujuh kita dengarkan dari yang Pak Nawawi Pomolango. Mudah-mudahan *enggak* salah. Dan, yang terakhir oleh Pak Brigjen Didi Agung Wijayanto di dalam mensupervisi agar perkara-perkara bisa berjalan, seperti itu.

Oh, jadi, ini saya dari sekretariat masih... masih bintang satu, Pak. Mohon maaf ya, Pak, menambah bintang 1 susah sekali. Apalagi kalau sudah bintang tiga ke bintang empat, ampun, suara Komisi III pun masih belum berlaku begitu.

Itu sudah kita dengarkan semua rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat. Sesuai dengan aturan main kita maka kita izinkan untuk yang mulai pertama kali bicara sesuai dengan kehadiran di sini. Yang hadir pertama kali di ruangan ini sesuai dengan absensi adalah Dr. Hinca IP. Pandjaitan XIII.

Dipersilakan, 08.45 WIB.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan Komisi III dan Wakil Pimpinan, juga para Anggota Komisi III yang sangat saya hormati, Pak Firli, Ketua KPK, dan Pimpinan, serta pejabat utama KPK yang hadir yang sangat saya hormati,**

Pertama-tama saya harus mengucapkan terima kasih karena memang laporan yang disampaikan sejak kemarin telah kami terima sehingga kami boleh membacanya sejak kemarin, malam, dan sampai pagi ini. Ditambah lagi data tambahan dan kemudian penjelasan yang sangat komprehensif tentang KPK 2022 yang lalu dan 2023 yang sekarang akan dilakukan.

Kami mencoba memahaminya dan saya ingin fokus pada dua hal saja dan saya tetap konsisten dan berterima kasih karena soal sektor-sektor divisi monitoring ini atau divisi Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring, satu dari antara lima ini menjadi concern saya. Yang tadi juga diulangi oleh Pak Firli Pasal 6 huruf c itu.

Poin saya adalah saya kira soal korupsi yang sekarang digagas banyak kepada soal pengeluaran. Saya ingin 2023 ini pindah ke sektor pendapatan, penerimaan, sehingga saya berharap bisa kita cegah sejak sedini mungkin.

Oleh karena itu, pandangan saya, terutama dengan hasil yang disampaikan 3 Januari yang lalu kepada publik, kajian monitoring tentang layanan pertanahan. Ini mengejutkan dan mengagetkan kita semua, sekaligus saya mengapresiasinya karena telah menjawab pertanyaan saya jauh-jauh

hari tentang HGU-HGU yang luar biasa banyaknya dan menjadi persoalan kita dan datanya sudah dibuka, meskipun baru wilayah Riau dan Kalimantan Tengah, belum pada provinsi-provinsi lainnya.

*Nah*, dari hasil ini terbukalah persoalan ini menjadi sangat serius dan dari situ saya berpandangan, Pimpinan KPK, apabila lima deputi ini, khususnya Deputi Pencegahan dan Monitoring, saya ingin mengusulkan dan pandangan saya bahwa divisi atau Deputi Monitoring ini dibuat mandiri. Dilepas dipisah dari Deputi Pencegahan.

Alasan saya, alasan saya adalah sebagai berikut. Tadi sudah disampaikan Pak Firli dan saya kira pas betul ini, yaitu bahwa monitoring itu wajib. Kemudian, kepada siapa? Penyelenggara negara. Kita kaji, kita teliti, ke luar rekomendasi, monitor satu tahun. Bila tidak diikuti maka dilapor kepada Presiden, DPR RI, dan BPK. Kalau ini ditarik ke Pasal 9, saya berharap ini menjadi permulaan penindakan jikalau tidak dipenuhi, begitu, sehingga rekomendasi ini mempunyai daya ikat yang kuat.

Untuk apa? Agar bisa kita menysasar embrio korupsi yang ada, yang barangkali sengaja disusupkan pada regulasi program strategis pemerintah. Di sini dia kenanya paling depan. Sehingga menurut saya, saat ini model korupsi telah berkembang menjadi korupsi pada kebijakan publik melalui materi-materi yang sengaja disusupkan pada regulasi satu program. Hal mana *enggak* mungkin kita lakukan di sektor penindakan karena asas legalitas.

*Nah*, kalau begitu, bagi saya monitoring ini menjadi gerbang utama terdepan untuk mencegah. *Nah*, dan jika dibandingkan dengan anggaran yang disiapkan oleh KPK di lima deputi ini, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring termasuk yang terkecil dan jikalau di antara yang terkecil di Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, monitoring termasuk yang terbesar, 34 miliar dari 55 koma sekian miliar.

Jadi, saya melihat KPK arahnya agak ke sana ini dan saya setuju. Contoh yang paling pas adalah tentang pertahanan yang HGU ini, yang menurut pendapat saya cara membongkar penyelenggara negara ini yang memang sangat ego sektoral, hasil temuan ini yang saya bacakan, saya baca betul, ialah BPN-nya punya ego sektoral, Lingkungan Hidupnya dan Kehutanan punya ego sektoral, *enggak* mau dia didudukkan. Jika peta HGU ini ditimpahkan, gawat ini negara.

Dan apa yang terjadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, telah ditetapkan subjek-subjek hukum yang masuk pada kategori sanksi administratif untuk keterlanjuran yang sudah terjadi itu. *Nah*, oleh karena itu, KPK dan melalui Pimpinan saya mengusulkan agar Divisi Monitoring ini menjadi deputi tersendiri ke depan dan menjadi andalan kita, andalan kita mencegah ini pada penyelenggaraan negara, yang tadi saya sebut menysasar embrio sebelum dia menjadi korupsi.



*Nah*, yang kedua, ini menarik karena, sekaligus pertanyaan saya, pada sektor HGU perkebunan ini, seingat saya, yaitu pada sisi pembuktian korupsinya. Yang sering kita dengar dan kita pakai adalah korupsi kerugian negara, masih ada satu lagi kerugian perekonomian negara.

Seingat saya ya, KPK pernah mencoba pendekatan kerugian perekonomian negara pada kasus Gubernur Sultra. Seingat saya gagal, seingat saya gagal pembuktiannya. Lalu, kemudian, kami mengikuti, memang tidak di KPK, tapi di Kejaksaan Agung, kasus minyak goreng yang lima orang itu mencoba dengan pendekatan kerugian perekonomian negara, juga kemarin divonis oleh hakim gagal total.

Lalu, kemudian, dicoba lagi dan kemarin tuntutan JPU kepada Surya Darmadi di PT Duta Palma dengan lima, empat atau lima perusahaannya itu, tuntutan luar biasa, 73,9 triliun dan dituntut seumur hidup. Tadi yang minyak goreng dihembus-hembuskan ini pakai pidana mati karena merugikan perekonomian negara dan seterusnya.

*Nah*, pertanyaannya adalah putusan MK juga mengatakan bahwa harus betul-betul kerugian nyata, harus betul-betul yang bisa dihitung, tidak hanya perkiraan dan tidak hanya *potensial loss*.

Pertanyaan saya kepada KPK adalah apakah setelah kasus Gubernur Sultra waktu itu, berkeinginan untuk mengembangkan penindakan ini di sektor atau pendekatan kerugian perekonomian negara yang masih menurut saya masih memang harus PR kita terbesar. Sementara, kalau itu ke perekonomian negara yang dihitung, besar sekali angkanya.

Bagaimana pendapat KPK tentang kajian kita di sektor pendekatan kerugian perekonomian negara. Karena sekali lagi, kalau tidak, ini penegakan korupsi kita jadi ugal-ugalan yang dilakukan oleh... dengan ancaman-ancaman, tapi kemudian kalah, begitu. Jadi, kita sedih juga. Gagap kita mendengarkan akan pidana mati, *enggak* usahkan triliun, puluhan triliun, ratusan triliun, ketika diputus, nol dia. Sedih kita semua. Ini PR kita semua.

Bagaimana pandangan KPK tentang ini, apakah masih akan meneruskan atau sedang mengkaji. Lalu, bagaimana PR kita agar soal kerugian... potensi kerugian keuangan, perekonomian negara terjadi.

Terakhir, dengan kaitan penjelasan saya tadi, saya ingin mengajak KPK untuk membentuk tim monitoring di sektor perpajakan, di sektor perkepabeanan, dan di sektor cukai. Ini penting sekali karena menyangkut penerimaan target-target pajak, target bea cukai, target kepabeanan yang dalam hitungannya selalu pakai target. Pertanyaannya, kalau targetnya tercapai, biar bisa luar biasa nanti, *enggak* ada yang mengontrol di situ.

Mengapa di sektor ini penyidik mereka, tunggal semua, *enggak* ada yang bisa masuk. OJK misalnya, pasar modal, kasus Jiwasraya, kasus Asabri, kasus Bumiputera juga adalah bagian yang *enggak* bisa kita kontrol karena mereka sendiri. Begitu juga pajak, begitu juga bea cukai, dan seterusnya.

Karena itu, Pimpinan, lewat raker kita ini saya meminta KPK membentuk tim monitoring di sektor ini, sehingga dengan demikian penerimaan negara yang seharusnya bisa besar sekali, bisa sejak awal kita sasar dan embrio korupsi bisa kita cegah di situ.

Itu saja, Pimpinan. Saya ingin mengakhiri ini dengan menyampaikan terima kasih dan *respect* kepada KPK yang memberikan laporannya yang sangat komprehensif, terutama tentang hasil kajian monitoring untuk HGU di sektor pertanahan. Saya mengapresiasi untuk yang itu.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):**

Terima kasih, Pak Dr. Hinca.

Ini saya sampaikan kepada Pak Ketua KPK beserta seluruh jajarannya. Intermezzo saja bahwa DPR ini sudah memasuki masa mau kampanye dan karena kemajuan teknologi maka nanti banyak yang akan ngomong banyak. Setelah itu di-*tik tok*-in, di-*youtube*-in dikirim ke dapilnya, Pak, bahwa saya sudah bicara dengan Pak KPK ini, lihat! supaya kulindungi Kau, begitu, langsung laris. Ini intermezzo-nya, Pak. Ini... jadi, mohon maaf, kawan-kawan dari KPK, ini kadang-kadang kalau ada yang seperti ini ada dipahami. Ini kebutuhan untuk kembali ke Senayan menjadi kebutuhan utama hari ini.

Saya persilakan berikut Haji Arsul Sani. Siap-siap Pak Taufik Basari. Pak H. Arsul Sani hadir jam 09.24. Kami persilakan.

**F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):**

Terima kasih, Pak Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang,  
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang terhormat Pak Ketua KPK, para Wakil Ketua, para Deputi, Pak Sekjen, dan seluruh jajaran pejabat utama KPK yang hadir pada rapat hari ini,**  
**Yang terhormat Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi III, baik yang hadir secara luring maupun yang hadir secara daring,**

Pertama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi juga atas penyajian laporan yang tadi secara bergantian telah dipresentasikan oleh Pimpinan KPK dan para pejabat utama terkait dengan kinerja tahun 2022.

Ada satu hal yang ingin saya sampaikan dan saya angkat pada kesempatan rapat pada siang hari ini. Tadi disebut oleh Pak Ketua KPK, di satu sisi kita bersyukur kalau melihat bahwa indeks perilaku antikorupsi kita,

IPAK, dari tahun ke tahun ini naik. Disajikan selama tiga tahun terakhir, ada kenaikan, meskipun tentu masih di bawah target. Tapi, saya yakin dengan kenaikan ini nanti akan mendekati target yang dicapai.

Namun, di sisi lain, ada juga yang menyedihkan ya. Kita bersedih, kita kaget, sebagaimana Pak Deputy Pencegahan juga kaget ya, ketika kita mendapati pengumuman bahwa indeks persepsi korupsi kita tahun 2022 ini mengalami penurunan skor yang cukup tajam.

Pada tahun 2021 Indonesia memperoleh skor IPK 38 dan di tahun 2022 ini turun menjadi 34. Dari peringkat ke-96 pada tahun 2021 maka turun 14 peringkat menjadi peringkat 110 dari 180 negara di tahun 2022. *Nah*, begitu IPK ini turun ya, yang sering disalahkan ini APH, lembaga penegak hukum.

Ini yang saya kira kita harus sama-sama koreksi, harus sama-sama cerahkan juga publik kita. Bahwa turunnya indeks persepsi korupsi ini tidak semata-mata terkait karena, katakanlah kurangnya, lemahnya, atau belum komprehensifnya sisi-sisi penindakan dalam kasus korupsi.

*Nah*, mari kita lihat, dari delapan indeks yang dibuat dengan metode survei yang kemudian dipergunakan oleh transparansi internasional untuk mengukur indeks persepsi korupsi maka sesungguhnya tidak semuanya turun. Saya lihat ada tiga memang yang turun, yakni PRS International Country Risk Guide, IMD World Competitiveness Year Book, dan TERC Asian Risk Crime.

Tiga indeks ini turun angkanya, tetapi dua indeks naik. World Justice Project, Rule of Law Index, dan Varieties of Democracy Project. Ini yang naik dari 23 menjadi 24, dari 22 menjadi 24 juga. Memang yang turun 3 ini turun cukup tajam, pada PRS International Country Risk Guide dari 48 menjadi 35.

*Nah*, saya berharap ,Pak Ketua KPK, ini harus dijelaskan kepada publik ya, bahwa persoalan penurunan indeks persepsi korupsi itu juga terkait dengan perilaku ya, rumpun kekuasaan eksekutif secara keseluruhan, terutama yang di eksekutif. Rumpun kekuasaan penyelenggara negara secara keseluruhan, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, tapi terutama yang di eksekutif dan ini yang menyebabkan justru turun banyak.

Kalau kita bicara, misalnya ya, ini kan salah satu yang turunnya banyak adalah IMD World Competitiveness Year Book, dari 44 menjadi 39. Padahal, indeks ini bicara tentang efisiensi pemerintahan, bicara tentang efisiensi bisnis, bukan bicara tentang penegakan hukum ya. Ini saya lihat *extent to which government policies a conducive to competitiveness* malah turun ya, turun 9 peringkat, posisi Indonesia ada di 35 dari 66 negara. Padahal, sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja.

*Nah*, ini barangkali perlu sama-sama kita suarakan, termasuk oleh KPK juga kepada pemerintah bahwa di situ ada akar persoalan ya. *Extent to which enterprises atau forming in an innovative, proffitable, and responsible manner*

juga turun ya. Ada lagi satu yang menurut saya itu juga harus kita sampaikan kepada pemerintah.

Ini Pak Benny nanti yang harus menyampaikan ya.

Ya

Bukan.

Ya, nanti saya terjemahkan, begitu ya.

Ini Pak Benny ini yang harus menyampaikan.

Ini saya baca di PRC Asia Risk Guide yang skornya turun dari 32 menjadi 29.

Ini dibilang, Pak Benny. Saya bacakan dulu Bahasa Inggrisnya, *leaders use the crisis as an opportunity to grind them self so briefing power that certifil libertys and could be used to stifle design, political opposition, Pak Benny, and whistleblower wanted to expose some of the corruption taking place.*

Jadi, para pemimpin pemerintahan ini ceritanya, Pak Benny, ya, misalnya ya. Ini saya kasih ini ya, input untuk Pak Benny ya, soalnya oposisi dia, begitu loh ya.

Jadi, ini dipergunakan. Ini harus kita pertanyakan, apakah, misalnya ucapan yang mengatakan jangan ada OTT-OTT lagi. Itu bagian dari ini jangan-jangan, itu loh, yang dinilai. Apalagi ketika diucapkan itu ketika memang penilaiannya itu masih berlangsung, penilaian untuk... apa... indeks itu.

*Nah*, jadi yang ingin saya sampaikan adalah kita juga harus adil bahwa jangan setiap IPAK turun, kemudian urusannya ini KPK-nya, Kejaksaan Agungnya, polisinya *enggak* kerja melakukan pemberantasan korupsi. Ini harus *fair* juga kita ya. *Nah*, padahal, persoalannya justru ada di luar... apa... penegak hukum itu tadi ya.

Kalau yang terkaitannya dengan penegak hukum, justru biasa saja. Saya baca, misalnya The Bertelsmann Stiftung's *Transformation Index* yang juga di sini dipergunakan. Ini posisinya masih 37, 37. Dia mengukurnya adalah dengan pertanyaan, "*To what extend*, sampai sejauh mana ya, *public office holder* ya, kira-kira pejabat pemerintahan, *who abuse their position prosecuted* atau *penalize*." Kira-kira Pak Firly dan teman-teman bekerja *enggak* terhadap pejabat yang begitu.

Ini, poin ini masih terskor 37, sama dengan tahun yang lalu. Kan, berarti kan, ya, paling *enggak* yang masih kerjalah. Kan, kayak begitu. *To what extent does the government successfully certain corruption.* *Nah*, ini juga masih sama di situ. Jadi, kita harus sampaikan juga ya, walaupun saya bagian dari... ya, koalisi pemerintahan, tapi ini persoalan indeks turunnya persepsi korupsi itu ada justru di... apa... lingkaran pemerintahan sekarang. Ini harus juga di... apa... sampaikan secara terbuka.

Saya kira itu saja. Kalau kepanjangan, nanti saya habis ini ditegur Pak Ketua Komisi, kurang enak. Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):**

Saya *enggak* pernah menegur, Pak, asal bisa mengukur masing-masinglah.

Berikut, Pak Taufik Basari.  
Siap-siap Mr. Supriansa.

**F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):**

Baik. Terima kasih, Pimpinan. 2:05:07

**Yang saya hormati Pak Ketua KPK Pak Firli, para Wakil Ketua para Pimpinan, dan seluruh pejabat di KPK,**

Saya menikmati betul tadi paparan yang disampaikan ya, yang diberikan secara lengkap dan komprehensif, dan menurut saya sangat penting ya, bagi publik juga untuk mengetahui paparan ini. Kenapa? Karena sering kali publik hanya mengetahui bahwa KPK hanya penindakan saja ya. Padahal, luas sekali memang kerja-kerja KPK yang menurut saya juga patut untuk kita pantau ya, untuk kita awasi juga dan kita nilai kinerjanya.

*Nah*, pada hari ini kita punya dua agenda ya. Yang pertama adalah agenda evaluasi terhadap kinerja 2022 dan kemudian agenda kinerja ke depan tahun 2023. Tadi Ketua KPK sudah memaparkan ada dua indeks yang penting ya, indeks perilaku antikorupsi, kemudian survei penilaian integritas.

Di mana indeks perilaku anti korupsi ini naik ya, dari 3,90 menjadi 3,97, yang menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat kita sudah semakin punya rasa antikorupsi yang meningkat ya. Kemudian, permisif terhadap korupsi menurun ya. Artinya, ini di sisi masyarakatnya ya, ada kesadaran yang tinggi terhadap upaya kita untuk menjadi insan yang antikorupsi.

*Nah*, tadi juga disampaikan indeks... indeks perilaku integritas ya, indeks penilaian integritas. Di mana tadi angkanya disebutkan ada penurunan ya, dari 72,4 menjadi 71,9. Menurut saya, ini penting ya, paparan ini menjadi penting terkait dengan penurunan ini. Kenapa? Karena, ini kan tadi sudah disampaikan, saya menyambung sedikit oleh yang tadi sampai Pak Arsul, bahwa semestinya kalau di atas kertas ya, hitung-hitungannya mestinya meningkat.

Karena apa? Karena kita sudah ada upaya-upaya perbaikan sistem, ya sistem administrasi, penyederhanaan administrasi, penyederhanaan perizinan, digitalisasi. Kan, selama ini yang kita diskusikan dalam ruang-ruang rapat kita bahwa dalam rangka pencegahan maka kita lakukan hal-hal seperti itu: digitalisasi, penyederhanaan, debirokratisasi, tapi yang menjadi pertanyaan kenapa kemudian malah menurun?

*Nah*, menurut saya, karena kita bicara soal agenda kinerja 2023 ke depan, ini penting sekali untuk menjadi perhatian ya. Jangan sampai kemudian fasilitasnya tersedia, tapi malah di tahun 2023 malah menurun. Ini tantangan besar sekali ini menurut saya, bagi kita semua. Ini kita semua. Saya kasih garis bawah, kita semua.

Kenapa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Arsul bahwa betul, ada tugas KPK untuk melakukan pengawasan, monitoring, dan sebagainya, tadi pencegahan dan seterusnya, tapi yang paling penting kan harus ada *feedback*-nya. Harus ada koordinasi, harus ada kooperatif juga dari pihak yang berkoordinasi dengan KPK.

*Nah*, pertanyaannya, mungkin bisa dijelaskan nanti, dalam selama 2022 ini apakah ada hambatan-hambatan ya, terkait dengan pelaksanaan tugas ini dari kementerian atau lembaga terkait yang memang tidak mau kooperatif. Apa yang menjadi kendala ya, atau... atau apakah itu permasalahannya atau ada permasalahan-permasalahan lain yang kemudian membuat indeks ini menjadi turun. *Nah*, itu yang pertama.

Yang kedua, sama tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arsul, soal indeks persepsi korupsi ya, di mana ada indikator-indikatornya ya, semua jelas, yang memang ada *problem*. Bukan hanya soal penegakan hukum saja, tapi juga soal yang sama dengan dua indeks tadi, yang disebutkan pertama.

Bahwa terkait dengan bagaimana kinerja pemerintahan ya, dalam rangka upaya kita untuk melakukan pencegahan korupsi. Tapi, di sisi lain yang paling penting dari itu semua, saya mau melengkapi saja apa yang disampaikan oleh Pak Arsul, yang namanya indeks persepsi korupsi ini akan sangat berkaitan dengan persepsi publik, kepercayaan publik, pandangan publik terhadap penyelenggaraan negara ini. *Nah*, oleh karena itu, maka karena kita bicara soal persepsi maka komunikasi menjadi penting.

Tadi pesannya tepat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Arsul, komunikasi untuk menjelaskan kepada publik bahwa indeks persepsi korupsi ini turun karena berbagai faktor. Berbagai faktor ini menjadi PR-nya siapa saja. Karena itu, harus ditagih satu-satu *nih*, penyebab-penyebab kenapa angka ini menjadi turun.

Salah satunya, mungkin KPK juga ada bagian dari situ, tapi ada bagian-bagian lain yang harus ditagih bersama-sama. *Nah*, ini menurut saya penting bagi kita, supaya kita tidak lagi kemudian di tahun depan, 2023, indeks persepsi korupsinya masih menurun, karena itu tadi, kepercayaan publiknya belum tumbuh. Kepercayaan publik itu butuh komunikasi. Komunikasi itu menjadi penting.

Yang berikutnya, terkait dengan ini, tapi soal penindakan ya. Tadi Pak Wawan sudah jelaskan bahwa salah satu fokus kerja dari KPK selama 2022 ini adalah di sektor pendidikan ya, termasuk juga dunia pendidikan.

Tadi Pak Ketua kita sudah bicara juga soal Dapil. Kebetulan di Dapil saya ini ada kasus yang sangat ironis. Di mana dunia pendidikan, saya di Lampung, di Lampung, di dunia pendidikan justru di situ terjadi kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani oleh KPK. Luar biasa. Saya... saya sebagai orang yang berasal dari Lampung syok sekali ya.

Dunia pendidikan terjangkiti korupsi dan kemudian menyebar ke mana-mana, melibatkan berbagai pihak, melibatkan kepala-kepala daerah dan seterusnya. *Nah*, ini tantangan sekali lagi ,tantangan terbesar kita ini di 2023 ya. Yang tadinya justru menjadi target sasaran kita untuk menjadi embrio dari agen antikorupsi, justru di situlah yang terjadi korupsi.

*Nah*, jadi, oleh karena itu, saya berharap betul ya, Pak Wawan dan seluruh jajaran kita fokus juga di dunia pendidikan ini. Jangan sampai terulang lagi. Saya tidak... tidak... sangat tidak berharap akan ada lagi kasus-kasus yang serupa seperti yang terjadi di Lampung, di mana justru di dunia pendidikan di situlah terjadi praktik korupsi yang sangat luar biasa. Dan, mudah-mudahan proses penegakan hukum yang terjadi di kasus ini juga bisa dijalankan dengan baik oleh KPK.

Demikian, Pimpinan, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):**

Ya. Jadi, Pak Taufik Basari, Pak Tobas ini jadi tidak berani mengaku Anggota DPR RI Komisi III, Pak, karena tiba-tiba di sana ada pendidikan yang ditangkap takutnya ... jadi malu dia.

Pak Supriansa hadir Jam 09.33 WIB. Siap-siap berikutnya Mas Heri Widodo.

**F-P. GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi III dan Bapak-Ibu Anggota Komisi III, Yang saya hormati Pak Ketua KPK, Pimpinan KPK dan seluruh jajaran yang sama-sama saya banggakan,**

Saya langsung, Pak Ketua, bahwa saya tertarik tadi itu, dalam penjelasan Pak Ketua KPK menyampaikan bahwa KPK bekerja sesuai dengan tujuan negara. Ini yang saya garis bawahi dan sangat penting sekali. Kalau kita melihat tujuan negara yang ada, sesuai dengan Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 maka di situ kita menemukan kalimat "bahwa melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial".

Dari kalimat ini, dipertegas dari penjelasan Pimpinan KPK beserta dengan seluruh jajarannya dari kiri ke kanan, sangat menyentuh sekali pembahasan kita pada hari ini dan inilah yang kita memang tunggu-tunggu. Kenapa kita tunggu, karena rakyat di luar tentu menyaksikan bahwa ternyata pekerjaan Pimpinan KPK dan seluruh jajarannya bukan hanya sekedar menangkap dan mentersangkakan orang, tetapi ada juga bahagian daripada itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan kepada, mulai dari desa tadi sampai ke atas, supaya orang menghindari yang namanya korupsi. Ini sangat bagus sekali, Pak Ketua.

Dalam penjelasan tadi disampaikan bahwa seandainya tidak ada praktik-praktik korupsi maka Indonesia bisa dikategorikan masuk dalam lima... apa namanya... lima negara yang bisa menjadi bagian daripada kekuatan ekonomi dunia, seandainya tidak ada korupsi. Dan saya percaya betul itu. Kenapa? Karena Indonesia semakin luasnya ini, saking luasnya dari Sabang sampai Merauke kita bisa lihat kayanya kita dengan pegunungan-pegunungan.

Di dalam gunung itu ada tambang batu bara, ada nikel, ada emas, ada timah, ada ikan di laut, ada hutan yang banyak sekali nilainya, ada minyak sawit, dan lain sebagainya. Dan, ini semua tumbuh di atas negara kekuasaan kita, tetapi kenapa kita ini masih tergolong bahwa kita miskin? Karena terkonsentrasi kemungkinan bahwa semua kekuatan-kekuatan ekonomi itu hanya dinikmati oleh segelintir orang, orang-orang yang bisa mengurus izin, orang-orang yang bisa melakukan pendekatan dengan pemerintah tertentu, sehingga hanya dialah yang diberikan izin untuk mengelola semuanya itu.

Saya sangat bangga sekali dengan KPK. Dengan adanya porsi baru lagi ini menghadirkan tadi yang disampaikan oleh Mas Nurul Gufron, yaitu menyangkut masalah korupsi di sektor usaha. Saya yakin dan percaya mungkin ini, Pak Ketua, bisa masuk di dalamnya. Bagaimana korupsi di bidang pertambangan, nikel, batu bara, emas? Adakah di antara mereka dengan melakukan tindakan pendekatan kepada pemerintah tertentu?

*Nah*, sudah seberapa banyak ini pertanyaan kita. Seberapa banyak IUP-IUP yang bermasalah di republik ini yang bisa dijadikan sebagai dasar bahwa terjadi kolaborasi yang jahat antara pemerintah dengan pengusaha-pengusaha tertentu yang menggali perut bumi Indonesia ini tanpa memperdulikan masyarakat di sekitarnya. Masyarakat di sekitarnya miskin, se miskin-miskinnya, tetapi para penambang-penambang dia semakin kaya dan semakin memperlihatkan kekuatan ekonominya tanpa ada perasaan kasihan sama orang-orang di sekitar tambang ini. Ini... ini adalah salah satu yang menjadi perhatian kami.

Kemudian, membanggakan sekali bahwa KPK sudah masuk di sektor... di wilayah desa. *Nah*, saya kira karena keberhasilan dan kita sudah mendengarkan juga keberhasilan KPK melakukan pembinaan di tingkat bawah desa, kami berharap kami akan menunggu laporan selanjutnya, Pak Ketua KPK, semoga sudah ada lagi kabupaten yang dibina, tidak kabupaten



kota yang masuk dalam binaan KPK tidak terjangkau lagi untuk pelaksanaan korupsi.

Setelah itu, masuk lagi di tingkat provinsi karena ini juga banyak yang ditangkap, mulai bupati, walikota, gubernur ditangkap. Setelah itu meningkat lagi, Pak Ketua, meningkat lagi bagaimana pembinaan para pejabat-pejabat negara, terutama para menteri karena menteri juga banyak yang ditangkap. Setelah itu, masuk juga Anggota DPR-nya. Anggota DPR-nya banyak yang ditangkap juga. Semua dibina. Setelah dibina ini maka proses pencegahan sudah ada. Bukan berarti ukurannya KPK tidak berhasil kalau tidak ada lagi korupsi, tetapi menurut saya justru itulah berhasilnya KPK kalau tidak ada korupsi. Berarti, pencegahannya sudah jalan. Saya kira ini menjadi harapan kami.

Dan terakhir, Pak Ketua, adalah ada yang saya baca dari penyampaian temuan PPATK pada tahun 2022, yaitu ada kurang lebih 1.215 laporan transaksi yang mencurigakan dengan nilai 183,8 triliun rupiah. Saya kira, saya kira, apa yang disampaikan oleh PPATK ini supaya dia bisa baik temuannya ini, saya harapkan juga melalui kesempatan ini supaya mau melakukan koordinasi dengan KPK. Karena KPK merupakan sebuah lembaga yang sangat terpercaya di tengah-tengah masyarakat yang bisa mengejar semua yang disampaikan oleh PPATK ini.

Ada masuk dalam modusnya katanya menampung dana itu kepada valuta asing, masuk kepada pasar modal, masuk pada polis asuransi. Dan, saya kira, dari berbincang-bincang kita dengan Pak Firli, tentunya secara pribadi biasa Beliau sudah menyampaikan juga hal ini kepada kita di dalam di ruang Pimpinan.

Saya kira layak juga saya sampaikan saya ini, Pak Ketua, supaya dilihat juga orang di luar bahwa ada kepedulian kita sebagaimana yang disampaikan tadi Pak Ketua, Pak Bambang Pacul, sehingga masyarakat di daerah Sulawesi Selatan menyaksikan juga bahwa ada kepedulian kami terhadap diri-dirinya di sana.

Saya kira seperti itu, Pak Ketua, terima kasih. Saya kembalikan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):**

Terima kasih, Pak Supriansa.

Mas Heru Widodo dipersilakan. Siap-siap berikutnya Pak Komjen Nurdin.

Mohon izin, arus bawah saya, dipimpin Pak Pangeran dulu.

**(PERGANTIAN SEMENTARA KETUA RAPAT KEPADA PANGERAN  
CHAERUL SALEH/F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI III)**

**F-PKB (HERU WIDODO, S.Psi.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2:20:42*

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi III beserta seluruh Anggota Komisi III yang hadir,  
Yang saya hormati Pak Ketua KPK beserta seluruh Pimpinan dan pejabat utama pertama,**

Pertama tentu saya sangat berterima kasih sekali atas paparan yang sudah disampaikan oleh Pimpinan KPK beserta seluruh jajaran. Bahkan, tadi saya sampai mau kencing ke belakang saja tidak berani. Pak Ketua, karena takut ketinggalan. Ternyata, menarik sekali apa yang disampaikan tadi.

Yang selanjutnya, saya menarik kesimpulan bahwa apa yang tadi sudah disampaikan oleh para Pimpinan KPK, saya katakan bahwa wajah KPK hari ini memiliki dua sisi. Yang pertama, sisi yang menyeramkan bagi sebagian pejabat negara, bagi sebagian masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Tetapi, di sisi lain, KPK memiliki wajah yang sangat humanis, memiliki wajah yang... apa namanya... memberikan edukasi bagi sebagian masyarakat sehingga perilaku tindak kejahatan korupsi bisa dicegah dan ditangani.

Saya sempat berapa kali ketemu dengan Pak Wawan, kemudian Pak Nurul Gufron, dan pejabat yang lainnya ketika saya menghadiri, mewakili partai dalam hal... apa namanya... edukasi ya. edukasi tindak politik cerdas berintegritas. Ini menarik sekali.

Saya kira banyak kemudian edukasi-edukasi yang dilakukan oleh KPK, yang kemudian ini tidak terekspos secara besar-besaran. Saya katakan bahwa ketika tidak ada OTT maka bukan berarti KPK tidak bekerja. Justru ada sisi lain yang kemudian ini berhasil dilakukan oleh KPK. Apa itu? yaitu adalah bidang pencegahan.

*Nah*, kemudian mestinya ini yang harus diekspos secara besar-besaran, Pak Ketua, karena supaya masyarakat juga tahu bahwa KPK ini kerjanya bukan hanya melakukan OTT, KPK kerjanya bukan hanya kemudian... apa namanya... melakukan penindakan, tapi juga ada sisi lain yang kemudian di sana ada melakukan pencegahan.

*Nah*, kemudian dari beberapa laporan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, termasuk ada peningkatan soal... apa namanya... capaian PNBK yang kemudian naik begitu besar dari tahun sebelumnya. bahkan mungkin ini yang terbesar dari semenjak berdirinya KPK. Lalu. Kemudian. yang kedua, juga ada pengembalian aset negara yang saya kira ini juga besar sekali.

*Nah*, saya kira ini juga perlu kita apresiasi secara baik, saya kira, supaya nanti ke depannya juga KPK bukan hanya sekedar kemudian mampu... apa namanya... bisa melakukan penindakan tapi juga melakukan pencegahan. *Nah*, saya kira, ini yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua.

Sekali lagi, bahwa semangat kita bersama adalah sebetulnya sama bahwa kita sama-sama untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, bukan hanya sekedar kemudian... apa namanya... tindak... penindakan saya kira.

*Nah*, edukasi-edukasi ini yang kemudian dilakukan oleh jajaran... apa... Deputi KPK, Pimpinan KPK, baik itu melalui kampus lalu kemudian melalui politik cerdas integritas. Saya kira ini perlu dikerjakan dan ini yang mestinya harus diekspos secara besar-besaran supaya masyarakat luas tahu bahwa KPK ketika tidak melakukan OTT bukan berarti KPK tidak bekerja, tapi ada sisi lain yang kemudian ini berhasil dilakukan oleh KPK.

Itu saja, Pimpinan, terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (PANGERAN KHAIRUL SALEH/F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI III):**

Baik. Selanjutnya kami persilakan Pak Nurdin.  
Silakan, Pak Nurdin.

**F-PDIP (Drs. M. NURDIN, M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi III yang saya hormati,  
Mitra kerja kita dari KPK yang saya hormati,**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Perkenankan pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi pada KPK, khususnya dalam kaitan dengan penyerapan anggaran tahun 2022. Ternyata dengan angka 97% itu merupakan reaksi tertinggi sejak KPK berdiri. jadi, saya apresiasi.

Berikutnya, sudah banyak yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu, misalnya Pak Hinca ataupun Pak Supriansa. Ya, memang sasaran KPK tidak hanya pada penggunaan anggaran belanja negara, tapi juga lebih fokus juga kepada penerimaan anggaran pendapatan negara. Banyak tadi dari sektor pajak, sektor bea cukai atau mungkin dari hasil-hasil tambang yang tadi Pak Hinca katakan.

Berikutnya saya ingin menyoroti direktorat yang baru, di mana ada masalah *monitoring center for prevention*, pencegahan yang sangat penting mungkin, Irjen Didi yang membidangnya karena cukup banyak satuan kerja yang dimonitor. Jadi, mungkin tolong ini sistem *monitoring*-nya yang harus benar-benar efektif dan efisien.

Apakah kalau misal diperlukan peralatan untuk atau penggunaan peralatan yang perlu digunakan, supaya lebih efektif, itu juga bisa diajukan. Selain itu juga dalam kaitan dengan cara ataupun teknik dalam kaitan dengan monitor ini sehingga benar-benar bisa mencapai sasaran yang baik. itu supaya disiapkan sehingga benar-benar dalam tahun yang berjalan ini kita bisa lihat hasil yang diharapkan sesuai dengan dibentuknya satuan yang baru ini.

Saya kira itu dari saya, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Sudding.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Baik, terima kasih, Pimpinan.

**Bapak-Ibu Anggota Komisi III, Pak Ketua KPK, para Pimpinan, dan seluruh Deputi yang dan jajarannya yang saya hormati,**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

Tadi kita dan saya mencermati betul ya, paparan yang disampaikan oleh Pak Ketua dan seluruh Deputi yang hadir pada siang hari ini yang cukup komprehensif ya. Ada hal yang menarik bagi saya, tadi di awal disampaikan oleh Pak Hinca Pandjaitan terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Ada dua hal ya, baik terkait menyangkut masalah kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dan ada beberapa kasus yang ditangani oleh KPK, utamanya menyangkut masalah perekonomian negara dan beberapa melibatkan para terdakwa ya, diambil contoh tadi Gubernur Sultra.

Saya kira memang konsep penindakan yang dilakukan selama ini dengan premium... remedium ya, mengedepankan tentang penindakan, ini perlu dipikirkan ulang, Pak Ketua, agar para pelaku tindak pidana korupsi ini, itu berpikir ulang, Ketua. Konsepnya adalah ketika tadi disampaikan bahwa penindakan ini dalam rangka untuk ada efek jera, tapi ternyata juga bahwa pelaku-pelaku tindak pidana korupsi itu semakin jadi... apa... semakin... apa... semakin hari semakin tidak ada efek jera, efek yang ditimbulkan terkait menyangkut masalah penanganan tindak pidana korupsi. Sehingga, saya

melihat bahwa barangkali perlu ada suatu konsep baru yang perlu kita pikirkan.

Kita ambil contoh di beberapa negara, utamanya negara-negara yang menganut sistem *aanglo saxon*. Contoh negara tetangga kita, Singapura, yang juga ketika kita melihat indeks persepsi korupsinya cukup baik, bahkan sangat baik. Dalam pola penanganan tindak pidana korupsi di negara tetangga kita, bahkan di beberapa negara-negara, Swiss juga bisa saya lihat mereka juga begitu, dengan menggunakan satu konsep *Deferred Prosecution Agreement*. Sistem DPA, artinya, mereka-mereka yang diduga terkait dengan pelaku tindak pidana korupsi ini, itu betul-betul mengembalikan kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan yang mereka lakukan.

Konsep DPA ini memang sangat efektif menurut saya, *Deferred Prosecution Agreement*. Bahkan, di negara Swiss kerugian negara yang ditimbulkan bahkan dikali beberapa kali lipat, begitu, sehingga ada... apa... yang katakanlah bahwa efek jeranya itu betul-betul karena ini kan mereka para pelaku-pelaku ini itu takutnya untuk dimiskinkan. Artinya, ketika semua, tadi juga disinggung menyangkut masalah *recovery asset*, ada peningkatan. Oke-lah ada peningkatan di situ, tapi untuk mencegah, mencegah ada niat untuk melakukan perbuatan korupsi ini perlu betul-betul ada suatu *deterrent effect* yang ditimbulkan.

*Ultimum remedium* itu adalah suatu konsep pilihan alternatif, menurut saya, sehingga apa yang kita harapkan dari... apa namanya... dari pemberantasan tindak pidana korupsi ini itu betul-betul ada, ya, efektif ya, terkait menyangkut masalah kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi ini. Sehingga apa? sehingga persepsi korupsi kita juga itu bisa menyamai dengan beberapa negara-negara yang menganut dengan sistem DPA ini.

*Nah*, untuk itu, Pak Ketua, saya berharap bahwa konsep penanganan tindak pidana korupsi dengan mengedepankan premium remedium itu bisa dipikirkan ulang dan menjadi *ultimum remedium* sebagai pilihan alternatif di beberapa sektor. Contoh, misalnya yang disampaikan oleh Pak Hinca tadi. Sebenarnya di beberapa undang-undang sektoral, misalnya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Pajak, Perbankan, dan sebagainya itu sebenarnya sudah diatur. Diatur tentang proses mekanisme pengembalian kerugian negara ketika ada kejahatan yang ditimbulkan di situ.

Jangan lalu kemudian Undang-Undang 31/99 itu dijadikan *old and blanching* (**suara tidak jelas 02:33:07**) dijadikan undang-undang sapu jagat terhadap kejahatan-kejahatan yang sudah diatur di undang-undang sektoral. Bahkan, bahkan, menurut saya ya, mekanisme pengembalian kerugian negara di undang-undang sektoral itu, itu cukup... cukup efektif menurut saya. ketika itu diterapkan. begitu.

*Nah*, ini apa betul-betul di... apa... di institusi aparat penegak hukum itu terintegrasi ya, bagaimana merubah mindset agar penanganan tindak pidana korupsi ini agar di... ada satu *deterrent effect* yang bisa ditimbulkan

sehingga tidak ada keinginan dari para pelaku-pelaku yang untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi karena ada upaya untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan berkali-kali lipat dibanding dengan pemidanaan yang juga sampai saat ini tidak menimbulkan *deterrent effect* yang optimal. Ini barangkali perlu dipikirkan, Pak, ya.

Iya, tapi lebih takut dimiskinkan.

Jujur, Pak, saya ada beberapa anu dengan mereka-mereka yang terlibat dalam... apa... korupsi, itu lebih takut dimiskinkan, dirampas aset-asetnya, dan sebagainya ketimbang dengan dipidana. Orang korupsi triliunan, orang dipenjara hanya 3-4 tahun, setelah itu dapat remisi, ke luar, masih banyak aset-aset yang mereka miliki.

*Nah*, untuk itu, barangkali ada konsep baru yang perlu kita pikirkan agar itu me... apa... menimbulkan *deterrent effect* terkait menyangkut ada... apa... keinginan dari para pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Dan, undang-undang sektoral menurut saya, ya, administrasi *follow* itu betul-betul menjadi perhatian ya, administrasi *follow* betul-betul menjadi perhatian terkait menyangkut ada... apa... kerugian-kerugian yang ditimbulkan di beberapa undang-undang sektoral, seperti yang disampaikan oleh Pak Hinca Pandjaitan tadi. Ttu yang pertama, Pak.

Lalu, kemudian, saya mengapresiasi, Pak Ketua, ya, terkait dengan penanganan kasus yang melibatkan Bambang Kayun, kalau saya tidak salah ya, aparat penegak hukum. Kasus ini bermula dari adanya RDPU yang ada di Komisi III oleh Ibu Dewi, kalau saya tidak salah, salah satu ahli waris.

Kasus ini sebenarnya sudah lama sekali ya, diproses di Mabes Polri, tapi itu tidak jalan karena ada intervensi bahwa di-*backup* oleh si Bambang Kayun ini. Sebenarnya Ibu Dewi ini adalah pemilik ahli waris dari kasus itu. Dan, saya mengapresiasi penanganan kasus ini, Pak, diambil alih. Asetnya mereka ini triliunan dan saya berharap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, ya, sehingga dia tidak terproses dengan baik, itu betul di... diproses secara tuntas. Pak.

Jadi, tidak hanya sebatas Bambang Kayun. Siapa pun yang terlibat dalam kasus ini menurut saya. Siapa pun yang terlibat dalam kasus ini itu diproses secara menyeluruh atau yang bekerja sama dengan Bambang Kayun agar di... dilakukan suatu penegakan hukum terhadap kasus ini karena ini merugikan ahli waris... siapa namanya? Ibu? Dewi. Dan, kami... apa... dan Pak... saya dan Pak Supriansa ketika itu betul-betul mengatensi kasus ini agar ini diproses secara tuntas karena di Komisi III mem... apa... sempat kita RDPU dengan yang bersangkutan.

Saya kira itu dua hal yang saya sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**(KETUA RAPAT KEMBALI KEPADA Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.)**

**KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):**

Terima kasih senior Sudding. Ini kita perpanjang sampai jam satu dulu, setelah itu istirahat ishoma ya.

**(RAPAT:SETUJU)**

Penanya berikut, kami persilakan Mr. Ichsan Soelistio.

**F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi III, rekan-rekan Komisi III, mitra Pak Firli, dan seluruh jajanan,**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semua,

Saya mencoba mendalami kasus terakhir ini, Bapak. Bukan mau membicarakan kasusnya, Pak, ya. Tapi, menarik, Pak. Ini Gubernur Papua ini ditangkap, rekening pemerintah daerahnya diblokir, Pak. *Nah*, kalau rekening diblokir itu, kan, berarti bayar gajinya bagaimana, Pak, terhadap karyawan itu? *Nah*, itu nanti i, Pak, b. Jadi, ini menarik, bagaimana bahwa rekening pemprov itu bisa diblokir?

*Nah*, yang berikut dan seterusnya, karena menarik juga, terakhir ,perkembangan terakhir saat ini, artinya, KPK bisa menelusuri sampai orang yang paling personal pun, dalam hal ini dia punya... apa... *stylish*-nya atau yang biasa gunting rambutnya itu pun bisa diperiksa KPK.

*Nah*, saya kira kalau ini sudah sampai bisa ke sini, kita semua juga harus hati-hati. Orang paling dekat kita pun bisa sampai dicari sama KPK ini. Kan rasanya *impossible* bahwa seorang yang menggunting rambut itu bisa sampai terlibat di persoalan beginian, begitu, Pak. Jadi, mungkin ini menarik untuk sedikit cerita, Pak, bagaimana proses ini bisa terjadi, supaya tadi efek *deterrent*-nya itu, artinya, kita jangan main-mainlah. Sampai orang personal saja, besok-besok mungkin ART kita bisa ikut jadi pertanyaan di KPK kalau kita dicurigai sampai di sana.

Dan, juga, mungkin untuk hal-hal begini, Pak Ketua beserta jajaran, kita juga harus memperhatikan sistem yang ada di negara tetangga. Tadi Pak Sudding sudah menyampaikan bahwa di negara tetangga kita itu, Singapura, sistem ininya sangat baik. Ya, tentu *aja* karena dia harus dipercaya, menjadi kepercayaan, kalau *enggak, nggak* ada orang, *enggak* taruh duit di sana.

Contohnya *aja*, itu kita bisa taruh uang di kasino. Jadi, transaksi di situ gampang sekali, Pak Ketua. *Nah*, ini kan bentuk karena ini kan kasus ini kan menyangkut di sana, ada di kasino, ya kan. Jadi, transaksi, kita jadi member, kita taruh deposito, kita janji sama orang, kita berlagak main, kita kasih dia.

Kan begitu? Itu semua sudah bukan rahasia umum, tapi kan tidak bisa diapa-apakan, Pak, karena sistem di sana mengizinkan, kan begitu. *Nah*, itu tentang... apa namanya... kasus itu.

Yang kedua, saya sedikit konsern, Pak, tadi Bapak menyampaikan sudah bahwa dengan TPPU, Bapak sudah melakukan semua upaya, artinya, KPK ini sudah melakukan semua upaya terintegrasi dari hulu sampai ke hilir untuk pelacakan aset tersangka, terdakwa, dan terpidana. Tapi, kok, Bapak di poin berikutnya dalam paparan Bapak, Bapak masih minta perampasan aset, Pak?

Apakah tidak cukup ini, Pak, TPPU ini? Karena ini TPPU juga sudah perampasan aset, tetapi harus ada predikat lainnya. *Nah*, kalau perampasan aset, kata-kata perampasan aset, aset yang ada pun bisa disita. Jadi, mungkin dalam hal ini bukan... sudah banyak saya kira terjadi penyitaan aset-aset yang mungkin bukan terlibat di dalam... apa... tidak tersangkut dengan kasus tersebut.

Mungkin asetnya si istri sudah mempunyai rumah sebelumnya, dia menikah sudah memiliki rumah, tapi karena sudah terikat suami istri, dia tidak pakai pisah harta dalam pernikahannya. *Nah*, suaminya berbuat sesuatu, ikut dirampas aset istrinya, padahal jerih payah sang istri sebelum menikah. *Nah*, ini bagaimana kalau Bapak masuk ke dalam undang-undang perampasan aset ini? Kan, semua bisa masuk, diangkut semuanya, begitu, Pak.

Jangan-jangan, kalau anak masih di dalam satu KK juga asetnya anak bisa ikut diangkut kalau disita, kalau undang-undang perampasan aset. Jadi, mungkin kami... apa... atau saya *concern* dengan penjelasan tentang TPPU ini, Pak. Kesulitan Bapak di mana? Jadi, mungkin kesulitan itulah yang kita coba atasi dengan revisi TPPU-nya karena jangan sampai sekarang ini kita modelnya *omnibus* semua, Pak.

Terakhir, ada *omnibus* Kesehatan yang sekarang lagi berjalan. Kemarin sudah baru selesai *omnibus* PPSK. Semua *omnibus-omnibus*, jangan sampai lima tahun lagi kita membuat *omnibus* lagi tentang Tipikor ini, Pak. Jadi, kalau memang bisa dicegah dari sekarang, mungkin lebih baik kita mencegahnya dengan memperkuat Undang-Undang TPPU ini sehingga penelusuran asetnya lebih mudah. Karena memang kalau menurut saya, kalau perampasan aset itu semacam *gebyah-uyah*, semua *aja* diambil, gampang, baru diselesaikan berikut. Tapi, itu *unfair*, jadi semua harus diserahkan.

Berikutnya, tadi mendukung Pak Hinca yang soal monitoring ini. Karena tanah ini, Pak, sampai kapan pun tidak akan beres karena ada ego sektoral. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada perintah, Pak, untuk membuat *one map policy*. *Nah*, setelah ada *one map policy* inilah saya kira baru kita mungkin bisa menyelesaikan semua persoalan ini sehingga kita tahu batasannya di mana.



Selama ini tidak ada, ya semua... apa... walaupun tadi yang disampaikan Pak Hinca juga bahwa keterlanjuran daripada sawit-sawit ini semuanya sudah diberi pengampunan dan penyelesaian administratif. Tapi, kan kenyataannya tidak. Masih dimanfaatkan oleh yang lain untuk menjadi tindakan pelanggaran hukum.

Jadi, mungkin kalau memang bisa KPK-lah menjadi *leading sektor* dalam hal ini untuk menjadikan *one map policy*. Karena kita dengan perbatasan dengan bupati, antarbupati... apa... kabupaten saja *enggak* jelas, begitu. Jadi, keterlanjuran-keterlanjuran ini saya kira harus dibatasi dengan adanya batasan-batasan peta yang jelas sehingga bisa diselesaikan untuk keseluruhan.

Mungkin demikian, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):**

Terima kasih, Pak Ichsan.  
Berikutnya Pak Nasir Djamil, kami persilakan.

**F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):**

Terima kasih, Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya,

**Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati,  
Kepada Pimpinan KPK yang berhadir dan seluruh jajaran yang ikut juga  
menghadiri kegiatan rapat pada hari ini,**

Saya menyampaikan terima kasih, karena tadi Pimpinan secara bergiliran menyampaikan apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dicapai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, Pak Firli, saya tidak begitu risau ketika misalnya indeks persepsi korupsi di Indonesia ini turun ya.

Turun dan naik itu biasa dalam kehidupan kita. Turun naik, naik turun itu biasa. Jangankan di ruang publik, di ruang privat saja naik turun juga sering terjadi. Oleh karena itu, kita sikapi secara proporsional dan saya berharap sebenarnya bagaimana strategi penanganan korupsi di KPK itu bukan hanya terintegrasi, tapi juga terintegrasi ya. Bukan hanya terintegrasi berbasis informasi teknologi. Tapi, juga benar-benar berintegritas dan juga bermartabat, sehingga penanganan korupsi oleh KPK itu tidak dibayangkan oleh spekulasi-spekulasi yang kemudian itu bisa menurunkan derajat dan martabat Komisi Pemberantasan Korupsi.

*Nah*, oleh karena itu, kami berharap agar Pimpinan KPK kompak ya, solid, sehingga kemudian publik percaya bahwa KPK sedang mengurus negara, bukan sedang mengurus politik. Oleh karena itu, harapan kami ya, dalam berbagai isu yang hari ini muncul di media massa terkait dengan apa yang dilakukan oleh KPK itu benar-benar seperti yang sering disampaikan oleh Pak Firli bahwa KPK tidak berpolitik.

Itu harapan kami, Pak, dan itu tentu saja sebab... sebab kita percaya bahwa kalau itu sudah masu, maka itu akan membuat KPK kemasukan angin dan itu akan membahayakan masa depan KPK.

Yang kedua, ini soal kerugian atau kerugian perekonomian negara ini, Pak Firli. Memang dalam banyak hal, dalam pandangan saya pribadi, itu masih ditemukan banyak kekaburan ya, sehingga dapat berimplikasi memunculkan ketidakpastian hukum atau bahkan mencederai keadilan.

*Nah*, bagaimana sebenarnya Komisi Pemberantasan Korupsi melihat soal ini ya. Ketika ada seorang kemudian didakwa ya, diselidiki, kemudian ditingkatkan penyidikan, kemudian selain kerugian keuangan negara, ada kerugian perekonomian negara.

Dan, makanya saya katakan tadi ternyata memang dalam praktiknya masih banyak ditemukan ya, kekaburan, sehingga berimplikasi ya, ketidakpastian hukum dan bahkan mencederai keadilan. Korupsinya segini, tapi kemudian kerugian perekonomian negara itu lebih besar dari yang dikorupsi itu. *Nah*, karena itu, bagaimana caranya kemudian ya, kerugian yang dihitung dalam konteks perekonomian negara itu, itu memberikan kepastian hukum dan sebaliknya tidak mencederai keadilan.

Yang kedua, ini soal dana otsus. Apa yang terjadi di Papua itu membuat kita miris sebenarnya, Pak Firli dan para Pimpinan KPK yang lainnya. Daerah-daerah yang mendapat predikat sebagai otonomi khusus mereka mendapat dana otsus. *Nah*, karena itu, saya menyarankan kepada Pimpinan KPK, barangkali perlu dipertimbangkan untuk membuat atau membentuk satgas ya, tata kelola dana otsus dan keistimewaan karena ada beberapa daerah juga yang mendapatkan dana keistimewaan.

Kalau KPK misalnya membentuk satgas tata kelola, misalnya perkebunan sawit dan pertambangan maka saya pikir perlu juga KPK memikirkan untuk membentuk suatu Satgas Tata Kelola Dana Otsus dan Keistimewaan agar masyarakat yang ada di sana merasakan apa yang mereka dapatkan dari dana otsus. Sebab, sebenarnya dana Otsus itu diharapkan bisa mengungkit ya, dan meningkatkan perekonomian masyarakat di sana. Tapi, yang terjadi justru tidak seperti itu.

*Nah*, karenanya, pertimbangan untuk membentuk Satgas Tata Kelola Dana Otsus, pertama, menyelamatkan keuangan negara ya, dan yang kedua, bisa membangkitkan perekonomian masyarakat, dan yang ketiga, bisa memberikan manfaat berupa kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di daerah khusus tersebut, Pak. Jadi, seperti apa sebenarnya pengelolaan dana

otsus? Apakah pengelolaan dana otsus itu disamakan dengan daerah-daerah yang bukan otsus?

Sehingga, orang-orang yang di daerah otsus berpikir, apa bedanya kami di daerah Otsus dengan di daerah yang bukan Otsus? Namanya saja khusus. Martabak kalau khusus beda, Pak, dengan martabak yang umum. Martabak khusus itu beda ya, cara dia buat juga beda, isinya juga beda, disajikan juga berbeda.

*Nah*, kenapa kemudian ya, daerah otsus itu diperlakukan sama dengan daerah-daerah dalam konteks mekanisme tata kelolanya. Kalau penerimaannya berbeda ya. Misalnya, daerah Aceh ya, dari 2023 sampai 2027 itu mendapatkan alokasi 1% dana otsus dari dana alokasi umum secara nasional ya, berkurang satu persen.

*Nah*, oleh karena itu, Pak Firli, mudah-mudahan Satgas Tata Kelola Dana Otsus dan Keistimewaan ini membantu ya, membantu masyarakat di sana dan juga membantu ya, kalau kemudian... apa namanya... ke depan ada pengelolaan ataupun pengelola yang lebih baik lagi di daerah tersebut.

Ketiga, ini soal jaga desa, Pak. Jadi, saya mengapresiasi sekali ya, Desa Anti Korupsi atau DAK yang dibuat oleh KPK. Tapi, sayangnya hanya ada sepuluh desa, kalau saya tidak salah lihat tadi.

Saya harapkan, mudah-mudahan di tahun 2023 ini ya, kita bisa lebih baik menjaga desa. Sebab, dana desa itu bagi saya adalah dana yang bisa bermanfaat untuk membangun perekonomian secara nasional. Niah, karena itu, Desa Anti Korupsi ini, Pak, perlu ya, kemudian menjadi bahagian yang tidak terpisahkan karena kita sadar bahwa hari ini ada lebih dari seratus ya, kepala desa yang terjerat dengan kasus-kasus korupsi.

*Nah*, karena itu, saya besar harapan agar Desa Anti Korupsi ini sejalan dengan upaya kita untuk menjaga desa, Pak, ya. *Nah*, ini harapan kami kepada kepada KPK.

Dan yang paling terakhir, yang ingin saya sampaikan ini soal korupsi di sektor pertambangan. *Nah*, ini memang sangat besar, Pak, dan dari kemarin Presiden Jokowi juga sudah mengingatkan soal pertambangan-pertambangan ilegal. Kemudian juga, pembantu presiden, baik menko maupun menteri juga sudah mengingatkan soal ini ya, dan saya juga mendapatkan informasi bahwa di KPK juga ada satgas ya yang menangani masalah ini.

Sudah sejauh mana sebenarnya, Pak, kita memberikan perhatian dan menghasilkan satu kajian dan kemudian itu diimplementasikan terkait tata kelola ya, misalnya perkebunan sawit dan juga pertambangan-pertambangan ilegal yang menurut saya jumlahnya juga tidak bisa kita anggap ringan.

Soal perkebunan sawit, sering sekali terjadi konflik pertanahan dengan masyarakat ya. Konflik tanah, konflik lahan antara masyarakat dengan pemilik-pemilik perkebunan sawit itu tidak bisa dihindari dan makin tahun, Pak

Firli, jumlahnya semakin meningkat ya. Dan, inilah yang saya sebutkan bahwa reforma agraria itu belum mampu kita lakukan.

Demikian, Ketua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan kita terus bisa mengawal KPK dan KPK benar-benar bisa diharapkan ya, untuk ya kemajuan Indonesia.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):**

*Wa'alaikumsalam,*

Ini waktu bertanya tinggal pendek. Mohon izin, Pak Ketua KPK beserta seluruh jajaran rekan-rekan sekalian, kita *break* dulu untuk ishoma ya. Sampai jam berapa? Sampai jam dua?

Jangan kepanjanganlah. *Nah*, kita ikuti tamu kita yang kita undang. Jam 13.30 sudah disediakan di ujung sana makan seadanya.

Terima kasih. Kita skors.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 12.54 WIB)**

**PERGANTIANSEMENTARA KETUA RAPAT DARI Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A. KEPADA PANGERAN KHAIRUL SALEH/F-PAN**

**WAKIL KETUA KOMISI III (PANGERAN KHAIRUL SALEH/F-PAN):**

Pak Firli, kita mulai ya.

*Bismillahirrohmanirrohim,*

Skors saya cabut.

**(DISKORS DICABUT PUKUL 13.38 WIB)**

Bapak-Ibu, Hadirin yang berbahagia,

Kita lanjutkan kepada kawan-kawan yang belum menyampaikan pendalaman.

Ibu Riska sudah siap? Ada yang ingin ditanyakan?  
Oke, silakan.

**F-P. GERINDRA (SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang,  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
*Shalom,*  
*Om swastiastu,*  
*Namo buddhaya,*  
Salam kebajikan,

**Yang saya hormati Pimpinan serta Anggota Komisi III,  
Yang saya hormati Ketua KPK beserta seluruh jajarannya dan para  
hadirin sekalian,**

Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas paparannya Pak Ketua KPK beserta seluruh Deputy yang luar biasa komprehensif dan lengkap.

Saya ingin memberikan apresiasi terhadap kinerja KPK, Pak, di mana realisasi belanja KPK Tahun Anggaran 2022 sebesar 97% dan menjadi realisasi tertinggi selama tiga tahun belakangan ini, Pak. Dan juga untuk kinerja pengembalian aset, lagi-lagi saya memberikan apresiasi, Pak, karena mengalami peningkatan sebanyak 158 miliar, sebelumnya dibanding 2021 yang mencapai 575 miliar rupiah.

Lalu, pada tahun kedua, Pak, di bidang pendidikan dan peran masyarakat, saya mempunyai usul sedikit, Pak. Sedikit cerita ke belakang, saya pernah mengikuti program pendidikan dari KPK, Pak, melalui seminar umum terbuka pasca S2, Pak. Ingin bercerita sedikit, di mana di sana, Pak, program itu sangat luar biasa baiknya, Pak, kita dapat bicara dua arah dan dua arah, . Jadi, kita sebagai mahasiswa bisa menanyakan dengan lugas dan detail pertanyaan terkait korupsi.

Di sini saya ingin menekankan bahwa ke depannya, Pak, agar lebih banyak lagi program KPK yang diaplikasikan ke daerah-daerah, khususnya di Dapil Sumsel I, Pak. Saya rasa generasi muda saat ini sebenarnya banyak sekali yang ingin terjun ke politik, Pak. Namun, sedikit terganjal dengan kurang begitu adanya pengetahuan terkait tindak pidana korupsi.

Lalu, saya membaca paparan pada paparan jejaring pendidikan, Pak, di mana tertulis, sebanyak 6.246 guru, kepala sekolah, PAUD, dan dasmen berpartisipasi dalam penguatan kapasitas dan juga sekitar 398 pemda yang menerapkan pendidikan antikorupsi pada jenjang Dikdasmen, Pak.

Di sini saya ingin menanyakan, di mana saja, Pak, aplikasi penerapannya, apakah ada yang di Dapil Sumsel I, Pak? Karena saya ingin mengetahui penerapannya apakah sudah ada di daerah saya? Lalu, saya harap juga agar KPK dapat mengoptimalkan program-program prioritas kinerja, khususnya dalam pendidikan dan bermasyarakat serta di bidang pencegahan dan monitoring.

Demikian Pimpinan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik. Selanjutnya kami persilakan Bimantoro.

**F-P. GERINDRA (BIMANTORO WIYONO, S.H.):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan Komisi III yang saya hormati dan seluruh Anggota Komisi III yang saya hormati,  
Pimpinan KPK beserta jajaran yang saya hormati pada siang hari ini,**

Saya ingin mengapresiasi, yang pertama, tadi paparannya sungguh sangat komprehensif, Pak Ketua. Dari seluruh Pimpinan juga menerangkan masing-masing tupoksinya dan sangat jelas sekali untuk kita semua, sehingga kita mendengarkannya juga sangat serius sekali dan banyak ilmu juga yang bisa kita terima pada siang hari ini.

Yang pertama, saya melihat serapan anggaran KPK di tahun 2022 sangat baik sekali, Pak Ketua, 97%, yaitu sebesar 1.264 miliar dan kami pun melihat bahwa anggaran KPK ini setiap tahun itu selalu naik, Pak Ketua. Di sini membuktikan bahwa dukungan dari DPR dan pemerintah untuk program pemberantasan korupsi itu sangat baik sekali.

Selanjutnya, tadi pun kami mendengar tentang beberapa upaya pencegahan. Tadi banyak sekali programnya yang sudah dijelaskan. Saya tertarik, pertama, melihat upaya pencegahan, yaitu ada tadi seminar-seminar tentang Desa Anti Korupsi. Di sini pun kami pun ingin mendorong, Pak, tadi kami melihat memang dari segi monitoring pun sudah bagus sekali diterapkan di seminar-seminar tersebut.

Kami mendorong monitoring yang terstruktur dalam anggaran dana desa juga, Pak. Itu harus diperketat Pak karena kami merasakan banyak sekali kami sering dikeluhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat desa di Dapil kami di Nganjuk, Jawa Timur. Memang di sini memang harus adanya terobosan, di mana monitoring ini harus berdampak pada pendampingan dan pembinaan terhadap penggunaan anggaran dana desa tersebut, Pak.

Kami pun melihat, selain daripada anggaran dana desa, kemarin pun di Dapil kami juga itu ramai sekali dan membuat kegaduhan tentang pengisian perangkat desa dan ini pun mungkin harus lebih ditata juga, Pak, sistemnya bagaimana caranya agar dalam pengisian perangkat desa itu bisa benar-benar profesional, terutama... apa... bisa benar-benar bisa diakses secara langsung oleh masyarakat.

Selanjutnya, kami pun ingin mendalami masalah gratifikasi dan pelayanan publik. Tadi kami mendengar cukup jelas mengenai sistem yang dibangun oleh KPK, salah satunya itu sistem manajemen antipenyuapan.

Kami sangat mendorong sekali, Pak, sistem ini, tapi ada baiknya juga memang bisa diterapkan, terutama di pelayanan publiknya itu sendiri, Pak, selain pada badan usaha yang sekarang sistem ini sudah diterapkan.

Kami ingin melihat bagaimana terobosan dari sistem manajemen antipenyuapan ini bisa diimplementasikan di pelayanan publik sehingga masyarakat memang benar-benar bisa merasakan nyaman, Pak, pada saat pengurusan izin ataupun yang lain-lain. Karena, pada masyarakat desa, saat ini memang untuk mengajukan perizinan bilamana dia ingin apa memulai usaha banyak sekali oknum-oknum juga yang mencoba... apa namanya... mencoba untuk menerapkan pungli dan lain-lain dan ini membuat citra di masyarakat itu turun sekali, Pak, seperti itu.

Jadi, kami berharap sistem manajemen antipenyuapan ini pun bisa dimasukkan pada pelayanan publik sehingga bisa mengeluarkan terobosan upaya pencegahan serta sistem *monitoring*-nya juga bisa berjalan di sana, Pak.

Mungkin itu saja, Pimpinan, terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

Selanjutnya kami persilakan Bapak Dr. Benny Kabur Harman.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

**Pimpinan Komisi III, Bapak-Ibu Anggota, Pimpinan KPK, dan para pejabat di lingkungan KPK,**

Kali ini saya mencoba untuk menanyakan hal-hal yang saya anggap penting yang selama ini menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Untuk apa yang saya sampaikan ini tidak lepas dari tugas utama anggota dewan, salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan mitra kerja, dalam hal ini KPK tentunya.

Saya ingin bertanya tentang... jadi bertanya ini penting, sebab pertanyaan adalah hak instrumen untuk dewan melakukan pengawasan dengan cara bertanya. Jadi, kalau bertanyanya *enggak* bermutu ya, pengawasannya juga *enggak* bermutu. Maka, saya mencoba untuk menyusun pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh supaya pertanyaannya bermutu dan juga harapannya jawabannya pun lebih bermutu dari pertanyaan yang saya ajukan.

Yang saya tanyakan adalah mengenai penggunaan kewenangan KPK, khususnya penggunaan kewenangan KPK dalam bidang penindakan. Jadi, yang lain-lain mungkin tidak saya jadikan fokus. Pertanyaan saya adalah sebagai berikut: Satu, sepemahaman saya salah satu tugas dan kewenangan

KPK itu melakukan pemantauan terhadap penanganan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya, yaitu kejaksaan dan kepolisian.

Apabila menurut pandangan pemantauan KPK, penanganannya bertele-tele atau ada... ada "permainan" di tengah jalan maka di situlah KPK masuk dan mengambil alih kasus itu. Pertanyaannya adalah sudah berapa banyakkah kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan yang dipantau dan apa hasil pantauannya dan apakah ada yang diambil alih, seperti tadi kasus yang tadi disebut oleh yang terhormat anggota yang terlebih dahulu. Siapa namanya yang diputus bebas itu? Kasus korupsi apa itu yang... ya, siapa tadi, saya lupa-lupa tadi. Pokoknya ditangani oleh kejaksaanlah.

Belakangan ini kejaksaan itu lebih menonjol dari KPK dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Kita menghargai, menghormati kejaksaan dan itu adalah tugasnya. *Cuman*, kewajiban kami sebagai Anggota DPR adalah memantau jangan sampai ada pilih kasih dalam proses hukum yang dilakukan. Maka, adalah tugas KPK untuk memantau itu supaya jangan ada yang diproses, ada yang tidak, ada... ada yang ya. seperti kasus apa tadi, minyak, tadi, minyak, tadi Pak Arsul tadi yang ngomong soal minyak sawit dia. Minyak goreng iya. Minyak goreng, tadi Pak Arsul tadi, kasus minyak goreng.

Seperti apa kasusnya sudah... apakah dulu menteri yang dipanggil, diperiksa sehari penuh sudah ditindaklanjuti atau belum, kan, begitu kan, pertanyaannya kepada kita? Lalu, kita jawab, ya, mestinya itu juga diawasi oleh KPK. Kan, begitu, Pak? Kalau kami ini kan, namanya politisi, lebih banyak aspek politiknya. Jadi, itu pertanyaan pertama.

Pertanyaan yang kedua, berkenaan dengan OTT (Operasi Tangkap Tangan). Sekali lagi, ini adalah kewenangan KPK dan kami tentu mendukung penuh OTT itu. Tanpa persetujuan KPK, tidak perlu meminta persetujuan DPR untuk melakukan OTT sebab itu adalah kewenangan Bapak. Biar DPR juga bilang jangan, jangan lakukan OTT, OTT ini bikin rusak sistem negara kita, OTT itu adalah mekanisme yang tidak bermartabat, KPK tentu tetap melaksanakan tugasnya sebab itu sudah ada di dalam Undang-Undang KPK. Itu DPR, apalagi kalau pemerintah, seperti Dr. Arsul Sani tadi sampaikan, lingkungan korupsi yang paling ini, kan, di eksekutif ya, Pak, ya. Saya setuju itu eksekutif.

Saya lupa-lupa ingat, belum lama ini ada seorang menteri utama yang mengkritik OTT yang dilakukan oleh KPK. Ya, saya hanya mohon, anggap saja itu masukan, bukan perintah dan saya rasa KPK tidak tunduk pada perintah siapa pun. Sebab, KPK adalah lembaga independen, otonom, meskipun dengan undang-undang baru, KPK adalah rumpun kekuasaan eksekutif di bawah presiden, begitu, Pak Arsul dulu bikin ya. Ya, saya *enggak* ikut itu. Saya *enggak* ikut itu. Ya, karena ya, kami terpaksa setuju ya, itu. *Nah*, *enggak* enak kan, Pak, kalau *enggak* setuju. Nanti malah dibilang macam-macam kita.



Bagi kami, sekali lagi, kami menghargai, menghormati proses hukum itu, tetapi adalah kewajiban kami untuk menanyakan bagaimana proses pengambilan keputusan di tingkat Pimpinan KPK? Jadi sekali lagi, yang saya tanyakan, bagaimana proses pengambilan keputusan di tingkat Pimpinan KPK mengenai operasi tangkap tangan ini? Apakah atas perintah Pimpinan KPK? Tentu undang-undang baru, harus diajukan dulu ke dewan, Dewan Pengawas.

Kita tidak salah juga kalau menanyakan kepada Pimpinan KPK, tidak usah sebut siapa orangnya, sudah berapa permohonan OTT yang diajukan ke Dewas. Berapa yang dikabulkan dan berapa yang ditolak, dan tidak salah juga kalau Pimpinan KPK menjelaskan kepada kami alasan penolakan itu 1,2,3,4,5 tidak usah sebut siapa yang di OTT.

Jangan sampai *kayak* kasus di Jawa Timur, satu kena, itu kan bisa kena semua itu, Pak, namanya OTT, ambyar, begitu. Ambyar. Satu kena, ambyar semua. DPRD Jawa Timur, Pak, ya? Jadi, satu kena, semua kena. *Enggak* duga-duga tadi ini karena begitu OTT ya, sudah. Sudah langsung ditanya, kau dapat dari siapa dan kau tadi kasih ke siapa saja, kan begitu?

Kalau model lama, Pak Ketua KPK, ada bermacam-macam sedikit *kok*. "Kau sebutlah siapa-siapa yang dapat tadi" kan begitu, "Kalau *enggak*, kau nanti bahaya atau kau jadi CJ (Justice JC *Justice Collaborator*)". Ya, itu cara-cara biasalah itu, kita paham. Pun saya adalah sekali lagi kita menghormati itu adalah kewenangan KPK dan kita mendukung penuh itu. Hanya saja supaya tidak ada kerjaan, tidak ada kesan ada hal-hal yang subjektif sifatnya, mungkin yang tadi saya sampaikan itu perlu dijelaskan secara terbuka di dalam forum ini tentang mekanisme dan prosesnya.

Dulu selalu kita di Komisi III meminta ada SOP-nya dan SOP itu diserahkan kepada kami untuk kami tahu itu SOP-nya. Selain supaya kami tahu juga supaya kami berhati-hati, jangan melakukan hal-hal yang ternyata sedang di OTT, dijadikan objek OTT oleh KPK. Jadi, penting sekali untuk... karena dalam penanganan perkara di KPK, salah satu syaratnya, kecuali sekarang sudah berubah. Kalau dulu adalah syarat transparansi dan akuntabilitas.

Kemudian yang ketiga, berkenaan dengan kewenangan penindakan. Kewenangan penindakan adalah kewenangan yang luar biasa. Inilah yang membuat KPK ini menjadi begitu *powerfull*, begitu "menakutkan" karena kewenangan ini. Kalau kewenangan penyidikan tadi, Pak Ketua, kewenangan untuk... apa... survei-survei tadi ya, itu biasa-biasa saja itu, tapi kata kunci KPK adalah penindakan. Tidak ada KPK tanpa penindakan.

Kalau bukan ini, ya, *ndak* usah kita bikin KPK. Mendingan serahkan kepada kepolisian dan kejaksaan. Tapi, kewenangan penindakan yang membawa efek kepada yang lain-lainnya maka sekali lagi kami ingin tahu kewenangan yang luar biasa ini seperti apa digunakan oleh KPK?

Apa yang ingin kami tahu dan apa yang kami minta supaya dijelaskan oleh KPK adalah satu, sumber-sumber informasi yang dipakai atau yang digunakan oleh KPK untuk memulai proses penindakan dari segi hukum itu seperti apa? Sumbernya dari mana, laporan masyarakatkah, audit BPKkah, ambil alih dari aparat penegak hukum tadikah atau OTT?

Dengan demikian, Pak Ketua, Pimpinan Komisi dan Pimpinan KPK yang sangat saya hormati, tidak ada kesan tebang pilih, tidak ada kesan KPK sepertinya sangat tajam dalam penegakan, khususnya dalam penindakan kasus-kasus korupsi. Tetapi, tidak cukup di situ dia, ada tambahannya, tajam sekali ke bawah, tapi lumpuh ke atas. Tambah lagi yang lain, Pak Arsul Sani, tajam sekali ke lawan, tapi lembek sekali ke teman.

Bisa saja kita bilang, "Masa sih?" Itu yang tadi saya bilang, kesan. Kesan ini bisa salah, namanya saja kesan. Supaya tidak ada kesan "tajam ke lawan, lembek ke... apa tadi... lembek ke teman" tadi, kalau bahasa Pak Arsul tadi, "tajam ke oposisi, lembek ke koalisi". Kan, begitu, Pak. Sa... saya pinjam Bapak punya bahasa tadi. Ya, saya ingat.

Saya sebenarnya tidak mau pakai istilah ini, tapi Beliau mengingatkan saya. Supaya tidak ada kesan penindakan yang begitu tajam tadi ke lawan, ke oposisi, tapi ke koalisi, begitu teman, begitu bersahabat, begitu lembek. Maka, kita ingin tahu itu tahapan-tahapannya, Pak Ketua KPK, Pimpinan KPK.

Ada tahapan dari pelaporan. Setelah pelaporan itu darimana tadi, kan, tentu ke pemeriksaan. Kalau laporan, kan, banyak, Pak Pimpinan KPK. Dari daerah saya juga banyak, Pak. Mas... tadi siapa yang mengajukan *judicial review* tadi ke MK tadi? Pak Gufron. Saya mohon maaf, saya lupa-lupa.

Pak Gufron, daerah saya juga banyak laporan. Malah saya sekarang, Pak Ketua, dimaki-maki di daerah, saya. "Itu dulu Pak BKH itu mana? Dulu dia sangat kencang *ngomong* korupsi. Sekarang *kok* lembek? Nanya *aja enggak* bisa." Begitu sekarang, Pak.

Coba kalau Pak BKH maju lagi DPR, *enggak* boleh kita pilih orang ini. *Wah*, takut juga, nanti lama-lama hilang kursi saya di dapil saya. Maka, saya pun kalau begitu, aku tanya ini. Pak Ketua, itu bagaimana laporan-laporan itu? Ditindaklanjutilah!

Jadi, ada laporan ditindaklanjuti, tapi juga kalau misalnya *enggak* diproses ada penjelasannya, mengapa. Dalam penjelasan itu tentu ada yang masuk akal dan tidak masuk akal. Publik tahu itu, ingin tahu itu. Setelah laporan tadi, kan, diseleksi. Kan ada seribu laporan, Pak Hinca, *enggak* mungkin semua ditangani. Dari seribu itu ambil sepuluhlah ke tingkat pemeriksaan. Dari sepuluh, lima masuk penyelidikan. Dari lima penyelidikan, mungkin satu ke penyidikan. Kan, begitu?

Lalu, TSK dan seterusnya dan seterusnya. Kita ingin tahu itu. Jangan tiba-tiba ujug-ujug, *wah*, si A jadi TSK, si B jadi TSK, atau apa, dan sebagainya. Kita ingin tahu proses ini, SOP-nya seperti apa.

Saya rasa bukan karena kita *enggak* suka KPK. Kita dukung penuh. Kewenangan sudah kita kasih. Kan, begitu, Pak Wayan? Undang-undang kasih kewenangan luar biasa kepada KPK untuk melakukan langkah-langkah yang disebut dalam Undang-Undang KPK juga, *extraordinary means*, tindakan luar biasa untuk mengatasi apa yang disebut dengan tindak pidana korupsi *extraordinary crime*. Itu bahasa undang-undang.

*Means*-nya itu adalah kewenangan yang luar biasa. Maka, kita ingin tahu ini penggunaan kewenangan luar biasa ini. Jangan sampai muncul kesan-kesan seperti yang tadi saya sampaikan, ada subjektivitas, ada tebang pilih, ada pilih kasih, macam-macam ini isu. Apalagi ini musim politik ya, kalau pemilunya ditunda, ya, bagus, *enggak* muncul ini, kan.

Artinya, bagusnya isu ini *enggak* muncul, kan, begitu. Ya kan?

Bukan, bukan saya setuju.

Itulah kesimpulannya apa. Johan Budi ini ujung-ujung saja diambil. Maksud saya tadi, kalau pemilu ditunda, ini persoalan yang begini ini, yang politik tadi, misalnya soal Anies, Formula-E, kan, akibat ini, jadi tersangka atau tidak, ini kan akibat pemilu yang dalam waktu dekat ini.

Coba Pemilu 2027, mungkin *enggak* ada isu ini. Jadi, ini yang bikin kita jadinya *enggak* jelas lagi. Tapi, saya setuju dengan Bapak Presiden Jokowi, kita hormati proses hukum, apa pun itu, silakan, tapi jangan lupa pertanggungjawaban, begitu dia, Pak. Silakan, tapi pertanggungjawaban. Itu yang ketiga, Pak Ketua.

Yang keempat, bahwa kedua yang keempat ada isu yang beredar di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa Pak Ketua KPK, Pimpinan KPK juga perlu jelaskan ini terbuka. Teman-teman yang lain tentu takut nanya ini. Tapi, saya mencoba selalu menjaga keberanian saya ini jangan sampai dilumpuhkan, keberanian saya.

Ketika teman-teman lain takut atau *ewuh pakewuh* atau sungkan, *ha* kasih saya nanyanya. Aku *enggak* kenal itu *ewuh pakewuh*, aku *enggak* kenal itu sungkan, untuk kebaikan, Pak Ketua, bukan untuk kepentingan pribadi. Apa itu? Apa tadi itu saya ngomong?

Oh, nomor 4 ya, apa itu... isu beredar tentang Direktur Penuntutan KPK yang konon dia minta *resign*, apa betul? Ini bisa salah, bisa, tapi ini isu yang *enggak* jelas ujung pangkalnya. Oleh sebab itu, Pak Ketua KPK, jelaskan ini supaya tidak ada spekulasi di publik.

Apa sebabnya kasus dirinya soal perbedaan pandangan dan sikap tentang rencana mentersangkakan seseorang. Seseorang ini dalam tanda kutip. Seseorang, ya, ini calon orang besar, ini seseorang. Kalau *enggak*, kan, pasti *enggak* ada apa-apanya. Karena, menurut pandangannya, bukti-bukti hukum, syarat-syarat hukum untuk mentersangkakan Beliau belumlah cukup.

Ini isu beredar yang tidak dipertanggungjawabkan, yang tidak ada penanggungjawaban. Memang sekarang ini, kan, produksi isu, produksi *hoaks*, produksi macam-macam ya. Produksi *hoaks*, produksi informasi palsu, macam-macam ini. Saya rasa forum begini penting untuk *clear*-kan semua ini, bikin jelas apa yang tidak jelas.

Apa betul atau tidak, kita *enggak* tahu. Maka, kita butuh penjelasan resmi dari Pak Ketua, Pimpinan KPK supaya tidak ada spekulasi di tengah-tengah masyarakat yang tentu sangat kontraproduktif dengan agenda kita bersama untuk memberantas korupsi ini.

Saya rasa empat hal ini yang ingin saya tanyakan dan mohon penjelasan, mohon jawaban dari Pimpinan KPK. Sekian dan terima kasih banyak.

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya, kami persilakan Pak Wayan Sudiarta. Bersiap-siap Mas JB.

Silakan, Pak Wayan.

**F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):**

Saya langsung saja.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,  
Pimpinan KPK beserta jajarannya,**

Ada tiga hal, tapi saya buat ringkas-ringkas karena sudah banyak sekali rekan-rekan kami menyampaikannya dari berbagai aspek tentang KPK. Masalah pertama, sebelum saya mulai, sekalipun sudah didahului oleh Pak ... (suara tidak jelas), Pak Sekjen kita ini tentang IPK nasional turun dari sebelumnya, yang sekarang nyatanya hanya 33,99. Bahkan Pak Asrul dengan jelas menambahkan, penurunan peringkat Indonesia menjadi 110 dari 180 negara.

Dari IPK tersebut terlihat bahwa tren tindak pidana korupsi pada sektor kebijakan dan penegakan hukum di Indonesia ini masih terjadi atau justru meningkat. Sekali lagi saya ulangi, malah meningkat, walaupun saya yakin seyakin-yakinnya bahwa saya sendiri melihat bagaimana pencegahan dan penindakan KPK terhadap sektor penegakan hukum dan peradilan memang meningkat dan ini menjadi bagian yang sangat penting bagi KPK. Saya harus garis bawahi dan saya harus akui ini.

**Pimpinan KPK yang saya hormati,**

Apa, *sih*, muara dari pencegahan dan penindakan? Belum ada doktrin yang pasti tentang ini, tapi setidaknya masyarakat, khususnya saya sendiri

yakin kalau penindakan, pencegahan ini bagus harus ada muara, ada... harus ada hasil akhir dari penindakan dan pencegahan itu secara signifikan.

Setidaknya dari pengamatan, saya mencatat tiga hal, seharusnya penindakan dan pencegahan yang baik menimbulkan setidaknya, saya ulang tiga hal, pertama, efek jera. Apakah ada tolok ukur sekarang, seberapa jauh efek jera akibat pencegahan dan penindakan yang dilakukan KPK?

Yang kedua, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, terutama aspek pencegahannya. Seberapa jauh ini bisa diukur, dijelaskan secara faktual dengan data-data. Terus, yang ketiga, tentang kepatuhan terhadap aturan hukum di masyarakat. Jika ketiga hal ini tidak jelas maka barangkali saya berani meyakinkan bahwa penting sekali KPK merinci program-program dan capaian ini sehingga muaranya adalah ketiga hal ini bisa diukur.

### **Pimpinan KPK yang saya hormati,**

Untuk mencapai efek jera, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan terhadap aturan hukum oleh masyarakat, lalu apa yang telah dilakukan yang bisa kami jelaskan kepada masyarakat oleh KPK. Apa yang sudah dilakukan? Misalnya, tolong kasih gambaran hari ini mengenai bagaimana cara mencapai tiga hal itu, setelah melakukan pencegahan dan penindakan. Bagaimana strateginya, bahkan yang paling ekstrem apa terobosan-terobosannya. Karena, sering kali KPK yang sudah bekerja keras, KPK yang banyak dikritik kadang-kadang ada yang meragukan eksistensinya sekarang. Maka, melalui strategi dan terobosan dan cara-cara yang mencapai tiga hal itu perlu mendapat gambaran. Ini akan sangat menolong KPK, Pak.

Masalah yang kedua, berkenankan saya mengutip slogan bahwa "Sesungguhnya tidak ada lembaga yang terlalu buruk, bahkan dikatakan tidak ada lembaga yang buruk sesungguhnya, kecuali dia tidak mengenal, kecuali dia tidak memiliki skala prioritas yang tepat." Dan, saya harap, skala prioritas yang tepat ada pada KPK.

Saya mungkin alpa melihat secara rinci, secara detail prioritas-prioritas yang ada, dan yang sudah menjadi andalan bagi KPK. Tapi, berkenankan saya mengajukan prioritas, kalau ini dianggap tambahan, melengkapi prioritas yang ada. Kenapa ini saya katakan, karena masalah-masalah prioritas yang akan saya katakan ini berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

### **Pimpinan KPK yang saya hormati,**

Tolong diprioritaskan kasus korupsi di bidang keuangan negara, sebagai salah satu prioritas yang saya ajukan. Kedua, pengelolaan aset negara. Sekali lagi, pengelolaan aset negara. Di mana-mana kita tahu aset-aset ini sering *enggak* jelas ujungnya, maka ini menjadi penting menjadi skala prioritas.

Lalu, yang ketiga, lingkungan hidup. Ini sangat strategis ini. Yang keempat, kehutanan. Mungkin empat ini menambah prioritas yang ada, barangkali sudah memadai. Mudah-mudahan juga di dalam skala prioritas

yang sudah dicanangkan, keempat-empatnya sudah ada, tapi sekali lagi, saya khawatir alpa membacanya dengan teliti.

Masalah yang ketiga, yang ingin saya katakan sebagai masalah yang ketiga adalah di bidang pengendalian internal KPK di tahun 2022, khusus 2022 supaya tidak terlalu melebar, lebih baik saya fokuskan. Pengendalian internal KPK di tahun 2022.

**Pimpinan KPK yang saya hormati,**

Saya lupa bagaimana sikap mayoritas Pimpinan dan staf di KPK ketika kami-kami menggagas dewan pengawas untuk KPK. Tapi, yang pasti di masyarakat waktu itu pro dan kontra. Ada yang setuju dewan pengawas, ada yang menolak dewan pengawas. Bahkan, yang mendapat liputan luar biasa besar adalah yang *enggak* setuju adanya dewan pengawas karena mereka *enggak* merasa *enggak* bebas kalau diawasi.

Tapi, kenyataan memang, rakyat melalui wakil-wakilnya menganggap lembaga yang demikian hebat, makin hebat lembaga itu, terutama dari aspek kewenangannya, pengawasannya harus semakin kuat. Maka kini, kita melihat dewan pengawas itu punya eksistensi dan dasar hukum beserta posisinya yang sangat kuat.

Yang menjadi pertanyaan buat kami adalah bagaimana cara Pimpinan KPK beserta jajarannya ini menjelaskan, menjelaskan kepada kami mengenai bagaimana kerja sama dan koordinasi dengan dewan pengawas KPK untuk meningkatkan integritas dan kualitas SDM di KPK, satu dan lain hal karena tadi kita sudah singgung IPK yang sedang menurun.

Jadi, saya ulangi, tolong jelaskan, kami minta penjelasan Ketua KPK dan jajarannya mengenai kerjasama dan koordinasi antara Pimpinan dan jajarannya beserta dengan dewan pengawas. Selain itu, juga kerjasama dan koordinasi dengan APIP untuk meningkatkan indeks antikorupsi di kementerian dan lembaga, juga di BUMN dan BUMD, dan tidak kalah pentingnya adalah di pemda-pemda.

Saya rasa itu saja, tiga hal, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, yang terakhir Mas Johan Budi. Silakan.

**F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):**

Terima kasih Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera dan selamat sore buat semuanya,

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi III dan juga Anggota Komisi III,**

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan jajaran,**

Saya tidak bertanya, Pak Firli. Saya memberikan saran, Pak, terkait dengan fungsi monitoring. Saya tertarik tadi dengan penjelasan Pak Ketua KPK. Jadi, gini, Pak Ketua KPK, kita tahu bahwa KPK punya fungsi monitoring sesuai dengan Pasal 6 dan juga Pasal 8 di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 undang-undang yang baru, yang kemudian menempatkan KPK menjadi rumpun eksekutif. Begitu Pak Arsul ya, kata Pak Benny tadi.

Menjelang pilpres ini, Pak, saya lihat banyak sekali hal-hal yang perlu dimonitoring oleh KPK, ya, terutama, ada kecurigaan penggunaan dana-dana APBN, apakah itu melalui kementerian atau melalui BUMN, itu yang bisa *quote and quote* disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan politik. Karena itu, saya menyarankan fungsi monitoring tadi juga yang selama ini juga sudah dilakukan oleh KPK, beberapa periode sebelum Pak Firli, beberapa kajian.

KPK nyata betul ya, yang kemudian memberikan rekomendasi kepada Presiden, termasuk kepada kementeriannya. Dan, ketika rekomendasi itu tidak dijalankan maka proses penindakan yang akan dilakukan dan itu beberapa kali pernah dilakukan oleh KPK. Saya kira ini bagus. Jadi, seolah-olah sudah diingatkan, begitu ya, tapi masih saja ... (suara tidak jelas) terjadinya korupsi masih saja dilanggar. Karena itu, menjelang pilpres ini saya kira perlu juga KPK untuk memonitoring melalui kajian sistem yang ada di KPK.

Dulu, ada kasus yang gegap gempita, kelangkaan minyak goreng misalnya, yang kemudian dulu kita menduga ini ada mafia minyak goreng, yang kemudian akan ada hasil yang gegap gempita juga, begitu. Ternyata, hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Seminggu yang lalu, empat hari yang lalu, ada berita minyak goreng langka lagi, *gitu*, Pak Firli. Saya kira, KPK bisa masuk ke situ, Pak. Yang *gede-gede* ini, kan, mafia, Pak. Mafia minyak goreng yang sudah di-*state* dengan *clear* ya, waktu itu oleh, baik oleh penegak hukum maupun oleh banyak kalangan, bahwa ada mafia minyak goreng, begitu.

Saya kira selesai. Ternyata, hukumannya pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, juga, orang-orang yang dituduh terlibat juga tidak seperti yang pertama kali digaungkan yang begitu menggemparkan. Saya kira KPK bisa masuk ke sana dan KPK sampai hari ini saya masih meyakini, KPK itu independen. Jadi, tidak tersandera oleh kepentingan-kepentingan politik apa pun, ya. Karena itu, bisa masuk ke ruang-ruang yang mungkin *quote and quote* agak sungkan penegak hukum yang lain masuk ke sana, Pak Firli. Kalau KPK, kan, tidak ada yang perlu *disungkanin*.

Kemudian, Pak Ketua, Pimpinan, Pimpinan KPK dan juga jajaran, saya sering ke dapil juga, Pak Ketua. Saya melihat, saya kaget juga di dapil di Jawa Timur itu masih ada satu dua desa yang belum teraliri oleh listrik. Karena itu, saya minta juga menyarankan fungsi monitoring ini juga dilakukan

oleh KPK kepada BUMN-BUMN berkaitan dengan itu. Pupuk kadang-kadang langka juga, Pak Firli, di dapil saya itu, sehingga ada yang salah ini ya, menurut saya. Ketika kebijakan di atas sudah bagus, sampai ke bawah ternyata seperti itu, begitu.

Yang terakhir, tadi saya kaget juga dengan yang disampaikan oleh Pak Benny K Harman ya. Ada direktur, saya *enggak* dengar sebelumnya ini, Pak Firli, Direktur penuntutan mundur gara-gara mau mentersangkakan seseorang, dia *enggak* setuju, gara-gara itulah. *Cuman*, keberanian Pak Benny ini setengah-setengah, begitu ya. Kenapa *enggak* disebut saja siapa seseorang itu, biar *clear*, begitu ya. Kalau kita *ngomong* berani, ya, harus *clear* harusnya, siapa seseorang itu sehingga kita...ini disaksikan oleh ...

**F-P. DEMOKRAT (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Saya interupsi ini, Pak JB ini.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Benny, silakan.

**F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):**

Harusnya *enggak* boleh interupsi, Pak, tunggu saya selesai dulu.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

*Enggak* bisa, karena sebut nama saya, ini penting.

**F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):**

Ya, tadi Bapak *nyebut* nama saya, saya *enggak* interupsi. Jadi, tunggu saya selesai dulu, tunggu saya selesai dulu, Pak Benny. Saya ini kan melanjutkan tadi yang Bapak sampaikan. Kita ini mendukung. Jadi, tunggu saya dulu selesai. Pak Benny sabar dulu.

**KETUA RAPAT:**

Baik, baik, lanjut, silakan.

**F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):**

Bagaimana, Pak Benny setuju?

**KETUA RAPAT:**

Ya, sudah, lanjut-lanjut.



**F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):**

Setuju, Pak Benny, ya.

Jadi, sebenarnya saya apa... mendukung juga. Saya kaget tadi dengan informasi itu karena saya *enggak* pernah mendengar soal informasi itu. Ini dimonitor oleh seluruh rakyat Indonesia, ya. Jadi, jangan sampai KPK sudah *quote and quote* bermain politik kalau sudah begitu. Ada Direktur Penuntutan yang kemudian mundur, ya, karena tidak sepakat dengan apa yang sudah ditentukan di lembaga KPK.

Setahu saya, dulu mekanismenya ketat betul, ya, untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka, begitu. Ini tentu saya ingin juga meminta penjelasan, meskipun sekali lagi, saya belum pernah mendengar isu itu. Tapi, ini mengagetkan saya, *kok*, sampai segitunya, gitu ya. Apa benar, *gitu*.

*Nah*, ini perlu juga dijawab oleh Pimpinan KPK, ya, secara terang, *gitu*, sehingga semua paham dan tahu betul apa benar itu terjadi.

Yang terakhir, ini yang terakhir, benar-benar terakhir. Dulu... apa namanya... di awal-awal KPK berdiri sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 19/2019. Dulu kajiannya sudah ada, Pak Ketua, mengenai kantor cabang KPK di provinsi.

Saya kira itu perlu... apa... digaungkan lagi dalam rangka mendukung kerja-kerja KPK karena SDM KPK sangat terbatas, sementara ruang lingkup yang dikerjakan KPK begitu luas. Dulu, Pak Karyoto, waktu di awal itu, mungkin masih ingat, kita pernah mengusulkan, maksud saya, KPK pernah mengusulkan agar ada kantor perwakilan KPK. Waktu itu masih dipersempit fungsi-fungsi pencegahan, tetapi menurut saya sekaranglah momentum di mana ada perubahan undang-undang menjadi 19/2019 karena itu KPK harus diberi... apa... ruang untuk lebih... apa namanya... bisa masuk ke semua wilayah di seluruh Indonesia.

Saya kira kalau sekarang KPK yang mengusulkan, Pak Firli, Presiden dan juga DPR, Komisi III pasti langsung tutup mata, setuju, menurut saya. Ini pendapat pribadi ya. Ini bukan pendapat fraksi, tapi ini pendapat pribadi, Pak Ketua, pribadi saya. saya Johan Budi SP, Nomor Anggota A-219, ini bukan pendapat fraksi, sekali lagi ini pendapat pribadi yang menginginkan KPK kuat, ya, ke depan ini dan ini momentum yang pas, menurut saya, KPK untuk mengusulkan kantor cabang, ya, di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga, fungsi pencegahan dan penindakan, kemudian pendidikannya juga, termasuk juga supervisi, ya, tadi disampaikan itu bisa menyebar ke seluruh wilayah Republik ini.

Saya kira itu dan saya sampai hari ini masih meyakini bahwa KPK harus melakukan penindakan dan pencegahan secara simultan dengan kecepatan yang sama. Terima kasih, saya tutup.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Silakan, Pak Benny.

**KETUA RAPAT:**

Pak Benny ada yang mau di... silakan.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Nah, begini, Pak Ketua. Kita kan, kita kan tidak boleh saling menanggapi, tetapi karena yang terhormat tadi menanggapi dan membuat *judgement* terhadap saya, saya rasa saya punya hak untuk memberikan klarifikasi.

Pak JB, yang saat ini saya senang sudah pakai baju seperti saya. Ya, saya tadi ini, ya, memang cocok Beliau ini, Pak Ketua KPK, sebetulnya memang cocok dia di biru ya. Saya tadi mohon sama Pak Ketua Komisi, kalau bisa berkenan, Pak Johan Budi, untuk hal-hal tertentu, ikut kami saja dulu. *Nah*, ikut kami dan ternyata dilaksanakan betul sama beliau tadi, dilaksanakan.

Jadi, saya tidak ada maksud untuk menutup-menutupi. Kalau Pak Johan Budi mengatakan keberanian saya setengah-setengah, sebetulnya tidak. Apa yang tadi saya sampaikan itu sudah jelas, penjelasan sebelumnya. Jadi, siapapun sudah mengetahui bahwa yang disebut-sebut tadi, Direktur Penuntutan KPK itu meminta *resign* karena ini menurut versi cerita yang *enggak* jelas ujung pangkalnya, karena dia dipaksa atau menolak untuk menaikkan status Anies Baswedan jadi tersangka, kan begitu.

Ini kan, kalau *enggak* ada penjelasan tuntas, seolah-olah benar. Maka, tadi saya sampaikan, saya harus mencoba untuk bangkit lagi keberanian ini, yang sebetulnya, Pak Ketua, sudah lama saya... sudah... ya, ini anak-anak mudalah, saya ini kan sudah uban, saya ini. Saya masuk di Komisi III belum uban rambut ini.

Tapi, saya lihat yang mudah-muda pun *ndak* berani ya. Apa boleh buatlah, kita yang sudah ini juga ya, keberanian, tapi memang setengah-setengah. Tapi, Beliau minta saya jangan tanggung. Ya, sudah, saya sebut saja sekalian, itu maksud. Dan, terima kasih banyak, Mas Johan mendukung. Dia sudah tahu, tapi pura-pura *enggak* tahu. Inilah susah politisi ini, ini dia. Jadi, terima kasih banyak atas perkenannya.

**KETUA RAPAT:**

Baik. Ternyata masih ada dua penanya lagi, Pak Firli.

Silakan, Andi Rio.

**F-P. GOLKAR (ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH., M.Kn.):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Pak Ketua KPK yang saya hormati beserta jajaran,**

Kami ringkas saja, Pak. Intinya, kami mengapresiasi kinerja dan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK dan seluruh jajarannya dalam pemberantasan korupsi selama ini, khususnya di tahun 2022 ini. Namun, ada beberapa hal yang masih menyisakan pertanyaan publik, utamanya pengungkapan kasus-kasus besar yang mandek di KPK. Ini menunjukkan ketidakberdayaan KPK dan menimbulkan kesan analisis-analisis kecurigaan publik bahwa KPK tidak mampu, itu yang kedua, yang pertama.

Yang kedua, survei Kompas kemarin menyebutkan bahwa 45% masyarakat mengaku tidak puas dengan KPK. Kami minta ini ditingkatkan, Pak Ketua, dan bagaimana strategi dan upaya yang Bapak lakukan ke depan untuk menjawab survei-survei yang menyebutkan kinerja KPK semakin buruk. Mohon penjelasan dan pengungkapan kasus-kasus KPK agar publik juga tercerahkan bahwa sebetulnya KPK ini betul-betul bekerja walaupun terlihat senyap.

Sekian, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

Yang terakhir, Ahmad Dimiyati, silakan.

**F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):**

Terima kasih, Pimpinan, Pak Ketua.

Pak Bambang Pacul, Pak Pangeran, beserta Anggota Komisi III yang saya hormati,

Pimpinan, Ketua KPK, dan Pimpinan KPK serta para pejabat utama, para deputi dan jajarannya yang saya banggakan,

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pertama, saya apresiasi dulu untuk KPK, yaitu terkait dengan penyerapan anggaran tahun 2022 ini mencapai 97%. Kalau saya baca ini, 97% dari anggaran 1,303 triliun itu besarnya di belanja pegawai. Belanja pegawai mencapai 677 sekian. *Nah*, ini, Pak Sekjen ini yang memang tanggung jawabnya sangat berat dibandingkan para deputi yang ada yang lain.

Terus, yang berikutnya, adalah anggaran di 2023 turun malah menjadi 1.267. Saya, bagaimana ini dengan anggaran yang turun ini cara

mengelolanya, apalagi dikaitkan dengan tingkat persepsi *indeks corruption perception* atau *corruption perception index* ya, supaya ukuran persepsi dari peringkat 90 ke level 110. Ini yang memang harus kita perjuangkan bersama agar anggaran KPK ini minimal samalah dengan 2022, 2022 saja sudah minim sekali.

Terus, yang kedua, adalah kami apresiasi terkait dengan PNBP, Pak Firli. Jendral ini sangat hebat sekali, 2021, 246,3 dari target 100,9. Apa targetnya terlalu kecil ini, Pak? Tapi, kami apresiasi, Pak, mencapai 244%. Jarang mencapai seperti ini, Pak, targetnya kecil hasilnya maksimal.

Dua ribu dua dua mencapai 439,7 miliar dari target 141,7 miliar. Ini 210,30%. Ini juga kami apresiasi. Dan, yang saya tanyakan, bagaimana pembagian PNBP ini di Kementerian Keuangan, apakah potong dua atau semuanya diambil KPK atau seperti apa, Pak Gufron?

Terus, yang kami tanyakan beberapa hal adalah ini kalau KPK dengan polisi itu tugasnya sama-sama 3M. Ini kan Pak Firli jenderal polisi ini, sama-sama 3M, Pak. Kalau polisi, M-nya yang pertama, melayani; yang kedua, melindungi; yang ketiga, mengayomi.

Kalau KPK, memahami, mencegah, dan memberantas korupsi. *Nah*, ini yang saya rasa ini sangat bagus sekali. *Nah*, kalau kita lihat pada hal memahami, mencegah, dan memberantas sampai dengan saat ini, saya hanya melihat upaya-upaya KPK melakukan tindakan pemberantasan. *Preventif better than cure*, Pak. Saya enggak tahu, ya, caranya bagaimana. Lebih baik pencegahan dulu dilakukan, penginformasian, baru melakukan hal-hal apabila dalam pencegahan atau melakukan... ini, kan, sudah bagus dilakukan desa... apa... antikorupsi misalnya. Itu sangat bagus sekali, Pak, yang dilakukan oleh KPK saat ini.

*Nah*, kalau sudah melakukan pencegahan, saya lihat Singapura lah salah satu contoh. Singapura itu memberikan budaya yang begitu melakukan pencegahan-pencegahan sejak dini. Jadi, bukan melakukan kalau orang mau melakukan... apa... hal-hal mengumpat, *gitu*, terus ditangkap. *Nah*, itu yang menurut saya *enggak* elok.

Kalau bisa, ya, jalan itu, *traffic* itu, ya, dikasih tahu, ini salah, ini ke sini yang benar. Jangan dia biar salah *enggak* apa-apa, nanti kami tangkap begitu. *Nah*, ini saya rasa hal-hal yang harus sudah mulai dilakukan preventif tadi dan melakukan pembinaan terhadap daerah-daerah maupun pembinaan terhadap lembaga-lembaga yang ada.

Terus, yang berikutnya, Pak Firli, tahun 2022 sampai 2024 adalah tahun pondasi Trisula. *Nah*, apa yang dimaksud dengan *plotting* dan *proof of concept* pendekatan Trisula itu. Jadi, saya ingin mengetahui di mana *plotting* yang akan dilakukan, terus juga bagaimana upaya KPK meningkatkan sosialisasi program KPK itu sendiri.

Terus, selama ini KPK memasang target angka empat untuk indeks perilaku anti korupsi (IPAK) yang bapak sampaikan tadi. Dari angka maksimum lima, sementara realisasi IPAK hanya angka tiga. Bagaimana *nih* realisasi untuk menaikkan IPAK itu, Pak?

Terus, yang berikutnya adalah terkait DPO, Pak. Ini kan banyak sekali DPO. DPO ini kan sampai dibahas oleh Bapak Presiden kita. Apa yang dilakukan KPK untuk menangkap para DPO itu, Pak?

Terus, juga, terkait Stranas KPK per Desember 2022 sebesar 61,6%. *Nah*, saya ingin tahu renstra dan target itu bisa tercapai itu implementasinya seperti apa?

*Nah*, itu beberapa hal yang saya sampaikan, Pak Ketua. Mudah-mudahan KPK ini, jujur saja, masih kita percaya sebagai lembaga yang punya integritas dan dengan anggaran yang minim mudah-mudahan bisa maksimal hasilnya. Saya berharap betul-betul semua semangat untuk memperjuangkan supaya *indeks corruption perception* itu bisa... bisa betul-betul kita lebih baik lagi ke depan.

Demikian ketua, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Mas Bambang.

**F-PDIP/KETUA KOMISI III (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):**

Izin, paling pendek saja.

Saya mendengarkan dari awal hingga akhir para kawan-kawan dalam memahami, mendalami dan bertanya. Saya akan memberikan catatan, yang pertama, pertanyaannya Pak Ichsan. Pak Ichsan berbicara soal Lukas Enembe, kasus Lukas Enembe. Kemudian pertanyaan senior Benny K Harman nomor 2, Beliau menanyakan bagaimana sebuah proses KPK melakukan penyelidikan. Tadi disebutkan apakah itu dari pemeriksaan BPK atau dari pengawasan, dan lain-lain, dua hal.

Yang ketiga, kasus Lukas Enembe itu terjadi di Papua. Itu Papua adalah wilayah khusus maka dananya juga otsus, provinsinya diperbanyak juga oke semua. Jadi, itu wilayah perlakuannya khusus itu Papua sama Aceh. *Nah*, di Papua paling tinggi soal keamanan, sehingga Lukas Enembe, kasusnya punya rating yang tinggi untuk dijelaskan.

*Nah*, saya sebagai politisi, apakah Pimpinan KPK politisi? Jawab saya, ya, pejabat publik karena Pak Firli beserta empat Pimpinan KPK adalah *political appointy* dari jabatan politik, dari jabatan elektoral.

*Nah*, sebagai *politician*, saya dulu diajari sama guru saya. Kalau kamu sebagai politisi, dua saja yang kamu katakan. Mulut kau itu harus kau asuransikan, sehingga saya mohon maaf suara saya hilang. Jadi, *parle* itu bicara, mulutmu yang harus kau asuransikan. Suaramu itu kau asuransikan.

*Nah*, bagaimana seorang politisi bersuara? Guru saya menyatakan, dia pakai bahasa Inggris, mudah-mudahan tidak salah, "*Talk it out or shoot at all*". Jadi, "*You* bicara sampai tuntas atau *you* tembak sampai ke luar, sampai mati," itu kata guru saya. Jadi, kasus Lukas Enembe ini, mohon izin, Pak Ketua KPK, mohon dijelaskan sampai tuntas dari awal sampai hari ini. Itu namanya *talk it out*. Dengan demikian publik akan *clear* terhadap ini. Ini juga akan *clear* BPK, ini juga akan *clear* KPK, ini juga *clear* terhadap pertanyaan nomor 2 dari Mr. Kabur K. Harman dan Mr. Ichsan Soelistyo.

Itu hanya catatan saya saja. Mohon izin, kalau diizinkan ini contoh kasus yang sangat baik, *the example* ... (suara tidak jelas) yang sangat bagus ya. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia,

Banyak sekali pertanyaannya, Pak Firli, oleh kawan-kawan tadi. Kami persilakan Pak Firli untuk menjawabnya.

#### **KETUA KPK RI:**

Terima kasih kepada Pimpinan Komisi III DPR RI.

**Ketua, Wakil Ketua, dan segenap Anggota Komisi III DPR RI,  
Rekan-rekan Pimpinan yang saya hormati,  
Pejabat struktural KPK saya hormati,**

Sebelum saya memberikan jawaban, saya harus sampaikan bahwa nanti pastilah ada tambahan dari rekan-rekan Pimpinan yang lain. Dan, tentu juga saya harus sampaikan juga, apa pun nanti yang jawaban saya, pastilah tidak akan menimbulkan dan menjawab semua pertanyaan. Tetapi, setidaknya dapat memberikan masukan ataupun informasi resmi dari KPK supaya tidak ada informasi lain, kecuali yang berasal dari KPK.

Saya akan mulai satu persatu. Saya sudah coba catat apa yang disampaikan, setidaknya ada 15 yang menyampaikan respons. Namun, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu, marilah kita menundukkan kepala karena saudara-saudara kita di Papua hari ini mengalami gempa bumi walaupun skalanya 5,4 skala richter. Tapi, itu menjadi bagian perhatian kita semua.

Posisi gempanya 9 km barat daya kota Jayapura. Terjadi tadi 13:28:02 WIB. Itu informasi, mudah-mudahan kita berharap bencana ini akan selesai

dan tidak menimbulkan korban bagi warga kita saudara kita yang ada di Papua.

Selanjutnya, perkenankan saya untuk menyampaikan respons atas beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama, saya akan mulai ini dulu, merespons atas yang disampaikan oleh Saudara Pak Hinca Pandjaitan.

Saya tentu melihat dan mengikuti apa yang dimandatkan di dalam tugas pokok KPK. Tugas pokok KPK disebutkan dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan f, sehingga sebenarnya enam tugas pokok itu kita bagi menjadi empat kedeputian. Pasal 6a dan huruf c itu kita jadikan satu, yaitu kedeputian pencegahan dan monitoring. Kalaupun ada saran harus dipisahkan, tentu nanti kami akan lakukan kajian dan disampaikan telaahan maupun naskah akademiknya, Pak, itu yang pertama.

Yang kedua, tadi juga Bapak menyampaikan terkait dengan perkembangan korupsi yang memang sampai hari ini tentulah kita harus bersiap bagaimana bentuk-bentuk korupsi ke depan. Dalam beberapa literatur yang kami baca, setidaknya ada tiga tahapan perkembangan korupsi.

Yang pertama, yang kita kenal dengan *pre-modern corruption* atau korupsi dengan melibatkan uang-uang kecil atau dengan uang receh dan itu bentuk-bentuknya sederhana yaitu suap dan gratifikasi. Yang kedua, nanti akan berkembang kepada tahapan *modern corruption*. Ini adalah salah satu korupsi yang dikemas di dalam bentuk pembuatan dan penyusunan kebijakan.

Dari awal itu muncul dan niat untuk melakukan kegiatan korupsi. Karena KPK menghadapi hal tersebut, KPK sudah mengembangkan apa yang disebut dengan *corruption risk assessment* (CRA). Itu yang kita kembangkan sekarang sehingga kita akan bekerja sama bersama-sama dengan kementerian/lembaga untuk melihat apakah regulasi yang dibuat itu membuka peluang terjadinya korupsi dan bagaimana juga implementasinya, apakah ada terjadinya korupsi?

Kalau itu yang terjadi maka kita akan berikan saran dan rekomendasi yang harus dilaksanakan untuk perbaikan. Karena, sesungguhnya sistem yang baik adalah menutup segala peluang dan celah terjadinya korupsi. Kita sadar bahwa korupsi itu muncul salah satunya karena sistem, *corruption because of feel bad or with system*.

Yang selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan terkait dengan tadi ada yang menyampaikan tentang tugas pokok KPK. Kami ingin menyampaikan bahwa sekali lagi memang KPK itu ada dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Tadi ini disampaikan oleh Bapak Supriansa dari Fraksi Golkar. Dan, KPK dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut maka KPK melaksanakan strategi pemberantasan korupsi dengan tiga pendekatan.

Pendidikan masyarakat dalam rangka memberikan pemahaman kesadaran sehingga tidak ingin melakukan korupsi. Yang kedua, melakukan

pengecahan dengan cara perbaikan sistem supaya tidak terjadi peluang ataupun celah terjadinya korupsi. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan penindakan dan rangka menimbulkan efek jera dan juga tentu pengembalian kerugian negara.

**Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati,**

Kami juga ingin sampaikan bahwa pada beberapa pertanyaan tadi ada yang kita juga menyinggung terkait dengan korupsi di bidang dunia pendidikan. Ini pun tidak lepas dari perhatian kami. Tadi disampaikan oleh Pak Taufik Basari, kalau tidak salah. Dalam rangka mengatasi ataupun mencegah korupsi di dunia pendidikan maka KPK sesungguhnya sudah membentuk yang dikenal dengan istilah Sistem Integritas Pendidikan.

Bahkan, beberapa kali kita melakukan seminar, FGD dengan beberapa ahli perguruan tinggi di dalam rangka mewujudkan sistem integritas ekosistem pendidikan. Dan, tolok ukur yang sudah kita buat, kita ingin melihat sejauh mana integritas dunia pendidikan kita. Sesungguhnya KPK sudah melakukan itu. Dan, hari ini memang belum kami *launching*, Pak, integritas dunia pendidikan kita pada angka 72 dari skala 0 sampai 100.

**Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati,**

Selanjutnya, kami juga ingin menjelaskan terkait dengan blokir. KPK tidak pernah melakukan pemblokiran terhadap rekening pemerintah daerah, khususnya Papua. Yang dilakukan pemblokiran adalah rekening terkait dengan milik tersangka atau milik para pihak yang terkait dengan perkara korupsi yang sedang ditangani.

Penegakan hukum kita lakukan secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi azas manusia. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Komisi III, bagaimana terkait dengan Lukas Enembe. Penanganan perkara Lukas Enembe, kita memang menghadapi suatu kendala yang cukup besar. Kendala bukan tentang penegakan hukumnya, tetapi setidaknya dalam penegakan hukum, penyelesaian perkara Lukas Enembe setidaknya ada empat hal yang perlu kita perhatikan.

Satu, penegakan hukum secara profesional. Yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin keselamatan jiwa seseorang karena sesungguhnya menyelamatkan jiwa adalah hukum tertinggi, "*salus populi suprema lex esto*". Dan, KPK juga sangat menjamin dan ingin menjaga Papua dalam keadaan aman, nyaman, dan damai karena sesungguhnya itulah sejatinya pendekatan hukum.

Bukankah penegakan hukum tersebut adalah tidak boleh melanggar hukum itu sendiri. Jadi, kami pastikan bahwa KPK bebas dari kepentingan politik dan KPK tidak ada kepentingan politik apa pun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang 19/2019 disebutkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun



kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tidak tunduk kepada kekuasaan manapun.

Selanjutnya, kami ingin sampaikan juga bahwa KPK tetap bekerja sebagaimana ketentuan undang-undang dalam hukum. KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang, kecuali seseorang tersebut adalah karena perbuatannya dan/atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, kami pastikan tidak ada seorang pun yang menjadi tersangka tanpa bukti yang cukup.

**Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati,**

Tadi ada juga menyampaikan terkait dengan satgas Tata Kelola Dana Khusus dan Keistimewaan. Tentu saran ini kami tangkap dan kami akan kaji karena sesungguhnya organisasi tata kerja KPK sudah disusun berdasarkan Peraturan Komisi KPK Nomor 7 Tahun 2020, tapi ini bisa kita lakukan perbaikan, sebagaimana nanti setelah ada kajian dan naskah akademiknya.

Begitu juga tadi ada yang menyampaikan terkait dengan keberadaan kantor-kantor perwakilan KPK yang ada di daerah. Memang kita melihat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, disebutkan dalam Pasal 19, bahwa sesungguhnya KPK dapat membentuk perwakilan KPK di provinsi-provinsi.

Tapi, mohon maaf sekali lagi, itu tidak bisa kita wujudkan karena setelah Undang-Undang Nomor 19/2019, pasal 19 tersebut dicabut dan diamanatkan di dalam salah satu pasal Undang-Undang 19/2019 mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara. Jadi, kami pun siap-siap untuk pindah ke Kalimantan karena sudah ada pemberitahuan yang akan berangkat duluan adalah pertama Ketua KPK, Sekretariat Jenderal, Kedeputusan Korsup dan Kedeputusan Pencegahan.

**Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati,**

Jadi, Pak Sekjen, ini ya, Pak Didi, Pak Cahaya, Pak Pahala. Ya saya senang saja pindah, Pak. Karena apa, karena bersama-sama Pak Pahala, Pak. Karena Pak Pahala ini nanti yang akan memberikan keselamatan kita, baik dunia maupun akhirat. Orang yang paling setia adalah pahala. Terkadang kita tidak setia dengan orang yang akan setia kepada kita.

**Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati,**

Kami juga ingin merespons terkait dengan desa antikorupsi. Sesungguhnya desa antikorupsi ini, Pak, diilhami dengan suatu data. Data empiris menyebutkan bahwa dari sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 terdapat 601 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan perangkat desa dan sebanyak 686 orang sudah masuk kasus hukum karena di perangkat desa karena penyalahgunaan keuangan dan anggaran desa.

Bertitik tolak dengan itu, kami juga melihat bahwa anggaran desa yang sudah dikucurkan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 sebesar

400,1 triliun dan khusus tahun 2022 kurang lebih 72 triliun, dan tahun 2023 kurang lebih 72 triliun. Angka ini cukup besar karenanya KPK terpanggil untuk melakukan desa antikorupsi. Berawal dari desa, kita wujudkan Indonesia bebas dari korupsi.

Program desa antikorupsi ini terus akan dikembangkan. Sebagai laporan kami sampaikan bahwa tahun 2021 diawali dengan pembentukan desa antikorupsi Desa Panggung Harjo, Jogja, sebagai percontohan dan peluncuran Program Desa Anti Korupsi. Tahun 2022 dilakukan pencanangan 10 desa di 10 provinsi dan tahun 2023 ini akan dilakukan pembentukan 22 desa dari 22 provinsi dan tahun 2024-2025 setiap provinsi membuat replika desa antikorupsi.

Kami juga ingin berterima kasih kepada beberapa gubernur yang telah menginisiasi dan menggagas di setiap kabupaten ada desa antikorupsi. Saya tidak mau nyebut, nanti dikira kampanye lagi. Ya, silakan cari sendiri datanya, pemerintah daerah mana.

Yang selanjutnya, di tahun 2026 diharapkan setiap kabupaten membuat setiap kecamatan satu desa percontohan desa antikorupsi. Jadi, tadi ada yang menyampaikan ke kami, ini programnya berlanjut, tidak berhenti sampai dengan sekarang saja karena ini masuk dalam *roadmap* pemberantasan korupsi dan masuk juga dalam rencana strategi pemberantasan korupsi tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati,

Tadi saya menangkap monitor dana desa. Sesungguhnya kami laporkan dalam forum ini tata kelola pemerintah desa dan keuangan desa. Sesungguhnya desa antikorupsi ini disasarkan kepada: satu, membantu aparat desa dalam rangka penyusunan program desa; kedua, membantu perangkat desa melalui pendidikan pelatihan dalam rangka pelaksanaan program dan penyerapan anggaran desa, termasuk juga kegiatan serta membuat pertanggungjawaban keuangan secara transparansi dan akuntabilitas. Inilah niat kita supaya kepala desa tidak terjebak dengan praktek-praktek korupsi. Mudah-mudahan berhasil.

Yang selanjutnya, juga desa antikorupsi kita sasarkan kepada pelayanan publik di desa semakin lebih baik.

Yang berikutnya, nanti penindakan ini ada, khususnya dari Pak Benny K. Harman tadi disampaikan. Yang perlu saya sampaikan nanti, yang pertama, adalah lembaga KPK adalah lembaga dalam rumpun eksekutif dan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tidak tunduk kepada kekuasaan manapun.

Namun, demikian, kami sadari bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh seorang diri, oleh hanya KPK. Karenanya, kami itu sejak tahun 2021 yang lalu mengembangkan konsep yang kita kenalkan dengan Orkestrasi Pemberantasan Korupsi dengan melibatkan seluruh kekuasaan:

kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk juga kekuasaan partai politik.

Kekuasaan partai politik kami ajak karena ada lima peran penting partai politik. Pertama, partai politik itu adalah mengemban amanah rakyat. Kedua, partai politik itu menguasai suara rakyat. Partai politik menentukan wakil rakyat. Partai politik menentukan pemimpin rakyat, dan yang terakhir adalah partai politik melalui keterwakilannya di legislatif menyusun berbagai rupa perundang-undangan maupun peraturan daerah. Itulah sejatinya kami mengajak partai politik dalam pendidikan cerdas dan berintegritas, bukan masuk dalam ranah politik.

Dan, kami juga di dalam pendidikan partai politik cerdas dan berintegritas ini akan kita lanjutkan, Bapak. Tahun ini ada enam partai politik baru sebagai peserta pemilu 2024 yang akan kita mulai tanggal 20 Februari 2023. Ada lima partai nasional dan satu partai daerah. Selanjutnya, kita juga akan mengajak kurang lebih 16 pejabat gubernur karena 9 sudah kita lakukan, 16 yang terbaru nanti akan kita lakukan, ditambah dengan 4 pejabat gubernur provinsi baru, dan ada 248 bupati/walikota yang akan kita ikutkan dalam pendidikan paku integritas dan pendidikan cerdas berintegritas.

### **Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati,**

Menjawab pertanyaan tadi ada... ini nanti ada ditambahkan oleh rekan-rekan lain, tapi secara garis besar saya harus sampaikan. Perkara yang dilakukan supervisi KPK sebanyak 88, Pak. Dari 88 itu, 39 sudah selesai, 2 di antaranya diambil alih dari daerah. Salah satu perkara yang diambil alih, Pak, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Satu lagi adalah dari Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi, itu perkara-perkara yang kita ambil alih.

Selanjutnya, silakan nanti kawan-kawan melengkapi.

Terakhir, terkait dengan penjelasan direktur penuntutan kembali. Kebetulan tanggal 1 Februari kemarin, Pak, kita lepas yang bersangkutan. Saya catat angkanya, saya untung, saya masih ingat. Fitroh Rohcahyanto itu masuk ke KPK tanggal 11 September 2011, Pak. Terus tanggal 16 September 2020 diangkat sebagai direktur, 2019, 2020 diangkat sebagai Direktur Penuntutan.

Yang bersangkutan sudah mengabdikan di KPK 11 tahun 4 bulan 21 hari dan yang bersangkutan juga pernah menyampaikan kepada Sekjen untuk meminta kembali ke kejaksaan karena untuk berkarir di kejaksaan. Bapak bisa bayangkan, Pak, 11 tahun di KPK. Untung dia bisa dapat direktur. Banyak, Pak, orang belasan tahun di KPK tidak punya jabatan apa-apa dan terhambat pendidikannya. Pak Johan Budi Pak saya tahu persis.

Ini kita buka, Pak. Tidak ada lagi orang yang di KPK sekarang tidak sekolah, Pak. Diklat Pim 2 kita buka, Diklat Pim 1 kita buka, semuanya. Dan, itu kita fasilitasi, karena apa, untuk kepentingan yang bersangkutan. Jadi, saya pastikan bahwa yang bersangkutan bukan karena tidak setuju dengan

penanganan perkara. Jadi, yang bersangkutan kembali dalam rangka karirnya dan saya kira ini sudah disampaikan oleh juru bicara KPK Pak Ali Fikri beberapa waktu yang lalu.

Selanjutnya, tadi ada lagi terkait dengan....

**F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):**

Interupsi, Pimpinan.

Sebelum Pak Firli melanjutkan, apa boleh saya interupsi?

**KETUA RAPAT:**

Oke, boleh, silakan.

**F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):**

Baik.

Pak Ketua Firli, saya lega, Pak, dengan jawaban Bapak barusan karena saya alumni KPK dan saya tahu betul bahwa proses itu melalui mekanisme yang *clear*, begitu. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya lega saja, Pak, Bapak jawab itu.

Terima kasih.

**KETUA KPK RI:**

Terima kasih, Pak.

Selanjutnya, terkait dengan keberadaan Dewas. Mohon maaf kami hanya menyampaikan bagaimana keberadaan Dewas dan hubungan kerja dengan KPK. Tugas dewas itu tercantum di dalam Pasal 37 Undang-Undang 19/2019. Salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok KPK. Jadi, KPK sekarang, Pak, diawasi Pak oleh Dewas. Jadi, wajar kalau dulu banyak orang enggak suka dengan Dewas, Pak, karena akan diawasi.

Tapi, hari ini, Pak, kami sangat-sangat terbantulah oleh Dewas. Kenapa? Karena tidak ada kekuasaan tidak bisa diawasi. Saya tidak ingin menyebutkan itu, tetapi yang pasti kita butuh pengawasan, itu yang pertama.

Yang kedua, Pak, tugas dewas adalah melakukan evaluasi kinerja Pimpinan KPK. Untuk itu, pelaksanaannya adalah rapat tinjauan evaluasi kinerja KPK dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan kami membuat nilai, bukan kami yang membuat, Pak, dewan pengawas yang membuat.

Kalau tidak ada Dewas, Pak, apa yang kita lakukan itu kita anggap pasti benar semua sekalipun keliru, tapi hari ini, Pak, kita tidak bisa lagi seperti itu.

Yang berikutnya, saya ingin meluruskan dengan Pak Benny. Dewan pengawas sekarang tidak ada lagi kewenangan untuk memberikan izin. Kami juga tidak ada kewajiban untuk meminta izin, baik izin penggeledahan, izin penyadapan, izin penyitaan sudah *enggak* ada, Pak. Semuanya ada di Pimpinan dan itu kita bangun dengan sistem. Menyadap tidak bisa lagi sendiri-sendiri, Pak, karena semua Pimpinan harus menyatakan *approve*.

Yang berikutnya adalah rapat pengawasan KPK, ini dilakukan setiap tiga bulan sekali. Bahkan, bisa juga dilakukan rapat pengawasan secara insidentil, seketika, tiga bulan sekali secara berkala, tapi bisa saja secara insidentil tergantung kepentingan pengawasan.

Yang berikutnya, tadi kerja sama KPK dan APIP. Saya ingin sampaikan, Pak Wayan Sudiarta, kerjasama KPK dengan APIP itu masuk dalam satu program yang kita kenal dengan *monitor center for prevention* di segala penguatan dan pengawasan aparaturnya pemerintah, aparaturnya pengawas internal pemerintah itu sudah masuk, Pak. Jadi, apa yang tadi Bapak sampaikan sudah kita masukkan itu, Pak.

Selanjutnya, mungkin yang terakhir, apa yang dimaksud dengan *piloting trisula*, tadi yang disampaikan oleh Pak Dimiyati. *Piloting Trisula* ini, Pak, dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan itu adalah bentuk kolaborasi dan kerjasama secara integrasi. Seketika, penindakan, menemukan operandi tindak pidana korupsi maka itu juga akan disampaikan hasilnya kepada Kedepuitan Pencegahan supaya untuk melakukan pencegahan di sektor lain dan kementerian/lembaga yang lainnya. Begitu juga itu disampaikan kepada Kedepuitan Pendidikan Masyarakat dalam rangka bahan ajaran untuk pendidikan budaya antikorupsi. Itulah yang kita sampaikan *Piloting Program Trisula*.

Selanjutnya, tadi bapak sampaikan tentang DPO, Pak. Saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, DPO semula selama KPK berdiri sebanyak 21 orang. Sudah tertangkap 17 orang. Sampai saat ini yang belum tertangkap ada 4 orang. Terakhir yang kita tangkap adalah tersangka IA, tadi Pak Nasir Djamil menyampaikan kepada saya.

IA yang kita tangkap di Banda Aceh kemarin itu pun kita kerjasama karena sesungguhnya, Pak, tidak ada orang sukses karena sendiri, *no one can get success without others*. Pastilah memerlukan orang lain. Empat tersangka yang DPO, satu, KK; dua, PT, sekarang sudah berubah nama TTP. Kalau ingin panjang, nanti WA saya, siapa saja itu namanya. Tiga, HM; empat, RHP. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan.

Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan Pimpinan untuk melengkapi di bidang pendidikan masyarakat.

Pendidikan masyarakat saya sendiri, Pak.

Deputi Pencegahan bidang Pencegahan Pak Gufron, INDA, Pak Alex, Pak Johannes Tanak di bidang penindakan, Pak Nawawi di bidang koordinasi supervisi.

Silakan melengkapi karena saya tahu apa yang tadi saya sampaikan pastilah ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Tapi, satu kata jangan pernah menjadi sempurna, seketika menjadi sempurna yang kita temukan adalah ketidaksempurnaan itu sendiri. Kita akan menemukan kesempurnaan seketika mampu menempatkan diri dan hati kita untuk menerima kekurangan orang lain.

Silakan dimulai siapa ya?

**KETUA RAPAT: (**

Melanjutkan dulu, Pak.  
Oke, lanjut. Lanjut Pak Gufron.

**DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN MONITORING KPK RI:**

Terima kasih.

Jadi, kami menambahkan beberapa pertanyaan, yang utamanya dari sisi pencegahan dan sisi konseptual. Misalnya, pertanyaan dari Pak Sudding tadi mempertanyakan konsep *ultimum remedium* yang menjadi pertanyaan dan mungkin ini adalah harus kita bahas bersama, apakah menggunakan prinsip *ultimum remedium* ataukah *primum remedium*. Itu menjadi perdebatan pembahasannya apakah itu penentuannya di proses legislasi ataukah di proses penegakan hukum.

Kami sebagai penegak hukum, selama tidak memiliki landasan untuk menggunakan apakah *primum* ataukah *ultimum remedium*, tentu kami menegakkan sesuai dengan norma yang sudah diundangkan oleh para pembentuk undang-undang. Sehingga, kalau misalnya menggunakan prinsip *ultimum*, artinya, proses administrasi lebih dahulu dan kalau tidak... tidak jera ataupun tidak... tidak berhenti, baru diproses, ditindak. Itu yang kami lakukan, Pak.

Tentu sebagai sebuah proses pencegahan, pencegahan kami lakukan sejak mulai dari proses sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan, baru kemudian perbaikan sistem, baru kemudian, kalau pun itu dilakukan, kalau sudah proses itu semua, tapi tetap volvoid, tetap melakukan tindak pidana dengan ditemukan dua alat bukti, tentu kami juga tidak mungkin tidak melakukan penindakan. Itu yang kami lakukan, Pak.

Kami masih belum memiliki konsep diversifikasi ataupun penyelesaian korupsi tanpa melalui penegakan hukum. *Nah*, ini yang mungkin itu semua adalah ranah dan kewenangan para pembentuk undang-undang, dalam hal ini Bapak-Ibu sekalian Anggota Dewan bersama pemerintah tentang apakah penggunaan *primum* ataupun *ultimum remedium*.

Jadi, selama ini kami tentu menggunakan strategi, pertama, pendidikan peran serta masyarakat. Harapannya supaya setiap penyelenggaraan negara maupun sampai kepada calon kader-kader penyelenggara negara, bahkan kepada siswa-siswa itu memiliki integritas.

Kemudian dari sisi pencegahan, kami mencegah agar sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya layanan publik dan pengelolaan keuangan negara dan aset itu tidak mungkin ataupun ketat untuk dilakukan korupsi. Baru kalau kemudian masih melakukan kejahatan korupsi baru kami lakukan penindakan. Itu yang kami lakukan, Pak.

Termasuk juga pertanyaan tadi bahwa SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan), sesungguhnya untuk sektor publik bahkan kami lakukan lebih awal lebih dahulu. Tadi ada pertanyaan dari Pak siapa tadi, dari Mas Heru Widodo, bahwa intinya SMAP ke sektor publik.

Ke sektor publik kami telah melakukan, yaitu adanya WBK dan WBM, Pak. Itu semula inisiasi dan pilotingnya dari KPK. Setelah jalan baru kami koordinasikan dengan Kemenpan RB untuk di-*scaling up*-nya kepada setiap kementerian/lembaga itu dari sektor, untuk sektor publiknya.

Baru ketika kami menilai bahwa tidak mungkin dari satu sisi saja, tapi juga perlu sisi dari sisi pengusahanya, sektor swasta ataupun perorangannya kami menggunakan SMAP ini untuk sektor dunia usaha. Itu yang kami lakukan kepada sektor dunia usaha.

Lantas, pertanyaan, bagaimana penentuan putusan ataupun menentukan apa yang diputuskan oleh oleh pimpinan kami berlima. Kami sadar bahwa KPK bukan Kepolisian Republik Indonesia, bukan Kejaksaan yang pimpinannya satu, oleh karena itu, kami berlima menggunakan Perkom 3 Nomor 2009, Pak. Bahwa setiap keputusan sejauh mungkin ditentukan menggunakan kesepakatan kami berlima. Tetapi walaupun tidak maka kami lakukan dengan voting, dengan 3 + 2, minimal begitu, Pak. Itu yang kami sudah ada peraturan komisi yang menentukan seperti itu, itu berkaitan dengan....

**PESERTA RAPAT:**

... (*suara tidak jelas 4:40:24*)

**F-P. DEMOKRAT (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Pak bisa *enggak* saya interupsi? Ini penting sebelum dilanjut, ini mengenai voting.

**KETUA RAPAT:**

Untuk Pak Benny, khusus ini, silakan.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Ini untuk untuk keselamatan kita semua, untuk rakyat Indonesia juga, untuk keadilan. Jadi, ini Pak Johan Budi, saya rasa masih bisa memberikan, ya, tapi ini menyebut dalam konteks positif. Beliau bisa memberikan testimoni.

Dalam dua periode KPK dulu, Pak Ketua, ini yang sering kita persoalkan karena kerja KPK itu basisnya adalah hukum, tidak bisa pakai voting. Menetapkan seseorang jadi TSK, syaratnya kan *cuman...* ya, kan *gitu*, Pak, tidak bisa basisnya adalah *voting*, kan begitu.

*Nah*, itu tadi, itu yang tadi saya bilang, Pak, mendingan kita *enggak* usah lagi nambah penjelasan. Penjelasan Pak Ketua itu sudah sangat komprehensif. Penjelasan Bapak ini, Beliau ini, Pak yang mengajukan *judicial review* ini, ini bikin kacau. Kan, begitu, Pak. Kasihan Pak...Pak Ketua kita ini.

Saya mengerti juga kenapa bikin begitu. Tapi, acuannya tetaplah hukum itu, *enggak* perlu... bila perlu, satu pun tidak masalah. Jadi, *enggak* bisa Pimpinan KPK menjelaskan pakai mekanisme politik. Ya, mohon maaf sajalah ya. Menurut saya itu saja ya. Kalau bisa kita... kita *closinglah* ...  
(rekaman tidak jelas 4:42:29)

Terima kasih banyak.

**KETUA RAPAT:**

Sepakat Pak Benny.  
Silakan, Pak Gufron lanjutkan.

**DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN MONITORING KPK RI:**

... (rekaman suara tidak jelas 4:42:34)

**KETUA RAPAT:**

Oke, baik, cukup silakan.  
Kami serahkan kepada Pak Firli siapa lagi.

**KETUA KPK:**

**Pimpinan Komisi III,**

Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan sudah lengkap. Tapi, saya mohon maaf, Pak, ada dua hal yang belum terjawab, di luar apa pertanyaan tadi. Satu adalah CPI; yang kedua, terkait dan penanganan Lukas Enembe.

Itu memang belum saya sampaikan tadi, Pak. Kalau seandainya Pimpinan Komisi membolehkan, kita akan sampaikan, tapi memang agak panjang. Tapi, aku coba ringkas-ringkas. Ringkas-ringkas, Pak, ya.



**KETUA RAPAT:**

Ringkas, Pak.

**KETUA KPK RI:**

Tapi saya kembalikan, Pak, karena saya hanya peserta ini, Pak. Kami tidak punya kewenangan apa pun.

**KETUA RAPAT:**

Boleh, Pak, singkat.

**F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):**

Interupsi, Pimpinan.

Saya kira kita tidak boleh membatasi-membatasi jawaban dari KPK. Tujuan kita di sini, Pak Benny, rapat adalah untuk mendengarkan secara *clear* dan lengkap, Pak Benny. Jadi, jangan distop-stop begitu Pimpinan. Biarkan Pak Firli menjelaskan secara tuntas. Apalagi tadi saya memberi saran belum dijawab *tuh*. Tolong saran saya tadi dijawab juga.

Terima kasih, Pak Ketua. Silakan, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Pak JB, *enggak*, Pak Firli sendiri yang mau menjelaskan secara singkat dan lugas.

Silakan, Pak Firli.

**KETUA KPK RI:**

Baik, terima kasih, Pak.

Ada dua hal, karena tadi saat kita awal sini memang Pak Arsul Sani sudah menyampaikan terkait dengan CPI. Saya juga tidak ingin menutup informasi itu, karenanya, yaitu izinkan kami untuk menyampaikan apa sebenarnya CPI itu.

Sebagai berikut, Pak. Kita mengikuti data yang sudah kita kumpulkan dari 2019, 2020, 2021, sampai dengan 2022. Dari 2019 sampai dengan 2021, komponen penilaian atau survei itu ada sembilan, Pak. Tapi, khusus tahun 2022 ini, Pak, satu komponen tidak dipakai, bahkan tidak dinilai, yaitu *wall economic forum*, yang angkanya, yang paling kanan, kiri, yang paling kanan kuning, itu selalu meningkat, Pak. Ini jadi pertanyaan kita juga, Pak, angka yang sering meningkat justru diabaikan tahun ini, Pak.

Selanjutnya, kita lihat, yang pertama, Pak, PRS International Control Risk Guide itu menunjukkan angka selalu turun, tidak pernah naik itu. Yang kedua, di kolom nomor 2, Pak, itu juga selalu turun. *Nah*, tahun depan bisa juga turun lagi, Pak.

Kalau komponen seperti ini, Pak, saya ingin menyampaikan fakta saja, Pak, data yang seperti ini. Yang mana yang naik, yang turun dulu. First Asian Risk Guide juga turun terus, Pak. Ini kami lihat, Pak, begitu... ya. jangan-jangan hanya KPK saja yang membaca ini, Pak, yang lain *enggak* baca juga, *gitu* kan. Memang urusan kita, katanya, begitu kan. *Nah*, kita baca, Pak, kenapa ini seperti ini datanya ini.

Yang berikut, yang naik itu ada dua, Pak, kolom 6 dan kolom 7. Walaupun angkanya naik, sedikit, tidak pernah naik di atas dua, Pak. Naik dua, turun satu, naik dua. Jadi, itu maju dua langkah, mundur satu langkah. Berarti, tetap di tempat.

*Nah*, yang terakhir, Pak, yang paling kanan, itu meningkat, tapi *enggak* pernah dipakai untuk tahun 2022, itu diabaikan, Pak, tidak dinilai. Jadi, kami mohon maaf, kami tidak mampu menjelaskan kenapa sesungguhnya seperti ini.

Pak Pahala itu pernah datang ke Berlin, *enggak* punya dapat penjelasan yang rinci apa komponennya, apa indikatornya, apa yang dinilai. Tapi, kami datakan lagi, Pak, sebagai pengingat kita saja. Sepuluh negara tertinggi, Pak, ini Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Norway.

Saya ingin ambil satu kalimat saja, Pak. Saya pernah bertemu, Pak, dengan Finlandia. Di Finlandia itu, Pak, jangankan pelaku korupsi, Pak, istilah korupsi saja tidak ada. Dia bilang, kami tidak pernah menemukan istilah korupsi itu. Kata-katanya saja tidak ada, Pak. *Enggak* pernah dia bilang karena memang tidak ada.

Ya, saya ini ada sepuluh besar. Sepuluh terendah dari 180 negara yang dinilai. *Nah*, ini nomor satu, Pak, Guinea Bissau. Ini salah satu negara yang sering dipakai pasportnya oleh warga negara Indonesia yang DPO. Yang tadinya saya bilang, Pak, TP jadi TTP itu. *Nah*, pakai paspor ini, Pak. Namanya sudah bukan lagi PT, Pak, sudah berubah, TTP.

Ini, Pak. Ini sepuluh negara yang terendah CPI-nya.

Berikutnya, kita lihat, Pak, Indonesia. Kita tidak bisa membandingkan dengan sesama ASEAN karena memang berbeda. Tapi, apa pun kita tidak bisa memilih, Pak, karena memang Indonesia itu berada di Asia. Dan, kita selalu menggunakan patokannya, bagaimana posisi Indonesia di negara Asia? Ya. ...

Brunei Darussalam, Pak, *enggak* ada nilai dan tidak dinilai. Kita *enggak* tahu, apakah dia rendah, tinggi, *enggak* tahu juga. Ini... ini informasi, Pak.

Selanjutnya, Pak, kami coba membandingkan negara-negara yang mirip dengan Indonesia. Kita ambil misalnya negara bridge, China, Afrika Selatan, India, Brazil, Indonesia, dan Rusia posisi seperti ini, Pak. Kita masuk juga, bandingkan dengan negara G20, posisi seperti ini. Jadi, kita, kami membandingkan lengkap, Pak, tidak hanya, hanya lihat tetangga mana, tetangga ini saja, *enggak*, kita lengkap.

Dari yang kita lihat, kita rumuskan, Pak. Kenapa tiga tadi yang turun? Bidang apa saja yang tiga turun itu. Barulah kita temukan, Pak, ada tiga hal.

Pertama, kalau kita baca, Pak, PRS International Country Risk Guide itu ada komponennya. Apa komponennya, persepsi korupsi dinilai oleh staf ICRG berdasarkan *risk assessment* terkait, satu, Suap pada perizinan, ekspor, perizinan impor, proses pemeriksaan pajak, perlindungan polisi, dan pinjaman atau *loans*. Kedua, ada hubungan antara illegal politik dengan bisnis, sistem kroni nepotisme, reservasi jabatan, imbal bantuan, dan pendanaan rahasia. Itu yang bisa kita ungkap. Lebih itu kita *enggak* bisa.

Yang berikutnya, AMB World Competitiveness Year Book. Ini adalah persepsi pebisnis terhadap suap dan korupsi. Pebisnis, kira-kira dia bermain suap kali ya. Ada *enggak* kira-kira pebisnis yang lepas dari suap, memberi suap maksudnya.

Dari IPAK tadi, Pak, kita bisa lihat IPAK kita 3,9 itu, satu, pemahaman terhadap korupsi; kedua, perilaku terhadap korupsi. Orang paham, Pak, kalau kasih uang itu suap. Dia juga paham, kalau kasih suap, itu korupsi. Tetapi, dia tidak berpengaruh, tetap saja dia lakukan. Alasannya macam-macam, satu, karena diminta; dua; karena kasihan; ketiga, saya memang butuh karena dipercepat. Jadi, *enggak* hilang ini, Pak, suap berupa gratifikasi, itu *enggak* hilang, walaupun kemudahan perizinan sudah ada ini.

Nomor 3, Pak, dari persepsi PERS Asia Risk Guide disebut lagi, Pak. Persepsi korupsi di kalangan eksekutif lokal, akademisi, expatriat yang sering ditemukan. *Nah*, ini yang mereka tanya, persepsi mereka. Kesimpulan kita apa, ada tiga sektor prioritas yang harus kita kerjakan, yang KPK harus kerjakan.

Satu adalah sektor dunia usaha; dua, sektor politik; tiga, sektor layanan publik. Karenanya, Pak, sebenarnya KPK sudah kerja *loh*, Pak, di bidang politik. Sudah kerja, Pak.

Paku integritas kita kerjakan, PCB kita kerjakan. Jadi, kalau seandainya sekarang Pak Arsul Sani kira-kira membuat kesimpulan, *wah*, KPK *enggak* kerja, mohon dicabut persepsi itu, karena kita sudah kerja. Ini kita sebut *nih*, Pak, sektor politik. Jadi, *gini*, sektor politik kita sebutkan, saya tidak menyebut lagi dengan yang turun naik, turun naik tadi karena sudah ada gambarannya.

*Nah*, sekarang sektor politik, kenapa dia seperti itu dan apa yang harus kita kerjakan. Satu, Pak, di sini, kondisi politik Indonesia masih marak

ditemukan praktik korupsi, seperti suap, gratifikasi, hingga konflik kepentingan antara politisi, pejabat publik, dan pelaku usaha. Ini yang kita temukan. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan KPK, dibuat ... (***suara tidak jelas 4:52:57***) Yang dilakukan KPK sudah ada, Pak, dan akan dikerjakan juga ada.

Selanjutnya, di bidang pelayanan publik. Kita juga sudah lakukan, Pak. Di bidang tata bisnis dan niaga sudah kita lakukan. Jadi, saya kira, saya tidak ingin lagi perpanjang lebar.

Sektor ekonomi, Pak, tantangan Indonesia memang kita paham, kita produktivitas untuk perusahaan. Kita buka kemudian investasi, tapi apa kita sampai hari ini telah bisa menjamin kemudahan investasi itu bebas dari korupsi? Belum bisa jawab kita, Pak.

Karena itu, KPK melakukan perbaikan. Apa yang dilakukan oleh KPK? Setidaknya ada empat, Pak. Satu, membantu Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha, sudah kita kerjakan, Perkom Nomor 7 Tahun 2020. Tugasnya adalah meneliti, menelaah badan usaha, kerentanan resiko terjadi korupsi. Ada peluangnya, tutup; ada celahnya, tutup. Lakukan perbaikan supaya tidak ada, sudah kita lakukan.

Berikutnya, KPK juga membangun sistem manajemen antisuap, sudah. Berikutnya, kita buat juga bisa *whistle blowing system* di setiap kementerian/lembaga satuan kerja supaya orang berani lapor. Bahkan, seandainya bapak lihat di mana-mana itu, Pak, pasti ada pelayanan. restoran ini diawasi oleh KPK. Ada, Pak, sekarang. Itu dikerjakan, tapi apakah itu efektif atau belum, nanti kita kaji lagi.

Satu lagi, ada yang disebut dengan Unit Pengelola Gratifikasi. Kita buat juga, Pak.

Saya kira itu dari CPI, saya bukan ahlinya, Pak. Tapi, setelah saya tanya Pak Pahala, Pak Pahala pernah datang ke Berlin, Berlin pun *enggak* bisa jawab secara ahlinya, begitu.

Terakhir, perkembangan perkara Lucas Enembe. Kami sampaikan, Pak, karena kemarin ada beberapa isu. Kami memang betul datang ke Papua tanggal 3, saya buka dulu filenya, Pak, kita ini paling tidak sanggup kalau... *nah*, Ini, Pak, tanggal 3 November, Pak, kita datang ke sana. saya, Ketua KPK, tiga pengawal, Direktur Penyidikan, Kapolda Papua, Kapangdam, Kabinda, dua penyidik, dua... dan empat dokter, Pak, datang ke sana memastikan kondisi lokasi Enembe.

Begitu datang, Pak, *alhamdulillah*, Pak, kita disambut dengan unjuk rasa ,tapi *alhamdulillah* juga kita bisa balik. Saya pastikan saya bilang dengan Kapolda, Pangdam, Kabinda kita dalam rumah Enembe cukup satu jam setengah.

Di seluruh aktivitas di kediamannya, tanggal 3 November, kita hitung menit per menit. Masuk kediaman 13.15. Ke luar dari kediaman 14.45. Lebih dari itu, pastilah ada rencana berikutnya.

Jadi, kami pastikan, selama di sana, Pak, pertemuan terbuka. Jadi, seandainya ada yang *ngomong* ada janji, saya pastikan tidak ada janji itu karena pertemuannya direkam, divideokan, dan langsung juga ada *live streaming*, Pak. Jadi, tidak..tidak...jadi, saya pastikan tidak ada janji, tidak ada pembicaraan apa pun.

Selanjutnya, pada tanggal 10 Januari yang lalu, yang bersangkutan langsung penangkapan. *Alhamdulillah* sukses berjalan, tapi sekali lagi, Pak, penangkapan ini tentulah karena kerja keras semua pihak dan itu kami sudah sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan semua.

Tanggal 10 kita penangkapan, 11 dibawa rumah sakit. Kita bawa ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto, ingin memastikan bahwa Beliau dalam keadaan fit. Dan, tanggal 11 dilakukan pemeriksaan oleh IDI. Hasilnya adalah *fit for stand to trial* sehingga kita lakukan penahanan.

Dua kali kita tangguhkan karena kondisi kurang fit, kita obati rumah sakit. Dan, kemarin ada permintaan surat tentang keinginan Beliau untuk berobat ke rumah sakit di Singapura. Itu pun kita bahas.

Saya, kami pastikan, Pak, setiap keputusan itu tidak pernah dilakukan sendiri dan kita rapatkan dengan para pihak yang berkepentingan, para profesional, satu, dari Kementerian Kesehatan; kedua, dari RSPAD; ketiga, dari IDI hadir semua, Pak.

Dan, kita rumuskan, mendengar seluruh keterangan dari dokter yang merawat. Jadi, kondisi LE ini selama dalam rumah tahanan sangat diperhatikan, dilakukan pemeriksaan dan pelaporan setiap empat kali dalam satu hari terhadap saudara LE.

Kenapa empat kali? Mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bertanya, yang bersangkutan harus minum obat dan obatnya harus disampaikan langsung karena kami tidak ingin obat itu tidak diminum. Karena, bisa saja, Pak, kita juga di rumah, kan, bisa juga *enggak* mau minum obat, kita buang begitu, kan.

Ini pastikan empat kali minum obat, empat kali itu disampaikan, dan itu dilakukannya oleh dokter Rumah Sakit RSPAD. Yang nomor empat pentingnya, Pak, di sini LE mampu memahami perkaranya dan mampu membela untuk dirinya sendiri dalam perkara tersebut.

Yang keempat, fasilitas kesehatan di Indonesia memadai. Itu keterangan Kementerian Kesehatan dan IDI juga mengatakan hasil pemeriksaan kesehatan saudara LE *fit for interview* dan *fit for stand to trial* sehingga untuk sementara LE tidak perlu dirujuk ke luar negeri atau Singapura.

Saya kira itu yang ingin kami sampaikan, Pak. Mudah-mudahan dengan pertanyaan dari Ketua Komisi III tadi bisa menjawab berbagai berita yang kita tidak tahu pertanggungjawabannya.

Yang berikutnya, kami juga akan terus komunikasi terus, Pak, memastikan bahwa perkara LE ini cepat selesai dan tentu kita tetap menjunjung tinggi azas hak asasi manusia dan menjamin keselamatan yang bersangkutan. Titip salam buat keluarga Papua, bahwa ini akan selesai dan tentu kita tetap memberikan perhatian terhadap kesehatan daripada Saudara Lukas Enembe.

Saya kira itu, terima kasih. Saya akhiri.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**WAKIL KETUA KOMISI III (PANGERAN KHAIRUL SALEH/F-PAN):**

Baik.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Sebentar, sebelum ditutup.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Benny.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Baik, karena ada pun pasal khusus terhadap Saudara Lukas Enembe dan siapa pun tahu se-indonesia, Lukas Enembe adalah kader Partai Demokrat, Gubernur Papua.

Berkenan dengan itu, kami menyampaikan, kami menghargai proses hukum, menghormati proses hukum. Yang kedua, kami meminta penegakan hukum yang adil, perlakuan yang sama kepada gubernur-gubernur lain juga yang bermasalah hukum agar diperlakukan sama. Kami tahu semua siapa dan kami meminta KPK untuk tidak diam soal itu.

Yang ketiga, atas nama warga Papua, kami menyampaikan salam hormat juga untuk Ketua KPK, Pimpinan KPK sambil menitip pesan, tegakkan keadilan di Republik ini. Tidak hanya Papua, tidak hanya Lukas Enembe. Kita semua menunggu Lukas Enembe-Lukas Enembe lainnya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Pak Firli, sebelum kita menayangkan kesimpulan, tadi teman-teman meminta *slide* terkait indeks persepsi korupsi CPI itu, Pak, nanti sebelum pulang kita minta dikopikan.

Tolong tayangkan kesimpulan. Saya bacakan biar singkat.

1. Komisi III di DPR RI menerima penjelasan capaian kinerja KPK pada tahun 2022 dan mendukung rencana kerja dan program prioritas KPK di tahun 2023 yang searah dengan tujuan pembangunan nasional dan *road map* pemberantasan korupsi.

Setuju, Pak? Setuju ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

2. Komisi III di DPR RI meminta KPK untuk memprioritaskan upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan pelaksanaan *monitoring* guna menyelamatkan keuangan dan aset negara serta mencegah kerugian negara.

Setuju ya?

**F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):**

Interupsi, Ketua. Saya belum setuju, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Oke. Silakan, silakan.

Oke, silakan.

**F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):**

Saya kira tadi seperti yang Pak Ketua KPK sampaikan, pencegahan dan penindakan harus dilakukan secara simultan dengan kecepatan yang sama. Karena itu, saya *enggak* setuju kalau Komisi III ini memprioritaskan pencegahan, Pak Ketua. Jadi, penindakan dan pencegahan itu harus jalan seiring, Pak. Jangan diutamakan pencegahan, jangan diutamakan penindakan, tetapi pencegahan dan penindakan itu dilakukan secara simultan dengan kecepatan yang sama.

Saya kira Pak Benny setuju juga ini usulannya saya. Itu usulan saya, Pak Ketua. Terima kasih.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):**

Melengkapi Bung Johan Budi juga, jadi Bung Johan Budi juga bacanya sama seperti yang saya usulkan, selain penindakan dan pencegahan, juga monitoring. Tadi kan kita minta supaya monitoringnya malah diangkat karena dia menjadi terdepan untuk mencegah pencegahan itu. Terima kasih.

Ini melengkapi saja, Bung Johan Budi, dan tentu tambahannya itu sektor pendapatan.

Terima itu, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Itu sektor pendapatannya belum.

**F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):**

Ketua, izin.

**WAKIL KETUA KOMISI III (PANGERAN KHAIRUL SALEH/F-PAN):**

Oke, Pak Dim. silakan sempurnakan.

**F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):**

Kalau ini memang tugasnya KPK, cuma kita mau yang prioritas yang mana, pencegahan apa penindakan. *Nah*, kalau menurut saya, *prevention better than cure* saya sampaikan, pencegahan itu lebih baik. saya yakin KPK juga lebih juga setuju dengan itu. Karena apa, karena tujuan dengan dibuatnya desa anti korupsi, kan, tujuannya untuk pencegahan.

Itu Ketua, Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Setuju saya. Coba, betulkan lagi.

2. Komisi III di DPR RI meminta KPK untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan korupsi secara simultan, dan pelaksanaan monitoring guna menyelamatkan keuangan dan aset negara, serta mencegah kerugian negara.

Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**



Sudah diketok. *Enggak* bisa lagi *enggak* setuju. Sudah saya ketok.

Tiga, kita lanjutkan,

3. Komisi III DPR RI meminta KPK untuk meningkatkan pemantauan dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara korupsi dan koordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga dan instansi dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Oke ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Lanjut.

4. Komisi III di DPR RI... Komisi III DPR RI meminta KPK untuk dapat meningkatkan kembali komunikasi dan edukasi publik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kerja program pemberantasan korupsi di seluruh sektor atau bidang sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Didrop.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):**

Saya kira ini drop saja, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Oke, setuju. Setuju, setuju. Saya lanjutkan ya.

4. Komisi III di DPR RI mendukung pelaksanaan Program Desa Anti Korupsi dan pengembangannya secara berkesinambungan dalam rangka mendukung program pemberantasan korupsi nasional.

**F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):**

Ketua, izin, Ketua.

Kalau nomor 4 itu kita sampaikan, artinya, Komisi III tidak mendukung program-program yang lain, Pak Ketua,

**KETUA RAPAT:**

Oke.

**F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):**

Karena itu, dihapus saja. Kita mendukung sepenuhnya kerja-kerja KPK, penindakan dan pencegahan.

**KETUA RAPAT:**

*Drop. Ok, di-drop aja.*

**F-P. DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):**

Nomor 4 drop saja, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Cukup ya, tiga *aja* ya.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):**

Cukup tiga saja.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia,

Saya rasa cukup rapat pada hari ini...

**F-P. DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):**

Pimpinan. Kan, harus ditanya dulu *dong*, anu, Ketua KPK. Kan, belum setuju dia, tanya dulu.

**KETUA RAPAT:**

Sudah?

Oke, silakan.

Pak Firli, mungkin ada *closing statement*, silakan.

**KETUA KPK RI:**

**Yang kami hormati Ketua Komisi III, Wakil Ketua, dan segenap Anggota Komisi III,**

Kami dari segenap insan KPK telah menyampaikan laporan kinerja KPK tahun 2022 dan sekaligus juga menyampaikan program kerja pemberantasan korupsi tahun 2023. Kami akan tetap berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi sampai Indonesia betul-betul bersih dari praktek-praktek korupsi. Tujuan didirikannya KPK, kita sangat sadar bahwa supaya upaya-upaya pemberantasan korupsi bisa berdaya guna dan berhasil

guna. Mohon dukungan dari segenap Anggota Komisi III dan segenap rakyat Indonesia di mana pun berada.

Terima kasih. Marilah bersamai KPK dalam upaya bersatu berantas korupsi.

Terima kasih. Saya akhiri.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh*

Saya rasa rapat cukup. Sebelum kita tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Firli beserta jajaran dan rapat saya tutup dengan ucapan *Alhamdulillahirobbilalamin.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.45 WIB)**

a.n Ketua Rapat  
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

**NOVIANTI, S.E.**  
**NIP.196711041988032001**